

**IMPLEMENTASI PROGRAM AKSELERASI PENDIDIKAN
(STUDI KASUS PADA SMA NEGERI 1 TERBANGGI BESAR LAMPUNG
TENGAH)**

(Tesis)

**Oleh
WARHAM**



**PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN PENDIDIKAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

**IMPLEMENTASI PROGRAM AKSELERASI PENDIDIKAN
(STUDI KASUS PADA SMA NEGERI 1 TERBANGGI BESAR LAMPUNG
TENGAH)**

**Oleh
WARHAM**

**Tesis
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
MAGISTER MANAJEMEN PENDIDIKAN
Pada
Program Studi Magister Manajemen Pendidikan
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan**



**PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN PENDIDIKAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

Judul Tesis : **IMPLEMENTASI PROGRAM AKSELERASI
PENDIDIKAN**
(Studi Kasus pada SMA Negeri 1 Terbanggi Besar
Lampung Tengah)

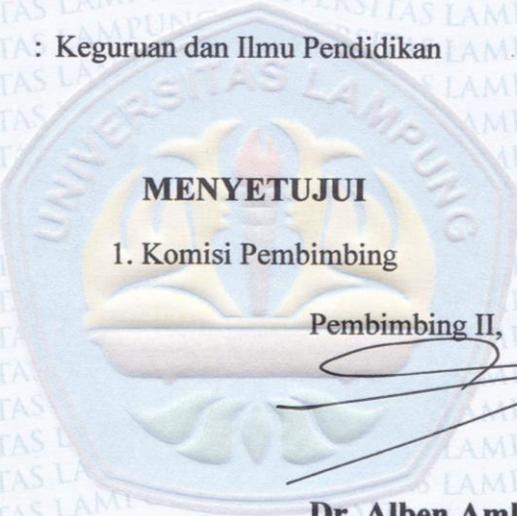
Nama Mahasiswa : **Warham**

No. Pokok Mahasiswa : 1123012038

Program Studi : Manajemen Pendidikan

Jurusan : Ilmu Pendidikan

Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan



MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

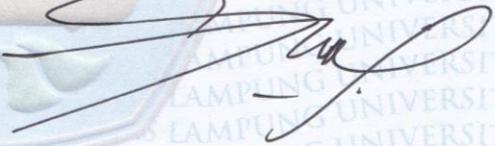
Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. Sumadi, M.S.

NIP 19530717 198003 1 005



Dr. Alben Ambarita, M.Pd.

NIP 19570711 198503 1 004

2. Mengetahui

Ketua Jurusan Ilmu Pendidikan

Ketua Program Studi

Magister Manajemen Pendidikan



Dr. Riswanti Rini, M.Si.

NIP 19600328 198603 2 002



Dr. Irawan Suntoro, M.S.

NIP 19560323 198403 1 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Sumadi, M.S.

Sekretaris : Dr. Alben Ambarita, M.Pd.

Penguji Anggota : I. Dr. Muhammad Fuad, M.Hum.

II. Dr. Irawan Suntoro, M.S.

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Dr. Muhammad Fuad, M.Hum.
NIP. 19590722 198603 1 003

Direktur Program Pascasarjana

Prof. Dr. Sudjarwo, M.S.
NIP. 19530528 198103 1 002

4. Tanggal Lulus Ujian : 26 Mei 2016

ABSTRACT

THE IMPLEMENTATION OF ACCELERATED PROGRAM IN EDUCATION (THE CASE STUDY AT STATE SENIOR HIGH SCHOOL 1 TERBANGGI BESAR CENTRAL OF LAMPUNG)

By

WARHAM

This research intended to describe the implementation of accelerated program in education at State Senior High School 1 Terbanggi Besar Central of Lampung. There were eight things examined in this study, namely: planing, organizing, implementation, controlling, evaluating, supporting factors, inhibiting factors, and the customers satisfied of accelerated program in education at State Senior High School 1 Terbanggi Besar Central of Lampung. Research with qualitative approach. Data were collected using interviews, observation nonparticipant and documentation. Data were analyzed using the patterns of interaction Miles and Huberman have been modified. The findings showed: the planing, organizing, and implementation is done by the team of curriculum development that principal, vice principal, coordinator of accelerated program, senior teschers, and school committee. The controlling and evaluation of accelerated program in education have not done with a head education of Central Lampung and Lampung Province. The support factors of accelerated program in education at State Senior High School I Terbanggi Besar Central of Lampung, namely: sum of teachers and a good qualification teachers, sum of superior intelligent students, a good infrastructur, and a good commitment. The inhibiting factors of accelerated program in education, namely make a schedule, suport government, teaching learning. The customers satisfied of accelerated program in education at State Senior High School I Terbanggi Besar Central of Lampung is a good.

Keywords: implementation, accelerated program in education.

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PROGRAM AKSELERASI PENDIDIKAN (STUDI KASUS PADA SMA NEGERI 1 TERBANGGI BESAR LAMPUNG TENGAH)

Oleh

WARHAM

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi program akselerasi di SMA Negeri 1 Terbanggi Besar Lampung Tengah, yang meliputi 8 sub fokus: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, faktor pendukung, faktor kendala dan kepuasan pelanggan program akselerasi pendidikan di SMA N 1 Terbanggi Besar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi nonpartisipan dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan pola interaksi Miles dan Huberman yang telah dimodifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan program akselerasi dilakukan oleh tim pengembang kurikulum sekolah yang terdiri atas kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru senior dan komite sekolah. Pengawasan dan evaluasi program akselerasi tidak dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten maupun Provinsi. Faktor pendukung program akselerasi pendidikan di SMA N 1 Terbanggi Besar ialah tersedianya dana yang memadai, kualifikasi dan kompetensi tendik, jumlah siswa cerdas istimewa yang memadai, tersedianya sarana prasarana yang dibutuhkan. Faktor kendala program akselerasi pendidikan di SMA Negeri 1 Terbanggi Besar ialah pengelolaan KBM belum optimal, dan kurangnya pembinaan pemerintah melalui Dinas Pendidikan Kabupaten maupun Provinsi. Kepuasan pelanggan program akselerasi pendidikan di SMA Negeri 1 Terbanggi Besar meliputi tersedianya sarana prasarana yang memadai, siswa lulus UN 100 %, pelayanan KBM dengan baik, biaya pendidikan yang terjangkau.

Kata Kunci: implementasi, program akselerasi pendidikan

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa.

1. tesis dengan judul **“Implementasi Program Akselerasi Pendidikan (Studi Kasus Pada SMA Negeri 1 Terbanggi Besar)”** adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya tulis lain dengan cara tidak tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau disebut palgiarisme.
2. hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya. Saya bersedia dituntut sesuai hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, Mei 2016

Pembuat Pernyataan



Warham
NPM. 1123012038

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan pada tanggal 27 Juni 1968, di Padaerang Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat. Penulis dilahirkan sebagai anak ke-9 dari 10 bersaudara, dari pasangan Bapak Dulrokhmad (Alm) dan Ibu Sawiyah (Almh), dan diberi nama Warham.

Pendidikan dasar ditempuh di Sekolah Dasar (SD) Negeri 2 Purwodadi Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah, dan tamat pada tahun 1982. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Kalirejo, Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah, dan tamat pada tahun 1985.

Pada Tahun 1985, penulis melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Poncowati, sekarang berganti nama menjadi Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Terbanggi Besar, dan tamat pada tahun 1988.

Pada tahun 1988 penulis melanjutkan pendidikan ke Universitas Lampung, Program Studi D3 Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dan tamat pada tahun 1991.

Pada tahun 1997, penulis melanjutkan pendidikan ke Universitas Terbuka UPBJJ Bandar Lampung, program studi S1 Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dan tamat pada tahun 1999.

Pada tahun 2011, penulis melanjutkan pendidikan ke Universitas Lampung (Unila) program studi Magister Manajemen Pendidikan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.

Profesi penulis sebagai tenaga pendidik ditetapkan berdasarkan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia per tanggal 1 Maret 1992. Penulis diangkat sebagai guru mata pelajaran matematika di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Bandar Agung yang sekarang berganti nama

menjadi Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Terusan Nunyai, Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah.

Selain karir di sekolah sebagai tenaga pendidik, penulis juga aktif dalam organisasi profesi Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Jabatan penulis sebagai sekertaris Pengurus Cabang PGRI Kecamatan Terusan Nunyai, terhitung dari tahun 2005 sampai dengan 2015. Pada tanggal 29 Agustus 2015, penulis ditetapkan sebagai Ketua Pengurus Cabang PGRI Kecamatan Terusan Nunyai untuk masa bhakti 2015-2020.

MOTTO

He who stops being better stops being good
(Siapa yang tidak menjadi lebih baik berarti ia berhenti menjadi baik)
(*Oliver Cromwell*)

PERSEMBAHAN

Segala Puji Bagi Allah SWT, Dzat Yang Maha Sempurna
Sholawat serta Salam Selalu Tercurah Kepada Uswatun Hasanah Rosululloh
Muhammad SAW

Kami persembahkan karya kecil ini kepada orang-orang yang kami cintai dan kami kasahi:

Ayah (Dulrokhmad) dan Ibu tercinta (Sawiyah), yang telah membesarkan dan mendidik kami dengan penuh cinta kasih dan pengorbanan yang tulus serta selalu mendo'akan yang terbaik untuk keberhasilan dan kebahagiaan kami.

Istri kami tercinta (Sri Mulyati, S.Pd); serta anak-anak kami (Sarah Chinthya Dhevie, Alfina Indah Paramitha, Sherly Novrica Damayanti, Virginia Desta Maharani, dan Callysta Putri Rahmadani) yang telah memberikan dukungan dan semangatnya pada kami.

Seluruh keluarga besar yang terus memberikan do'anya kepada kami..

Para Dosen yang telah mengajar dan mendidik dengan penuh kesabaran.

Teman-teman sejawat di SMA Negeri 1 Terusan Nunyai Lampung Tengah yang selalu memberikan dukungan dan do'anya kepada kami.

Teman-teman sejawat di SMA Negeri 1 Terbangi Besar Lampung Tengah yang telah membantu kami dan memeberikan dukungan sepenuhnya.

Teman-teman MP3 (Manajemen Pendidikan Angkatan ke-3) dan adik tingkat yang selalu tulus memberikan dukungan moril dan materiil kepada kami, dari kalian kami banyak belajar memahami arti kebersamaan dan persahabatan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas budi baik kalian semua kepada kami.

Almamater Universitas Lampung tercinta

SANWACANA

Alhamdulillah Robbil ‘Alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga tesis ini dapat diselesaikan. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, dan para sahabat..

Tesis dengan judul “Implementasi Program Akselerasi Pendidikan (Studi Kasus Pada SMA Negeri 1 Terbanggi Besar Lampung Tengah) adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Pendidikan pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung.

Penyusunan tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih dengan tulus ikhlas kepada:

1. Pemerintah Pusat melalui Kemendikbud yang telah memberikan bantuan beasiswa pendidikan S-2 kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan pada program Magister Manajemen Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
2. Pemerintah daerah Provinsi Lampung yang telah memberikan beasiswa pendidikan S-2 kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan pada program Magister Manajemen Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
3. Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P, selaku Rektor Universitas Lampung, baik langsung maupun tidak langsung telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan Pascasarjana pada program Magister Manajemen Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.

4. Prof. Dr. Sudjarwo, M.S, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung.
5. Dr. Muhammad Fuad, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
6. Dr. Riswanti Rini, M.Si, selaku Ketua Jurusan Ilmu Pendidikan FKIP Universitas Lampung.
7. Dr. Irawan Suntoro, M.S, selaku Ketua Program Magister Manajemen Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
8. Dr. Sumadi, M.S, selaku dosen Pembimbing I, yang selalu meluangkan waktu, pikiran dan tenaganya untuk memberikan bimbingan dan arahan secara optimal kepada penulis dalam penyusunan tesis ini.
9. Dr. Alben Ambarita, M.Pd, selaku dosen Pembimbing II, yang selalu meluangkan waktu, pikiran dan tenaganya untuk memberikan bimbing dan arahan secara optimal kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
10. Seluruh dosen Pascasarjana Program Magister Manajemen Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universtas Lampung, yang telah mentransfer ilmu dan pengetahuan serta memberikan arahan yang sangat baik kepada penulis.
11. Drs. H. Sarjito, MM, selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah, yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan pada program Magister Manajemen Pendidikan Universitas Lampung.
12. Drs. Andreas Sinaga, MM, selaku Kepala SMA Negeri 1 Terusan Nunyai , yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melanjutkan studi pada program Magister Manajemen Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
13. Drs. Sarmin, MM, selaku Kepala SMA Negeri 1 Terbanggi Besar yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di sekolah tersebut.
14. Rekan-rekan Guru dan staf Tata Usaha SMA Negeri 1 Terbanggi Besar yang turut serta dalam memberikan dukungan kepada penulis berupa

pemberian informasi dan fasilitas yang penulis perlukan pada saat mengadakan penelitian.

15. Rekan-rekan Guru dan staf Tata Usaha SMA Negeri 1 Terusan Nunyai yang turut serta dalam memberikan dukungan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan pada program Pascasarjana Universitas Lampung.
16. Istri dan anak-anak kami tercinta yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan, baik dukungan material maupun spiritual sehingga penulis dapat memperoleh gelar Magister Manajemen Pendidikan (M.Pd)
17. Pengurus Komite SMA Negeri 1 Terusan Nunyai yang telah memberikan bantuan moral maupun material kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi pada program Pascasarjana Magister Manajemen Pendidikan Universitas Lampung.
18. Rekan-rekan mahasiswa program Pascasarjana Magister Manajemen Pendidikan Universitas Lampung angkatan ketiga (MP3), yang selalu menciptakan rasa kebersamaan baik suka maupun duka dalam menempuh perkuliahan.
19. Semua pihak yang turut serta membantu penyelesaian tesis.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, walaupun telah mendapat bantuan dari berbagai pihak, sehingga masih terdapat kekurangan atau kelemahan. Penulis memohon kritik dan saran demi kesempurnaan tesis ini.

Bandar Lampung, Mei 2016
Penulis

Warham

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1 Perbedaan Rencana Strategis dan Rencana Oprasional.....	41
2.2 Pembelajaran Tradisional versus Pembelajaran Cepat.....	94
2.3 Kecenderungan dan Kebiasaan Belajar.....	97
3.1 Jadwal Kehadiran Peneliti.....	116
3.2 Informan Penelitian.....	118
3.3 Jadwal Wawancara.....	124
3.4 Obyek Observasi.....	126
3.5 Dokumen Penelitian.....	127
3.6 Pengkodean Informan.....	129
4.1. Jumlah Guru dan Kualifikasinya.....	150
4.2. Tenaga Kependidikan/ TU.....	150
4.3. Jumlah Siswa Program Akselerasi.....	151
4.4. Sarana dan Prasarana Sekolah.....	152
4.5 Perencanaan Program Akselerasi.....	162
4.6 Pengorganisasian Program Akselerasi Pendidikan.....	167
4.7 Pelaksanaan Program Akselerasi.....	168
4.8 Pengawasan Program Akselerasi.....	170
4.9 Faktor-Faktor Pendukung Program Akselerasi.....	172

4.10 Faktor-Faktor Kendala Program Akselerasi.....	173
4.11 Kepuasan Pelanggan Program Akselerasi.....	175
4.12 Implementasi Perencanaan Program Akselerasi.....	190
4.13 Implementasi Pengorganisasian Program Akselerasi.....	191
4.14 Implementasi Pelaksanaan Program Akselerasi.....	192
4.15 Implementasi Pengawasan Program Akselerasi.....	194
4.16 Implementasi Evaluasi Program Akselerasi.....	196
4.17 Fakfot-faktor Pendukung Program Akselerasi.....	197
4.18 Implementasi Faktor-faktor Kendala Program Akselerasi.....	199
4.19 Implementasi Kepuasan Pelanggan Program Akselerasi.....	200

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Tujuan Pendidikan.....	31
2.2 Komponen Pendidikan.....	33
2.3 Posisi Manajemen dalam Pendidikan.....	35
2.4 Proses Manajemen Sarana dan Prasarana.....	75
2.5 Kerangka Pikir Penelitian.....	110
3.1 Jenis-jenis Penelitian.....	114
3.2 Sistem Pengkodean Wawancara Penelitian.....	122
3.3 Analsis Data Berdasarkan Model Interaktif.....	130
3.4 Model Desain Triangulasi.....	133
4.1 Langkah-langkah Perencanaan Program Akselerasi.....	178
4.2 Pengorganisasian Program Akselerasi.....	179
4.3 Pelaksanaan Program Akselerasi.....	180
4.4 Pengawasan Program Akselerasi.....	181
4.5 Komponen Evaluasi Program Akselerasi.....	183
4.6 Faktor-Faktor Pendukung Program Akselerasi.....	185
4.7 Faktor-Faktor Kendala Program Akselerasi.....	187

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL.....	
i	
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
ABSTRCT.....	iii
ABSTRAK.....	iv
LEMBAR PERNYATAAN.....	v
RIWAYAT HIDUP.....	vi
MOTTO.....	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
SANWACANA.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Fokus Penelitian.....	11
1.3 Pertanyaan Penelitian.....	12
1.4 Tujuan Penelitian.....	13
1.5 Manfaat Penelitian.....	14
1.5.1 Manfaat Praktis.....	14
1.6 Definisi Istilah.....	16
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Pengertian Manajemen.....	19
2.2 Pengertian Pendidikan.....	22
2.2.1 Aliran Pendidikan.....	25
2.2.2 Faktor-faktor Pendidikan.....	27

2.3	Manajemen Pendidikan.....	32
2.4	Perencanaan Program Akselerasi	35
2.5	Pengorganisasian Program Akselerasi	50
2.6	Pelaksanaan Program Akselerasi	52
2.7	Pengawasan Program Akselerasi	53
2.8	Evaluasi Program Akselerasi	56
2.9	Faktor-Faktor Pendukung Program Akselerasi.....	59
2.10	Faktor-Faktor Kendala Program Akselerasi	60
2.11	Kepuasan Pelanggan Program Akselerasi	61
2.12	Manajemen Sekolah.....	63
	2.12.1 Manajemen Kurikulum.....	64
	2.12.2 Manajemen Kesiswaan.....	71
	2.12.3 Manajemen Sarana Prasarana.....	74
	2.12.4 Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan...	77
	2.12.5 Manajemen Pembiayaan.....	80
	2.12.6 Manajemen Hubungan Masyarakat.....	91
2.13	Program Akselerasi Pendidikan.....	92
	2.13.1 Pengertian Akselerasi.....	92
	2.13.2 Gaya Penyerapan Belajar.....	94
	2.13.3 Intellegence Quotient dan Multiple Intellegence..	98
2.14	Kerangka Pikir.....	108

Bab III METODE PENELITIAN

3.1	Jenis dan Rancangan Penelitian.....	111
3.2	Tempat dan Lokasi Penelitian.....	115
3.3	Waktu Penelitian.....	115
3.4	Kehadiran Peneliti.....	116
3.5	Sumber Data.....	117
3.6	Teknik Pengumpulan Data.....	119
	3.6.1 Wawancara.....	120
	3.6.2 Observasi.....	124
	3.6.3 Dokumentasi.....	126

3.7	Teknik Analisa Data.....	128
3.7.1	Reduksi Data.....	130
3.7.2	Penyajian Data.....	130
3.7.3	Verifikasi Data.....	131
3.8	Pengecekan Keabsahan Data.....	131
3.8.1	Triangulasi Data.....	132
3.9	Tahap Penelitian.....	134
3.9.1	Tahap Pra Lapangan.....	134
3.9.2	Tahap Pekerjaan Lapangan.....	134
3.9.3	Tahap Pelaporan Hasil Penelitian.....	135

BAB IV PAPARAN DATA, TEMUAN DAN PEMBAHASAN

4.1	Gambaran Umum.....	137
4.1.1	Propil SMA N 1 Terbanggi Besar.....	137
4.1.2	Visi, Misi dan Tujuan.....	139
4.1.3	Organisasi.....	144
4.1.4	Sarana Prasarana Sekolah.....	151
4.1.5	Kurikulum Program Akselerasi.....	152
4.1.6	Pembiayaan Program Akselerasi.....	153
4.1.7	Program Akselerasi Pendidikan.....	155
4.2	Paparan Data Penelitian.....	157
4.2.1	Perencanaan Program Akselerasi.....	158
4.2.2	Pengorganisasian Program Akselerasi	165
4.2.3	Pelaksanaan Program Akselerasi	167
4.2.4	Pengawasan Program Akselerasi	169
4.2.5	Evaluasi Program Akselerasi	171
4.2.6	Faktor Pendukung Program Akselerasi	172
4.2.7	Faktor Kendala Program Akselerasi	173
4.2.8	Kepuasan Pelanggan Program Akselerasi.....	174
4.3	Temuan Hasil Penelitian.....	176
4.3.1	Perencanaan Progran Akselerasi	176
4.3.2	Pengorganisasian Program Akselerasi	177
4.3.3	Pelaksanaan Program Akselerasi	179

4.3.4 Pengawasan Program Akselerasi	180
4.3.5 Evaluasi Program Akselerasi	181
4.3.6 Faktor Pendukung Program Akselerasi	183
4.3.7 Faktor Kendala Program Akselerasi	185
4.3.8 Kepuasan Pelanggan Program Akselerasi.....	187
4.4 Pembahasan Hasil Penelitian.....	189
4.4.1 Perencanaan Program Akseleraasi.....	189
4.4.2 Pengorganisasian Program Akselerasi.....	190
4.4.3 Pelaksanaan Program Akselerasi.....	191
4.4.4 Pengawasan Program Akselerasi.....	192
4.4.5 Evaluasi Program Akselerasi.....	194
4.4.6 Faktor-Faktor Pendukung Program Akselerasi.....	196
4.4.7 Faktor-Faktor Kendala Program Akslerasi.....	198
4.4.8 Kepuasan Pelanggan Program Akselerasi.....	199
BAB V KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN	
5.1. Kesimpulan	202
5.2. Implikasi.....	204
5.3. Saran.....	205
DAFTAR PUSTAKA.....	207
Lampiran.....	209

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa “Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada bab I ketentuan umum menyatakan bahwa pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan/atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. Pendidikan merupakan hak dasar yang harus dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia, yakni hak mendapatkan pendidikan yang layak dan bermutu, disesuaikan dengan minat dan bakat yang dimiliki tanpa membedakan status sosial, ekonomi, budaya, suku, agama dan jenis kelamin. Pemerataan akses pendidikan merupakan aspek penting dalam mewujudkan hak dasar tersebut, dan demi terciptanya bangsa yang maju dan berkualitas.

Laporan hasil konferensi UNESCO Tahun 1998 kepada komisi internasional tentang pendidikan, menetapkan 4 pilar pendidikan: 1) *learning to know*, yaitu belajar hakekatnya penerapan ilmu pengetahuan; 2) *learning to do*, belajar pada hakekatnya untuk mengembangkan manusia seutuhnya melalui aktivitas aktif seluruh aspek kognitif, afektif, psikomotor, perasaan dan sebagainya; 3) *learning to be*, pendidikan pada hakekatnya untuk menciptakan manusia terdidik yang mandiri, penuh percaya diri, memahami dirinya secara tepat; 4) *learning to live together*, pendidikan pada hakekatnya untuk menanamkan nilai kemanusiaan, moral, agama, yang melandasi hubungan antar manusia, sehingga tercipta budaya damai.

Perubahan keempat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 31 ayat 1 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, sedangkan ayat 2 menyatakan setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Amanat Undang-Undang Dasar 1945 tersebut secara jelas menyatakan tentang hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan, dan kewajiban pemerintah untuk memberikan biaya pendidikan dasar tersebut.

Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut di atas, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar. Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah. Ayat 2 menyatakan bahwa pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah

Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat, serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat. Program wajib belajar yang dicanangkan oleh pemerintah tersebut adalah wajib belajar 9 tahun bagi warganya.

Wajib belajar bertujuan memberikan pendidikan minimal bagi warga negara Indonesia untuk dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri dalam masyarakat atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Warga negara Indonesia yang berusia 6 tahun hingga usia 15 tahun berhak menempuh pendidikan dasar 9 tahun dengan pembiayaan ditanggung oleh pemerintah. Selain pencanangan program pendidikan dasar 9 tahun, pemerintah juga menyediakan pembiayaan pendidikan dasar, diantaranya melalui program Biaya Operasional Sekolah (BOS) yang saat ini dirasa sangat membantu meringankan beban siswa, bahkan pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20 % dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Upaya pemerintah lainnya dalam pembangunan sektor pendidikan ialah menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen keempat, pasal 31 ayat 3 menyatakan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.

Bagi warga negara usia sekolah dan mengalami kendala atau mempunyai kelainan fisik, mental, emosional dan sosial serta mempunyai kecerdasan

istimewa/bakat tertentu, pemerintah juga mengupayakan warga negara tersebut untuk dapat menikmati pendidikan bermutu melalui penyelenggaraan pendidikan layanan khusus sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif, pasal 1 menyatakan bahwa pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Pasal 3 ayat 1 menyatakan bahwa setiap siswa yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa berhak mengikuti pendidikan secara inklusif pada satuan pendidikan tertentu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tersebut, maka SMA N 1 Terbanggi Besar menyelenggarakan pendidikan inklusif dalam bentuk kecerdasan intelektual atau cerdas istimewa (CI). Pada tahun pelajaran 2014/2015, Lampung Tengah memiliki 54 sekolah menengah atas negeri/swasta, tetapi hanya SMA Negeri 1 Terbanggi Besar yang membuka program layanan khusus tersebut. Program pendidikan layanan khusus di SMA Negeri 1 Terbanggi Besar sudah dirintis sejak tahun pelajaran 2005/2006. Program pendidikan layanan khusus dalam bidang kecerdasan intelektual tersebut dinamakan program akselerasi pendidikan.

SMA Negeri 1 Terbanggi Besar layak menyelenggarakan program akselerasi pendidikan sebagai implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 70 Tahun

2009 tentang Pendidikan Inklusif. Usia sekolah yang sudah mencapai 55 tahun, status SMA Negeri 1 Terbanggi Besar yang hampir memenuhi 8 standar nasional pendidikan, jumlah tenaga pendidik di SMA Negeri 1 Terbanggi Besar mencapai 73 orang, dukungan masyarakat, jumlah siswa cerdas istimewa yang memadai, dan terpenuhinya sarana prasarana penunjang, merupakan modal dasar bagi sekolah untuk menyelenggarakan program akselerasi pendidikan, serta merupakan alasan mengapa program akselerasi pendidikan di SMA Negeri 1 Terbanggi Besar perlu dilaksanakan.

Pada tahun pelajaran 2014/2015, SMA Negeri 1 Terbanggi Besar sudah menyelenggarakan program akselerasi pendidikan selama 10 tahun atau saat ini merupakan program akselerasi pendidikan angkatan kesepuluh. Berdasarkan tahun penyelenggaraan, SMA Negeri 1 Terbanggi Besar tentu memiliki banyak pengalaman dalam hal pengelolaan program akselerasi pendidikan jenjang sekolah menengah atas.

Program akselerasi memiliki keunikan jika dibandingkan dengan program reguler. Keunikan program akselerasi tersebut diantaranya dalam hal perencanaan program akselerasi, pengorganisasian program akselerasi, pelaksanaan program akselerasi, pengawasan program akselerasi, evaluasi program akselerasi, faktor-faktor pendukung program akselerasi, faktor-faktor kendala program akselerasi dan kepuasan pelanggan program akselerasi.

Untuk efisiensi dan efektifitas pencapaian tujuan suatu program yang sudah ditetapkan oleh satuan pendidikan, perlu adanya pengaturan dan kerjasama yang baik antara masing-masing komponen yang terlibat. Pengaturan dan penanganan dalam penyelenggaraan pada lembaga pendidikan sering disebut dengan istilah

manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan meletakkan dasar kajian pada berbagai unsur manajemen yang bertujuan untuk lebih mengefektifkan dan lebih mengefisienkan pencapaian tujuan pendidikan itu sendiri, baik tujuan pendidikan berskala mikro (instruksional) hingga tujuan pendidikan berskala makro (tujuan pendidikan nasional).

Manajemen pendidikan diantaranya meliputi manajemen kurikulum, manajemen personalia, manajemen kesiswaan, manajemen keuangan, manajemen sarana prasarana, manajemen hubungan masyarakat, dan manajemen layanan khusus. Semua kajian bidang manajemen tersebut perlu ditangani dengan baik dan benar, hal ini mengingat manajemen pada hakekatnya tidak bekerja sendiri, tetapi bekerja bersama melalui banyak orang yang terlibat dalam upaya pencapaian tujuan.

Penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Masyarakat meliputi penyelenggara pendidikan, orang tua/wali siswa, serta pihak dunia usaha/dunia industry. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen pendidikan. Keterlibatan semua komponen secara proporsional dan berimbang diharapkan penyelenggaraan pendidikan berjalan baik.

Perencanaan program akselerasi pendidikan merupakan langkah penting. Untuk menentukan keberhasilan program tersebut, perlu adanya perencanaan yang baik dan melibatkan berbagai unsur terkait. Perencanaan yang kurang baik dapat berakibat pada pelaksanaan yang kurang baik pula. Perencanaan program akselerasi pendidikan ini merupakan proses awal dalam mendefinisikan tujuan program akselerasi dan menentukan strategi dalam pencapaian tujuan program

akselerasi, serta mengembangkan aktivitas dalam pencapaian tujuan program akselerasi. Sebagai bahan kajian peneliti terkait unsur perencanaan program akselerasi ialah bagaimana perencanaan program akselerasi pendidikan di SMA Negeri 1 Terbanggi Besar ?

Tahap pengorganisasian adalah suatu tahapan dimana kepala sekolah mengorganisir semua personil yang terlibat dalam penyelenggaraan program akselerasi. Tahap pengorganisasian ini dimaksudkan agar personil yang terlibat dalam penyelenggaraan program akselerasi memahami tugas dan tanggung jawabnya terkait tujuan yang hendak dicapai.

Pada tahap pengorganisasian, kepala sekolah mempunyai peran penting untuk menempatkan personil sesuai dengan kemampuan dan kompetensinya, sebagaimana ungkapan *the right man in the right place* artinya penempatan seseorang sesuai dengan kemampuan/kompetensi yang dimilikinya. Bahan kajian peneliti terkait pengorganisasian program akselerasi pendidikan di SMA Negeri 1 Terbanggi Besar ialah bagaimana pengorganisasian program akselerasi pendidikan di SMA Negeri 1 Terbanggi Besar ?

Program akselerasi pendidikan merupakan program layanan khusus, dan memiliki perbedaan dengan program reguler. Perbedaan dengan program reguler antara lain dalam hal pengelolaan kegiatan belajar, waktu belajar per hari, kegiatan mid semester, waktu ujian semester, dan pembiayaan, maka pelaksanaan program akselerasi pendidikan tersebut menuntut kemampuan khusus. Untuk itu bahan kajian peneliti dalam hal pelaksanaan program akselerasi ialah bagaimana pelaksanaan program akselerasi pendidikan di SMA Negeri 1 Terbanggi Besar.

Pengawasan program adalah suatu aktivitas pemantauan untuk mengontrol apakah pelaksanaan sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan atau belum. Tujuan pengawasan program akselerasi adalah untuk meminimalisir bentuk penyimpangan terhadap rencana pelaksanaan program akselerasi. Pengawasan merupakan bentuk evaluasi program yang dilaksanakan pada saat program sedang berjalan. Apabila evaluasi program dilaksanakan pada saat program sedang berjalan, maka kegiatannya disebut pengawasan. Adanya pengawasan terhadap pelaksanaan program akselerasi diharapkan program berjalan lebih efisien dan efektif. Untuk itu, sebagai bahan kajian peneliti tentang pengawasan program akselerasi pendidikan ialah bagaimana pengawasan program akselerasi pendidikan di SMA Negeri 1 Terbanggi Besar ?

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, ayat 18 menyatakan bahwa evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan. Evaluasi program adalah proses membandingkan antara rencana yang telah ditetapkan dengan realisasi program yang sudah berjalan. Evaluasi program akselerasi merupakan langkah penting untuk mendapatkan umpan balik terhadap pelaksanaan program akselerasi. Temuan dalam evaluasi program sebagai umpan balik dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pelaksanaan program berikutnya. Untuk mengetahui pelaksanaan evaluasi program akselerasi pendidikan di SMA Negeri 1 Terbanggi Besar, maka perlu ada kajian yang mendalam tentang evaluasi program akselerasi tersebut. Bahan kajian peneliti dalam hal evaluasi program akselerasi adalah

bagaimana pelaksanaan evaluasi program akselerasi pendidikan di SMA Negeri 1 Terbanggi Besar ?

Dukungan pemerintah dan masyarakat merupakan faktor penting dalam penyelenggaraan program akselerasi pendidikan di SMA Negeri 1 Terbanggi Besar. Adanya dukungan pemerintah diharapkan program akselerasi pendidikan di SMA Negeri 1 Terbanggi Besar dapat berjalan lancar. Dukungan pemerintah dapat berupa dukungan finansial, kebijakan, dan pengadaan sarana prasarana yang memadai. Sedangkan dukungan masyarakat (orang tua siswa, dunia usaha, dan dunia industri) terhadap penyelenggaraan program akselerasi pendidikan di SMA Negeri 1 Terbanggi Besar dapat berupa dukungan material maupun non material. Untuk itu, sebagai bahan kajian peneliti terkait dengan faktor-faktor pendukung terselenggaranya program akselerasi pendidikan di SMA Negeri 1 Terbanggi Besar ialah apa sajakah faktor-faktor yang menjadi pendukung penyelenggaraan program akselerasi pendidikan di SMA Negeri 1 Terbanggi Besar ?

Pelaksanaan suatu program tidak selamanya berjalan lancar, ada kalanya menemui kendala atau hambatan. Begitu pula pelaksanaan program akselerasi pendidikan di SMA Negeri 1 Terbanggi Besar sebagai bentuk pendidikan layanan khusus, tentu ada kendala yang dialami sehingga mengganggu kelancaran pelaksanaan program akselerasi pendidikan tersebut. Faktor kendala adalah hal-hal yang membatasi, menghalangi, atau mencegah pencapaian sasaran program akselerasi pendidikan. Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan program akselerasi pendidikan perlu dikaji secara mendalam. Kajian peneliti terkait faktor kendala ialah apa sajakah yang menjadi faktor kendala

penyelenggaraan program akselerasi pendidikan di SMA Negeri 1 Terbanggi Besar ?

Program akselerasi pendidikan merupakan program layanan khusus dan menjadi program unggulan, karena terdiri atas siswa yang unggul secara intelektual dan memiliki kemampuan akademik istimewa. Setelah mengikuti kegiatan belajar mengajar selama 2 bulan, sekolah mengadakan seleksi siswa cerdas istimewa melalui rekrutmen dan seleksi calon siswa program akselerasi dengan cara mengikuti test IQ yang diselenggarakan oleh pihak sekolah bekerja sama dengan lembaga yang kompeten. Hasil test IQ tersebut menjadi salah satu syarat seorang siswa dapat diterima pada program akselerasi.

Siswa program akselerasi harus memiliki *Intellegence Quotient* (IQ) minimal 130. Hal ini menggambarkan bahwa siswa program akselerasi benar-benar tergolong siswa yang memiliki kecerdasan istimewa dan perlu mendapatkan layanan khusus di sekolah, agar siswa dapat mengembangkan potensi dirinya secara optimal, sehingga siswa berkembang menjadi individu yang siap menjadi generasi yang memiliki intelektual baik dan dapat memberikan kontribusi terhadap masyarakat bangsa dan negara Indonesia. Bahan kajian peneliti terkait dengan kepuasan pelanggan internal dan pelanggan eksternal ialah bagaimana tingkat kepuasan pelanggan program akselerasi pendidikan di SMA Negeri 1 Terbanggi Besar ?

Program akselerasi pendidikan di SMA Negeri 1 Terbanggi Besar sudah berjalan sepuluh tahun, tetapi belum ada yang melakukan penelitian terhadap penyelenggaraan program tersebut. Oleh karena itu, peneliti mencoba untuk melakukan penelitian manajemen pelaksanaan program akselerasi pendidikan di

SMA Negeri 1 Terbanggi Besar. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi peneliti, pengelola program akselerasi, wakil kepala sekolah, kepala sekolah penyelenggara program akselerasi pendidikan, Kepala Dinas Pendidikan Lampung Tengah, maupun sekolah lain yang ingin menyelenggarakan program akselerasi.

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang penelitian tersebut di atas, maka fokus penelitiannya adalah Implementasi Program Akselerasi Pendidikan pada SMA Negeri 1 Terbanggi Besar, secara rinci dijabarkan dalam sub fokus sebagai berikut :

- 1.2.1 Perencanaan Program Akselerasi Pendidikan di SMA Negeri 1 Terbanggi Besar.
- 1.2.2 Pengorganisasian Program Akselerasi Pendidikan di SMA Negeri 1 Terbanggi Besar.
- 1.2.3 Pelaksanaan Program Akselerasi Pendidikan di SMA Negeri 1 Terbanggi Besar.
- 1.2.4 Pengawasan Program Akselerasi Pendidikan di SMA Negeri 1 Terbanggi Besar.
- 1.2.5 Evaluasi Program Akselerasi Pendidikan di SMA Negeri 1 Terbanggi Besar.
- 1.2.6 Faktor-faktor Pendukung Program Akselerasi Pendidikan di SMA Negeri 1 Terbanggi Besar.
- 1.2.7 Faktor-faktor Kendala Program Akselerasi Pendidikan di SMA Negeri 1 Terbanggi Besar.

1.2.8 Kepuasan Pelanggan Program Akselerasi Pendidikan di SMA Negeri 1 Terbanggi Besar.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Merujuk pada 8 (delapan) sub fokus penelitian di atas, dan untuk mendapatkan arah penelitian lebih terpusat, maka dikembangkan menjadi pertanyaan lanjutan sebagai berikut:

1.3.1 Bagaimana Perencanaan Program Akselerasi Pendidikan di SMA Negeri 1 Terbanggi Besar ?

1.3.2 Bagaimana Pengorganisasian Program Akselerasi Pendidikan di SMA Negeri 1 Terbanggi Besar ?

1.3.3 Bagaimana Pelaksanaan Program Akselerasi Pendidikan di SMA Negeri 1 Terbanggi Besar ?

1.3.4 Bagaimana Pengawasan Program Akselerasi Pendidikan di SMA Negeri 1 Terbanggi Besar ?

1.3.5 Bagaimana Evaluasi Program Akselerasi Pendidikan di SMA Negeri 1 Terbanggi Besar ?

1.3.6 Apa sajakah Faktor-faktor Pendukung Penyelenggaraan Program Akselerasi Pendidikan di SMA Negeri 1 Terbanggi Besar ?

1.3.7 Apa sajakah Faktor-faktor Kendala Penyelenggaraan Program Akselerasi Pendidikan di SMA Negeri 1 Terbanggi Besar ?

1.3.8 Bagaimana Kepuasan Pelanggan Program Akselerasi Pendidikan di SMA Negeri 1 Terbanggi Besar ?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang dan 8 (delapan) sub fokus penelitian serta pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan penelitian ialah untuk menganalisis dan mendapatkan gambaran program Akselerasi Pendidikan di SMA Negeri 1 Terbanggi Besar yang meliputi :

- 1.4.1 Perencanaan Program Akselerasi Pendidikan di SMA Negeri 1 Terbanggi Besar.
- 1.4.2 Pengorganisasian Program Akselerasi Pendidikan di SMA Negeri 1 Terbanggi Besar.
- 1.4.3 Pelaksanaan Program Akselerasi Pendidikan di SMA Negeri 1 Terbanggi Besar.
- 1.4.4 Pengawasan Program Akselerasi Pendidikan di SMA Negeri 1 Terbanggi Besar.
- 1.4.5 Evaluasi Program Akselerasi Pendidikan di SMA Negeri 1 Terbanggi Besar.
- 1.4.6 Faktor-faktor Pendukung Program Akselerasi Pendidikan di SMA Negeri 1 Terbanggi Besar.
- 1.4.7 Faktor-faktor Kendala Program Akselerasi Pendidikan di SMA Negeri 1 Terbanggi Besar.
- 1.4.8 Kepuasan Pelanggan Program Akselerasi Pendidikan di SMA Negeri 1 Terbanggi Besar.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi banyak pihak, baik manfaat secara praktis. Adapun secara rinci manfaat tersebut sebagai berikut :

1.5.1 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara praktis kepada kepala institusi pendidikan, antara lain : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah, Kepala SMA Negeri 1 Terbanggi Besar, Kepala Sekolah SMA N/S se-Lampung Tengah yang ingin menyelenggarakan program akselerasi, peneliti dan siswa.

1.5.1.1 Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah

Bagi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah, dapat dijadikan masukan dalam pengambilan keputusan atau penentuan kebijakan penyelenggaraan pendidikan jenjang sekolah menengah atas di Kabupaten Lampung Tengah dan sekaligus sebagai nilai positif penyelenggaraan pendidikan di Lampung Tengah.

1.5.1.2 Kepala SMA Negeri 1 Terbanggi Besar

Kepala SMA Negeri 1 Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dapat memberikan informasi yang sangat berharga tentang *Contexts, Input, Proses*, maupun *Product* program akselerasi pendidikan yang telah diselenggarakan selama 10 tahun, sekaligus menjadi nilai tambah bagi sekolah, dan menjadi

sekolah percontohan dalam penyelenggaraan program akselerasi pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA).

1.5.1.3 Kepala SMA N/S di Lampung Tengah

Kepala SMA Negeri/swasta di Lampung Tengah yang ingin menyelenggarakan program akselerasi pendidikan, tidak perlu melakukan studi banding ke sekolah di luar kabupaten Lampung Tengah, karena Lampung Tengah sudah memiliki SMA yang menyelenggarakan program akselerasi sejak tahun pelajaran 2005/2006.

1.5.1.4 Peneliti

Manfaat bagi peneliti diantaranya, peneliti akan lebih banyak mengetahui bagaimana pengelolaan program akselerasi di SMA Negeri 1 Terbanggi Besar, meliputi perencanaan program akselerasi, pengorganisasian program akselerasi, pelaksanaan program akselerasi, pengawasan program akselerasi, pengevaluasian program akselerasi, faktor-faktor pendukung program akselerasi, dan faktor-faktor kendala program akselerasi, serta kepuasan pelanggan program akselerasi. Sehingga peneliti benar-benar akan mampu mengembangkan ilmu yang diperoleh melalui penelitian tersebut.

1.5.1.5 Siswa/Peserta Didik

Manfaat program akselerasi pendidikan bagi siswa SMA Negeri 1 Terbanggi Besar antara lain: siswa mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan kemampuan intelegensinya, siswa dapat menyelesaikan pendidikan pada

jenjang sekolah menengah atas dalam waktu 2 tahun, siswa diuntungkan 1 tahun lebih cepat dibandingkan dengan siswa yang menempuh program reguler.

Keuntungan secara financial, siswa dapat menghemat biaya pendidikan yang bersifat biaya pribadi berupa transport pergi-pulang dari rumah ke sekolah, pengadaan buku-buku pelajaran, pengadaan buku dan alat tulis siswa, dan biaya konsumsi harian siswa, serta biaya-biaya lainnya.

1.6 Definis Istilah

- 1.6.1 Implementasi adalah suatu pelaksanaan atau penerapan program secara terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh dengan mengacu pada acuan/ norma tertentu yang harus dijadikan pedoman untuk tercapainya tujuan organisasi.
- 1.6.2 Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua siswa yang memiliki kelainan fisik, emosional, dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.
- 1.6.3 Akselerasi Pendidikan adalah suatu bentuk pendidikan inklusif bagi siswa yang memiliki potensi kecerdasan. Program akselerasi di SMA Negeri 1 Terbanggi besar dilaksanakan dalam bentuk kelas khusus dan ditempuh dalam waktu 2 tahun.
- 1.6.4 Perencanaan Program adalah suatu proses awal dalam mendefinisikan tujuan organisasi dan strategi dalam mencapai tujuan organisasi serta mengembangkan aktivitas kerja organisasi.

- 1.6.5 Pengorganisasian Program adalah merupakan tahap melengkapi program yang telah disusun dengan susunan organisasi pelaksanaannya.
- 1.6.6 Pelaksanaan Program adalah suatu proses untuk merancang struktur formal, pengelompokan, dan mengatur, serta pembagian tugas/kerja dalam upaya efisiensi pencapaian tujuan.
- 1.6.7 Pengawasan Program adalah suatu proses yang menggambarkan kemampuan untuk memastikan bahwa sumber daya yang ada dimanfaatkan sesuai dengan perencanaan yang sudah ditetapkan.
- 1.6.8 Evaluasi Program adalah proses membandingkan antara rencana suatu program yang ada dengan realisasi program yang sudah berjalan.
- 1.6.9 Faktor Pendukung Program Akselerasi Pendidikan adalah hal-hal yang dapat ikut serta menyokong, membantu atau menunjang dalam pencapaian sasaran program akselerasi pendidikan.
- 1.6.10 Faktor Kendala Program Akselerasi Pendidikan adalah Hal-hal yang membatasi, menghalangi atau mencegah pencapaian sasaran program akselerasi pendidikan.
- 1.6.11 Kepuasan pelanggan adalah kondisi terpenuhinya harapan pelanggan terhadap pelaksanaan program akselerasi pendidikan. Pelanggan dalam penelitian ini terdiri atas pelanggan internal meliputi guru, staf tata usaha dan siswa, sedangkan pelanggan eksternal meliputi orang tua siswa, masyarakat dan pengguna lulusan program akselerasi pendidikan SMA Negeri 1 Terbanggi Besar.

1.6.12 Sekolah Menengah Atas (SMA) adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai kelanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP/MTs.

Sekolah Menengah Atas pada penelitian ini adalah SMA Negeri 1 Terbanggi Besar, beralamat di Jl Ahmad Yani No 1 Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung.

BAB II **KAJIAN PUSTAKA**

2.1 Pengertian Manajemen

Manajemen secara umum dapat diartikan sebagai upaya sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu secara bersama-sama dalam suatu organisasi. Secara etimologi, kata manajemen berasal dari bahasa Prancis kuno, yakni *menegement*, yang berarti seni melaksanakan dan mengatur.

Usman (2014:5) Manajemen berasal dari bahasa Latin, yaitu dari asal kata *manus* yang berarti tangan dan *agere* (melakukan). Kata-kata itu digunakan menjadi *managere*, yang artinya menangani. *Managere* diterjemahkan ke bahasa Inggris *to manage* (kata kerja), *management* (kata benda), dan *manager* untuk orang melakukannya. *Management* diterjemahkan ke Bahasa Indonesia menjadi manajemen (pengelolaan).

Fuad (2014:18) Istilah manajemen (*management*) berasal dari bahasa Itali, yakni "*maneggiare*" (*to handle* = menangani, menggunakan), yang berakar dari bahasa latin, "*manus*" (tangan) yang berarti penanganan/pengelolaan masalah organisasi dalam upaya mencapai tujuan. Namun demikian, belum ada pengertian manajemen yang dapat diterima secara universal semua bidang ilmu. Sehingga, para ahli mendefinisikan pengertian manajemen sesuai dengan paradigma,

persepektif, latar pengalaman, latar kultural, ruang, waktu dan bidang ilmu masing-masing ahli/ tokoh tersebut.

Fuad (2014:14) menyatakan bahwa manajemen pada hakekatnya merupakan pedoman (*guidelines*), yang memuat prinsip-prinsip bagaimana merencanakan, melaksanakan, dan juga mengontrol dalam pelaksanaan program agar sebuah program dapat mencapai tujuan yang ditetapkan. Berdasarkan pengertian tersebut, maka manajemen mengandung makna sebagai suatu pedoman yang memberikan arahan tentang bagaimana cara merencanakan, melaksanakan, dan juga mengadakan pengawasan. Sehingga, apa yang sudah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik.

Harsey dan Blanchad dalam Fuad (2014:16) mengartikan manajemen sebagai suatu proses yang harus dilakukan dalam mencapai tujuan. Lebih lanjut dinyatakan bahwa manajemen merupakan proses kerja sama dengan dan melalui orang-orang atau kelompok untuk mencapai tujuan organisasi. Senada dengan pernyataan Harsey dan Blanchad, Griffin dalam Fuad (2014:16) bahwa manajemen merupakan sekumpulan aktivitas (termasuk perencanaan dan pengambilan keputusan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan) yang dilakukan pada sumber daya organisasi (manusia, keuangan, fisik dan informasi) dengan maksud mencapai tujuan secara efisien dan efektif.

James A.F. Stonner dalam Makmur (2009:6) mendefinisikan *Management* adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya anggota organisasi dan proses penggunaan semua lain-lain sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Malayu S.P. Hasibuan dalam Makmur (2009:6) mendefinisikan manajemen adalah ilmu dan seni untuk mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu.

Paul Harsey dalam Makmur (2009:6) menyatakan bahwa Manajemen adalah suatu usaha yang dilakukan dengan dan individu atau kelompok untuk mencapai tujuan organisasi. Pengertian yang dikemukakan oleh Paul Harsey tersebut mengandung makna adanya keterlibatan individu maupun kelompok dalam upaya mencapai suatu tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Meskipun tidak dinyatakan secara jelas, dalam pengertian ini, pencapaian suatu tujuan organisasi memerlukan strategi, seni, maupun pengetahuan yang baik dan benar, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai sesuai yang diharapkan.

Berbeda dengan pengertian di atas, Robbins dan Coulter dalam Wibisono (2011:2) menyatakan Manajemen sebagai suatu proses untuk membuat aktivitas terselesaikan secara efisien dan efektif dengan dan melalui orang lain. Pengertian ini mengandung makna bahwa dengan manajemen diharapkan proses pencapaian tujuan organisasi dapat berjalan secara efisien dan efektif. Efisien berarti dalam mencapai tujuan organisasi tidak membuang-buang waktu, tenaga, maupun biaya. Sedangkan efektif berarti dalam mencapai tujuan suatu organisasi, cara yang digunakan tepat pada sasaran.

Henry Fayol dalam Makmur (2009:99) membagi 5 (lima) fungsi manajemen, yaitu merancang, mengorganisir, memerintah, mengkoordinasikan, dan mengendalikan. Sedangkan Terry dalam Makmur (2009:99) memodifikasi

fungsi manajemen menjadi 4 (empat), yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka manajemen merupakan suatu tindakan yang diawali dari proses perencanaan yang dilanjutkan dengan mengorganisasikan semua unsur-unsur yang akan terlibat serta mengarahkan setiap komponen yang terlibat untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan, serta pengawasan terhadap unit-unit pelaksana agar tercapainya sasaran yang sudah ditetapkan. Tanpa adanya pengawasan yang baik, perencanaan yang sudah ditetapkan dan dilaksanakan, akan berjalan kurang optimal.

Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti merujuk pada pengertian manajemen sebagai suatu proses khas yang terdiri atas tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian/ pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya, yang selanjutnya disebut dengan istilah *Planing* (perencanaan), *Organizing* (pengorganisasian), *Actuating* (Pelaksanaan) dan *Controlling* (pengawasan).

2.2 Pengertian Pendidikan

Secara etimologi, pendidikan merupakan arti kata dari *education*, yang berasal dari kata latin, “*educare*”, yang berarti pendidikan. Seperti halnya konsep manajemen, istilah pendidikanpun merupakan istilah yang memiliki banyak makna, tapi memiliki makna dasar yang sama, sehingga maknanya sangat tergantung pada perspektif yang digunakannya.

Pendidikan “*Education*“ berasal dari kata latin “Ex (lepas dari)“ *durerc*” yang berarti memimpin. Secara harfiah, berarti mengumpulkan keterangan dan menarik bakat keluar. Pada hakekatnya berhubungan dengan konsep memberikan informasi dan pengetahuan serta mengembangkan bakat yang terpendam pada diri anak didik.

Langevell dalam Usman (2014:13) bahwa pendidikan adalah memanusiakan manusia. Sedangkan menurut Ki Hadjar Dewantara dalam Usman (2014:13) menyatakan bahwa pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran (*intellect*) dan tubuh anak.

Kompri (2015:15) Pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan orang dewasa (pendidik) dalam menyelenggarakan kegiatan pengembangan diri peserta didik agar menjadi manusia yang paripurna sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Lebih lanjut dinyatakan bahwa pendidikan adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan ruhani anak didik menuju terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran tertentu.

Jahja (2004:2) menyatakan bahwa pada hakekatnya pendidikan adalah pengaruh, bimbingan, arahan, yang dilakukan secara sadar dari orang dewasa kepada anak yang belum dewasa agar menjadi dewasa, mandiri, dan memiliki kepribadian yang utuh dan matang.

Thorndike Barnhart dalam Fuad (2014:27) mengartikan pendidikan sebagai “*development in knowledge, skill, ability, or character by teaching, training, studi, or experience*” (pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan

kemampuan atau karakter melalui pengajaran, latihan, studi atau pengalaman). Lebih lanjut pendidikan diartikan sebagai proses penanaman modal manusia (*human cavital investment*). Pengetahuan keterampilan hasil pendidikan dinilai sebagai modal manusia yang kemudian dapat dijadikan alat produksi baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan sosial.

John Dewey mengartikan pendidikan adalah suatu proses pengalaman. Karena kehidupan adalah pertumbuhan. Pendidikan berarti membantu pertumbuhan batin tanpa dibatasi oleh usia. Lebih lanjut John Dewey menyatakan bahwa proses pertumbuhan adalah proses penyesuaian pada tiap-tiap fase serta menambahkan kecakapan di dalam perkembangan seseorang.

John Park mendefinisikan pendidikan adalah seni atau proses dalam menyalurkan atau menerima pengetahuan dan kebiasaan-kebiasaan melalui pengajaran dan studi. Sedangkan Herman H. Hom mendefinisikan pendidikan adalah proses abadi dari penyesuaian lebih tinggi bagi makhluk yang telah berkembang secara fisik dan mental yang bebas, dan sadar kepada Tuhan seperti termanifestasikan dalam alam sekitar, intelektual, emosional dan kemauan dari manusia.

Pengertian pendidikan dapat juga dilihat dari berbagai sudut pandang, antara lain: sosial-politik, sosial-budaya, maupun sudut pandang pendidikan itu sendiri. Jika dilihat dari sudut pandang sosial-politik, maka pendidikan dapat diartikan sebagai suatu proses sosialisasi nilai dan norma kehidupan dalam berpolitik. Tom Brennan dalam Fuad (2014:27) menyatakan bahwa pendidikan sebagai proses sosialisasi nilai dan norma kehidupan berpolitik, bersosial, dan proses pembentukan budaya berpolitik.

Pada sudut pandang sosial-budaya, pendidikan dilihat sebagai suatu tata nilai dan norma budaya masyarakat, pendidikan dipahami sebagai “proses pembudayaan”, atau “proses pengadaban”. Pendidikan merupakan upaya pembentukan nilai dan pola perilaku yang adaptif dengan kebutuhan yang ada di masyarakat.

Menurut sudut pandang pendidikan itu sendiri, pendidikan diartikan sebagai “semua perbuatan dan usaha pengalihan pengetahuan, pengalaman, kecakapan, dan keterampilan dalam upaya menyiapkan individu untuk dapat memenuhi fungsi hidupnya”.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa pendidikan adalah upaya sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan sepiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

2.2.1 Aliran Pendidikan

Jahja (2004:7) menyatakan ada 3 (tiga) aliran pokok dalam pendidikan yang perlu diketahui, yakni *nativisme*, *empirisme* dan *konvergensi*.

a. Aliran Nativisme

Jahja (2004:7) aliran Nativisme adalah aliran pendidikan yang berpandangan bahwa anak yang lahir telah memiliki bakat atau pembawaan tertentu, sehingga pengaruh dari luar, termasuk pendidikan tidak berperan apa-apa. Aliran ini dikenal sebagai aliran pesimis, karena mereka yakin bahwa

lingkungan tidak akan berpengaruh terhadap anak didik, sehingga anak didik tidak perlu mendapat pengaruh dari luar. Anak lebih baik dibiarkan karena nantinya akan berkembang dengan sendirinya.

Purwanto (2011:59) aliran nativisme berpendapat perkembangan manusia itu ditentukan oleh faktor-faktor yang dibawa manusia sejak lahir, pembawaan yang telah terdapat pada waktu dilahirkan itulah yang menentukan hasil perkembangannya. Pelopor aliran ini adalah Schopenhauer.

b. Aliran Empirisme (Teori Tabularasa)

Aliran Empirisme adalah aliran yang menganut paham bahwa perkembangan anak ditentukan oleh pengaruh dari luar atau lingkungan tempat mereka dibesarkan. Aliran Empirisme berbeda pandangan dengan aliran nativisme dan naturalisme, aliran ini menganggap lingkungan sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak didik. Anak didik akan mengalami banyak pengalaman, sehingga pengalaman ini nantinya akan membentuk kepribadian anak.

Purwanto (2011:59) aliran empirisme berpendapat bahwa perkembangan anak menjadi manusia dewasa itu sama sekali ditentukan oleh lingkungannya atau oleh pendidikan dan pengalaman yang diterimanya sejak kecil. Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa manusia-manusia dapat dididik menjadi apa saja (ke arah yang baik maupun ke arah yang buruk) menurut kehendak lingkungan atau pendidikan.

Jahja (2004:7) menyatakan bahwa aliran empirisme mengibaratkan anak yang baru lahir seperti meja lilin yang masih putih bersih, sehingga pendidik dapat, mencoretkan, menulis, atau menggambar apa saja di atasnya. Aliran ini

merasa optimis bahwa lingkungan yang mempengaruhi perkembangan kepribadian anak/ siswa. Pelopor aliran ini adalah John Locke.

c. Aliran Konvergensi

Purwanto (2011:60) berpendapat bahwa pada hukum konvergensi terdapat dua aliran, yakni aliran yang lebih menekankan pada pengaruh pembawaan dari pada pengaruh lingkungan, dan sebaliknya yang menekankan pengaruh lingkungan atau pendidikan .

Secara umum bahwa aliran konvergensi berpendapat terbentuknya kepribadian anak ditentukan oleh faktor bakat dan lingkungan. Aliran konvergensi merupakan perpaduan/gabungan antara aliran nativisme dengan aliran empirisme, oleh karena itu pendidik perlu mengetahui faktor bawaan anak dan memberikan pengaruh yang sesuai dengan bakat yang dimiliki anak tersebut.

Aliran konvergensi memaknai bahwa sebaik apapun faktor bakat anak tidak akan berkembang baik tanpa adanya pengaruh dari lingkungan. Sebaliknya, sebaik apapun pengaruh lingkungan tanpa didukung oleh faktor bakat/bawaan yang baik hasilnya tidak akan optimal. Jahja (2004:8) Pelopor aliran ini adalah William Stern.

2.2.2 Faktor-Faktor Pendidikan

Jahja (2004:14-15) mengungkapkan bahwa faktor pendidikan terdiri atas siswa, pendidik, lingkungan pendidikan, tujuan pendidikan, dan alat pendidikan.

a. Siswa/Peserta Didik

Aziz (2012:73) mendefinisikan siswa adalah orang yang sedang belajar atau menuntut ilmu dalam bimbingan seseorang atau beberapa orang guru. Lebih

lanjut beliau menyatakan bahwa siapa saja yang datang kepada seorang guru untuk menuntut ilmu, maka dia layak disebut siswa.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 1 ayat 4 menyatakan siswa adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Siswa merupakan individu yang sedang tumbuh dan berkembang. Pada tiap individu dalam proses tumbuh dan perkembangannya selalu memerlukan bantuan orang lain, yaitu pendidik. Pendidik diharapkan dapat membimbing pertumbuhan dan perkembangan kepribadian siswa tersebut sesuai dengan tahap perkembangannya.

Pengaruh yang diberikan oleh pendidik selalu ditujukan untuk membentuk pribadi siswa. Pendidikan selalu menanamkan nilai-nilai moral, budi pekerti, etika, estetika, dan karakter. Sehingga setelah dewasa, siswa akan menjadi insan yang berguna bagi dirinya sendiri, nusa, bangsa, negara dan agama.

b. Pendidik/Guru

Pendidik sering pula disebut dengan istilah guru yang menggambarkan sebuah sosok yang patut digugu dan ditiru. Aziz (2012:19) bahwa guru berasal dari bahasa sanskerta, kata “guru” adalah gabungan dari kata *gu* dan *ru*. *Gu* berarti kegelapa, kejumudan, atau kekelaman, sedangkan *ru* artinya melepaskan, menyingkirkan atau membebaskan. Jadi, guru adalah manusia yang berjuang terus menerus dan secara gradual, untuk melepaskan manusia dari kegelapan.

Jahja (2004:14) mendefinisikan pendidik adalah orang yang mampu melaksanakan tindakan mendidik dalam suatu situasi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Lebih lanjut bahwa pendidik adalah orang dewasa yang

bertanggung jawab, sehat jasmani rohani, mampu berdiri sendiri, dan mampu menanggung resiko dari segala perbuatannya.

Selain memiliki sikap tersebut di atas, seorang pendidik harus memiliki sikap jujur, sabar, susila, ahli, terampil, terbuka, adil, luas cakrawala pandangannya serta penuh kasih sayang.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 1 ayat 6 menyatakan bahwa pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

c. Lingkungan Pendidikan

Jahya (2004:14) mendefinisikan lingkungan pendidikan adalah segala sesuatu yang berada di luar diri siswa dan di dalam semesta ini. Lebih lanjut dinyatakan bahwa lingkungan dapat berupa lingkungan fisik dan lingkungan sosial, lingkungan juga dapat berupa lingkungan yang dapat dilihat dan diamati, dapat juga berupa lingkungan abstrak.

Lingkungan pendidikan meliputi 3 (tiga) macam lingkungan, yakni lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Pendidikan dalam 3 macam lingkungan tersebut sering diistilahkan dengan pendidikan formal, pendidikan nonformal dan pendidikan informal.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional, pasal 1 ayat 11 menyatakan bahwa pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Dauly (2007:13) menyatakan

pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat.

Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat. Sedangkan pendidikan tinggi berbentuk Akademi, Politeknik, Sekolah Tinggi, Institut, atau Universitas.

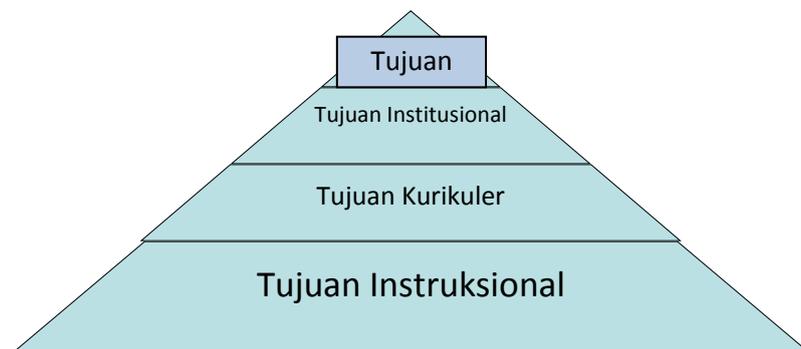
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 1 ayat 12 menyatakan bahwa pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Daulay (2007:14) menyebutkan satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan sejenis.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 13 menyatakan bahwa pendidikan informal adalah pendidikan yang dilaksanakan dalam lingkungan keluarga atau lingkungan. Daulay (2007:14) mendefinisikan pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.

d. Tujuan Pendidikan

Secara hirarki dan luasnya, tujuan pendidikan terbagi menjadi empat, yakni tujuan pendidikan nasional, tujuan institusional, tujuan kurikuler dan tujuan instruksional. Jahja (2004:15) menyebutkan bahwa tujuan merupakan tolak ukur bagi seluruh kegiatan pendidikan, penetapan materi, metode pembelajaran, dan evaluasi yang akan dilakukan.

Tujuan pendidikan nasional adalah tujuan pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah dan berlaku secara nasional sebagaimana tertuang dalam undang-undang sistem pendidikan nasional. Tujuan institusional adalah tujuan yang ditetapkan oleh masing-masing institusi/ lembaga pendidikan itu sendiri. Tujuan institusional hendaknya merupakan penjabaran dari tujuan nasional, dengan kata lain bahwa tujuan institusional diturunkan dari tujuan nasional pendidikan. Sedangkan tujuan kurikuler adalah tujuan yang akan dicapai oleh masing-masing mata pelajaran dalam suatu lembaga pendidikan. Sebagaimana tujuan institusional, tujuan kurikuler harus mengacu kepada tujuan institusional dan tujuan nasional pendidikan. Secara rinci tujuan pendidikan dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 2.1 Tujuan Pendidikan

e. Alat/ Sarana Pendidikan

Jahja (2004:15) Alat pendidikan adalah segala bentuk kebendaan sebagai sarana pendidikan/ sarana belajar mengajar. Lebih lanjut Muri Yusuf dalam Jahja (2004:15) menyatakan bahwa alat pendidikan sebagai alat pengajaran dapat diklasifikasikan berdasarkan pemakaiannya, sifat keperagaanya, cara penyampaian pesan maupun berdasarkan fungsinya.

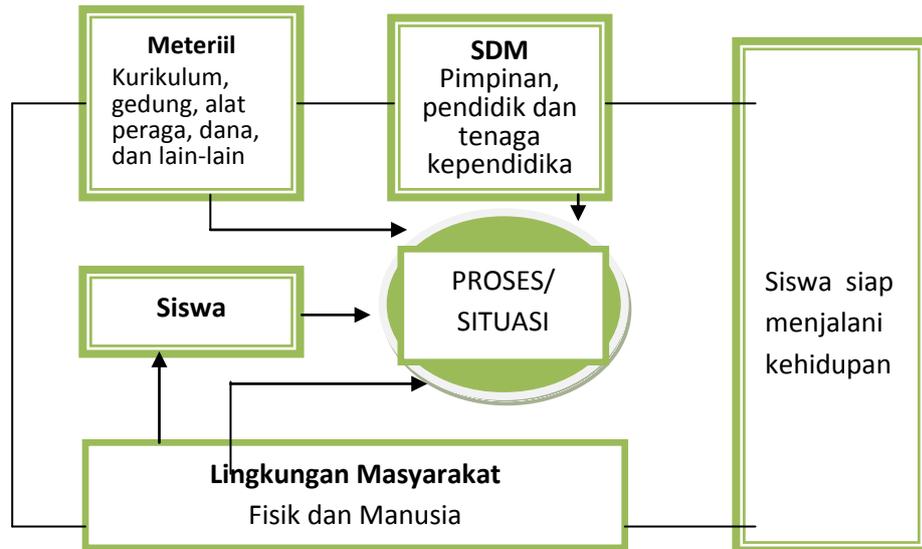
2.3 Manajemen Pendidikan

Manajemen adalah seni dan ilmu mengelola sumber daya pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Usman (2014:13) mendefinisikan manajemen pendidikan adalah seni dan ilmu mengelola sumber daya pendidikan untuk mewujudkan proses dan hasil belajar peserta didik secara aktif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan dalam mengembangkan potensi dirinya.

Campbell, dkk dalam Hermino (2014:26) mendefinisikan manajemen pendidikan adalah manajemen kelembagaan yang bertujuan untuk menunjang perkembangan dan penyelenggaraan pengajaran dan pembelajaran. Manajemen pendidikan merupakan kelembagaan yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran, maka penekanan manajemen pendidikan dalam proses belajar mengajar.

Hermino (2014:29) mendefinisikan manajemen pendidikan adalah proses penggunaan sumber daya (seperti manusia, uang, sarana-prasarana, bahan-bahan, dan informasi) secara efisien untuk mencapai tujuan pendidikan, melalui fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengembangan staf, pengarahan, dan pengendalian, serta melingkupi substansi-substansi manajemen kurikulum, manajemen kesiswaan, manajemen sarana-prasarana, manajemen keuangan, manajemen hubungan masyarakat, manajemen personalia, dan manajemen layanan khusus.

Penyelenggaraan pendidikan melibatkan banyak faktor, diantaranya: pendidik/guru, siswa, sarana prasarana, lingkungan pendidikan, tujuan dan proses, keuangan, kurikulum, dan sebagainya. Fuad (2014:28) menyatakan bahwa pendidikan terdiri atas unsur-unsur: (1) tujuan pendidikan, (2) siswa, (3) pendidik, (4) alat pendidikan, (5) lingkungan pendidikan, dan (6) proses pendidikan. Untuk lebih jelasnya unsur-unsur pendidikan tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar : 2.2 Komponen Pendidikan
(Sumber: Manajemen Pendidikan Berbasis Masyarakat, Nurhattati Fuad;2014 hal. 28)

Jika ditinjau secara sistemik, maka manajemen pendidikan dapat digambarkan sebagai proses pendidikan yang meliputi *input*, *proses* dan *output*. *Input* pendidikan adalah siswa, siswa merupakan makhluk yang unik, dikarenakan setiap individu siswa memiliki perbedaan satu dengan yang lainnya, seperti: fisik, emosional, kondisi sosial, intelektual, motivasi, kepribadian, latar belakang, keluarga dan lainnya.

Proses pendidikan dipengaruhi oleh pendidik, tenaga kependidikan, kurikulum, sarana prasarana, keuangan, dan manajemen. Jika komponen-komponen tersebut dalam keadaan baik, maka proses pendidikan akan berjalan dengan baik. Selain faktor-faktor tersebut di atas, lingkungan turut mempengaruhi proses pendidikan, baik lingkungan tempat pendidikan itu berlangsung maupun lingkungan lainnya seperti lingkungan sosial, lingkungan ekonomi, lingkungan budaya, lingkungan politik, serta bentuk kepedulian dan dukungan.

Output pendidikan berupa lulusan yang diharapkan memiliki tiga aspek yang baik, yakni sikap, ketrampilan, dan juga pengetahuan. Seorang siswa setelah

mengalami suatu proses pendidikan diharapkan keluar dengan memiliki sikap yang baik, karena pendidikan pada hakekatnya mengubah sikap yang tidak baik menjadi baik, mengubah perilaku yang kurang baik menjadi baik. Begitu pula dengan ketrampilan yang dimiliki oleh seorang siswa, diharapkan setelah mengikuti proses pendidikan, maka keluar dengan membawa perubahan skill/ ketrampilannya, karena proses pendidikan juga mengubah ketrampilan siswa. Perubahan yang terjadi pada setiap siswa yang mengikuti proses pendidikan adalah perubahan pengetahuan, karena pada hakekatnya bahwa proses pendidikan mengubah siswa dari tidak tahu menjadi tahu.

Mengacu kepada pengertian manajemen sebagai suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya, maka manajemen pendidikan dapat diartikan sebagai suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran dalam bidang pendidikan.

Bush dalam Usman (2014:14) menyatakan bahwa manajemen pendidikan harus terpusat pada tujuan pendidikan. Tujuan tersebut menjadi arti penting terhadap arah manajemen. Manajemen diarahkan pada pencapaian tujuan pendidikan tertentu dan waktu tertentu.

Implementasi manajemen pendidikan terkait dengan segenap aktivitas kepemimpinan (pengarahan, pembimbingan dan pemotivasian), pemberian tugas dan penjelasan kebijakan pendidikan yang diterapkan. Posisi manajemen dalam pendidikan dapat dilihat pada gambar berikut ini :



Gambar : 2.3. Posisi Manajemen dalam Pendidikan
(Sumber : Manajemen Pendidikan Berbasis Masyarakat, Nurhattati Fuad, hal 31)

2.4 Perencanaan Program Akselerasi

Perencanaan merupakan kegiatan untuk menyusun tercapainya suatu tujuan yang hendak dicapai. Menurut Handoko dalam Usman (2014:77) bahwa perencanaan meliputi (1) pemilihan atau penetapan tujuan-tujuan organisasi; (2) penentuan strategi, kebijakan, proyek, program, prosedur, metode, sistem, anggaran, dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan.

Usman (2014:77) mendefinisikan perencanaan adalah kegiatan yang akan dilakukan di masa yang akan datang untuk mencapai tujuan. Dari definisi ini mengandung unsur-unsur (1) sejumlah kegiatan yang ditetapkan sebelumnya; (2) adanya proses; (3) hasil yang ingin dicapai; dan (4) menyangkut masa depan dalam waktu tertentu.

Hermiono (2014:29) mendefinisikan perencanaan adalah proses penentuan tujuan organisasi dan pemilihan tindakan masa depan untuk mencapai tujuan. Berdasarkan definisi tersebut, maka perencanaan merupakan langkah penting dalam suatu organisasi, sehingga keberhasilan suatu organisasi sangat tergantung kepada perencanaan yang baik, tanpa perencanaan yang baik, maka fungsi-fungsi

dalam suatu organisasi tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Perencanaan juga merupakan proses awal dalam mendefinisikan tujuan organisasi dan strategi dalam mencapai tujuan organisasi serta mengembangkan aktivitas kerja organisasi tersebut.

Makmur (2009:106) mendefinisikan perencanaan sebagai suatu usaha dalam rangka menetapkan atau menyusun langkah-langkah sebagai jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh berbagai kalangan, antara lain: apa yang harus dikerjakan ? siapa yang bertanggungjawab atas pelaksanaan suatu kegiatan ? dan mengapa suatu pekerjaan harus dilakukan ?

Agar perencanaan berjalan dengan baik, maka diperlukan tindakan awal berupa peramalan (*forecasting*). Peramalan yang baik didasari atas pola informasi atau keterangan yang terjadi pada masa lalu, kemudian berulang pada masa kini maupun pada masa yang akan datang. Makmur (2009:105) menyatakan bahwa metode peramalan senantiasa berusaha menangkap hubungan sebab-akibat dari berbagai kejadian-kejadian pada masa yang lalu, disamping itu membutuhkan data dan informasi atau keterangan dari berbagai pihak.

Effendi, dkk dalam Samani (1999:4) menyatakan bahwa ada 7 (tujuh) tahapan dalam menyusun rencana yang baik, yaitu : a) Mengkaji kebijakan yang relevan; b) menganalisis kondisi sekolah; c) merumuskan tujuan; d) mengumpulkan data dan informasi terkait; e) menganalisis data dan informasi; f) merumuskan alternatif dan memilih alternatif program; g) menetapkan langkah-langkah kegiatan pelaksanaan.

Perencanaan dalam organisasi dapat berupa rencana formal dan rencana informal. Rencana formal adalah perencanaan suatu organisasi yang dinyatakan

secara tertulis untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu oleh seluruh anggota organisasi, sehingga setiap anggota organisasi harus mengetahui dan menjalankan rencana tersebut agar mempunyai kesamaan persepsi tentang apa yang harus dilakukan dalam organisasi tersebut. Sedangkan rencana informal adalah rencana yang tidak tertulis dan bukan merupakan tujuan bersama anggota organisasi, sehingga rencana informal ini tidak semua anggota organisasi mengetahuinya dan tidak mempunyai kewajiban untuk melaksanakannya secara bersama-sama.

Sekolah sebagai suatu organisasi perlu memiliki perencanaan yang baik dalam mengelola sumber daya sekolah dan program-program yang dimilikinya, perencanaan yang baik akan mempermudah kepala sekolah, guru, staf tata usaha dan komponen sekolah lainnya mengetahui apa yang harus mereka capai selama kurun waktu tertentu, bagaimana cara mereka mencapai tujuan sekolah, dengan siapa mereka harus bekerja sama, maka sangatlah penting menentukan perencanaan yang baik.

Perencanaan mempunyai tujuan untuk lebih mengefektifkan dan efisiensi suatu program, tanpa adanya perencanaan yang baik dapat berakibat arah kebijakan yang tidak jelas, kerja yang tidak terarah serta pembiayaan yang tidak tepat sasaran. Oleh karena itu, perencanaan akan dapat mengarahkan efisiensi dan efektifitas kerja. Makmur (2009:106) menyatakan bahwa rencana yang baik apabila harus memiliki sifat-sifat rasional, keluwesan atau fleksibel, efektifitas dan efisien, dibuat terus menerus dan berkesinambungan sesuai dengan perubahan dan perkembangan masa yang akan datang. Selain itu, perencanaan dapat dijadikan sebagai tolak ukur, acuan dan proses pengontrol jalanya program atau

mengevaluasi. Pada hakekatnya evaluasi merupakan proses membandingkan antara rencana yang ada dengan realisasi yang sedang berjalan.

Secara umum perencanaan memiliki 2 (dua) unsur penting, yakni unsur sasaran/tujuan (*goals*) dan unsur perencanaan (*plan*) itu sendiri. Unsur sasaran/tujuan (*goals*) merupakan hal yang ingin dicapai baik oleh individu, kelompok maupun seluruh anggota organisasi secara bersama-sama. Dari sasaran inilah maka seorang pimpinan organisasi/ kepala sekolah membuat keputusan dan kriteria tercapainya suatu pekerjaan. Terkait dengan pengertian tujuan organisasi tersebut di atas, maka yang menjadi tujuan (*goals*) adalah sesuatu yang ingin dicapai baik oleh individu, kelompok maupun seluruh anggota yang terlibat dalam pengelolaan program akselerasi pendidikan.

Rencana (*plan*) adalah dokumen tertulis yang dijadikan sebagai acuan dalam mencapai tujuan organisasi, yang berisi sumber daya, jadwal kegiatan maupun tindakan-tindakan yang harus ditempuh oleh organisasi dalam mencapai sasaran tersebut. Makmur (2009:106) menyatakan bahwa rencana yang merupakan suatu bentuk dokumen resmi dalam sebuah organisasi yang dilegalisasi oleh manajemen puncak, dan dapat digunakan sebagai pedoman (acuan) dalam rangka pelaksanaan suatu kegiatan serta menjadi alat ukur untuk menentukan keberhasilan atau kegagalan aktivitas manajemen yang dilaksanakan oleh anggota manajemen yang bersangkutan. Terkait dengan rencana sebagai dokumen tertulis, apakah ada dokumen tertulis yang berisi tujuan program akselerasi pendidikan, sumber daya, jadwal kegiatan dan tindakan-tindakan yang harus ditempuh oleh sekolah/penyelenggara program akselerasi pendidikan ?

Jika dilihat dari pendekatan yang digunakan dalam mencapai sasaran organisasi/sekolah, maka perencanaan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) pendekatan, yakni pendekatan Tradisional dan pendekatan *Management By Obyektive (MBO)*. Pendekatan Tradisional adalah pendekatan yang dilakukan oleh seorang pimpinan organisasi dengan cara menyampaikan tujuan secara umum kepada bawahan/stafnya, kemudian staf akan menterjemahkan/menjabarkan secara rinci tentang sasaran umum tersebut. Sedangkan pendekatan *Management By Obyektive (MBO)* adalah pendekatan yang dilakukan untuk mencapai sasaran dengan cara melibatkan bawahan, staf, dan pimpinan organisasi. Sehingga yang menjadi sasaran organisasi merupakan rumusan bersama dari anggota organisasi tersebut. Pendekatan apa yang dilakukan oleh kepala sekolah sebagai pimpinan tertinggi di sekolah ? apakah menggunakan pendekatan tradisional ataukah pendekatan *Management By Obyektive (MBO)*. Jika kepala sekolah menggunakan pendekatan tradisional, maka kepala sekolah hanya menyampaikan tujuan secara umum dan wakil kepala sekolah beserta koordinator pelaksana program akselerasi menterjemahkan tujuan program akselerasi pendidikan tersebut secara rinci. Sebaliknya apabila kepala sekolah menggunakan pendekatan *Management By Obyektive (MBO)*, maka kepala sekolah melibatkan wakil kepala sekolah, koordinator pelaksanaan program akselerasi dan dewan guru dalam menentukan tujuan yang hendak dicapai program akselerasi pendidikan.

Berdasarkan waktu, rencana dibagi menjadi 3 (tiga), yakni 1) rencana jangka pendek, 2) rencana jangka menengah, dan 3) rencana jangka panjang. Rencana jangka pendek pada satuan pendidikan/sekolah adalah rencana yang akan dicapai selama satu tahun berjalan, dan rencana tersebut tertuang dalam dokumen

yang disebut Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) atau Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).

Rencana jangka menengah pada satuan pendidikan dicapai dalam kurun waktu 4 tahunan. Sedangkan rencana jangka panjang, dicapai dalam kurun waktu 8 tahun. Namun demikian, masing-masing organisasi dapat menentukan rencana organisasi tersebut sesuai dengan penentuan jangka waktu yang akan dicapai, misalnya rencana jangka pendek ditempuh 1 tahun, jangka menengah 3 tahun dan rencana jangka panjangnya 6 tahun.

Fuad (2014:29) menyatakan bahwa dalam aspek perencanaan pendidikan, maka manajemen pendidikan meliputi sub aspek penetapan tujuan dan pendidikan, pengambilan keputusan penanganan masalah pendidikan, perumusan strategi pencapaian tujuan pendidikan, penetapan sumber daya pendidikan yang diperlukan, dan menetapkan standar keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan.

Ditinjau berdasarkan kekhususannya, maka rencana dibagi menjadi 2 (dua) yakni 1) rencana direksional dan 2) rencana spesifik. Rencana direksional adalah rencana yang disampaikan secara umum, tidak memberikan panduan secara rinci tentang sasaran yang akan dicapai. Sedangkan rencana spesifik adalah rencana yang memberikan acuan dan panduan secara rinci dan jelas tentang langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai sasaran organisasi.

Jika ditinjau berdasarkan frekuensi penggunaan rencana, maka rencana dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yakni 1) rencana sekali penggunaan (*single use plans*) dan 2) rencana yang terus dipakai (*standing plans*). *Single use plans* adalah rencana yang hanya dipakai untuk 1 kali kegiatan, misalnya rencana pembangunan gedung sekolah, rencana tersebut hanya berlaku sampai gedung

sekolah selesai dibangun. *Standing plans* adalah rencana yang berlaku selama organisasi tersebut masih berdiri, meliputi prosedur, peraturan, kebijakan dan lainnya yang berlaku pada organisasi tersebut.

Ditinjau berdasarkan cakupannya, maka rencana dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yakni rencana strategis (RS) dan rencana operasional (RO). Rencana strategis adalah rencana yang bersifat umum berlaku untuk semua anggota organisasi, sedangkan rencana operasional adalah rencana yang mengatur tentang pelaksanaan kegiatan anggota organisasi sehari-hari. Fuad (2014:193-196) menyatakan bahwa Rencana Strategis (RS) merupakan perencanaan jangka panjang (*long-range-planning*). Rencana operasional (RO) adalah proses mengaitkan tujuan dan sasaran strategis dengan tujuan dan sasaran taktis.

Tabel: 2.1 Perbedaan Rencana Strategis dan Rencana Operasional

ASPEK	RENCANA STRATEGIS	RENCANA OPERASIONAL
Periode Waktu	Menggambarkan rencana pada rentang/ jangka waktu lama (misalnya: rencana untuk beberapa tahun atau dasawarsa).	Menggambarkan rencana dalam rentang waktu pendek(misalnya: rencana untuk satu tahun atau kurang).
Tingkat Kerincian	Substansi rencana ditetapkan/disusun dalam bentuk “garis besar” atau umum.	Substansi rencana disusun secara rinci, fokus, dan operasional.
Ruang Lingkup	Rencana mencakup lingkup atau wilayah aktivitas organisasi secara luas (<i>ekstensif</i>) pada garis besar.	Rencana mencakup lingkup aktivitas organisasi secara terfokus, terbatas, dan rinci.
Tingkat Manajerial	Rencana menyangkut aktivitas tugas dan tanggung jawab manajemen tingkat atas (<i>top-level management</i>). Manajer tingkat toinggi bertanggungjawab pada rencana ini.	Rencana menyangkut aktivitas tugas dan tanggung jawab manajemen tingkat menengah dan bawah (<i>midlle & low level management</i>). Rencana dan implementasinya menjadi tugas dan tanggung jawab manajer tengah dan bawah

(Sumber : Manajemen Pendidikan Berbasis Masyarakat, Nurhattati Fuad, hal 196)

Greenberg dan Baron dalam Wibisono (2011:40-45) menyatakan bahwa proses perencanaan strategis pada umumnya melalui sepuluh langkah berikut: a) mendefinisikan tujuan; b) mendefinisikan lingkup produk atau jasa; c) menilai sumber daya internal; d) menilai lingkungan eksternal; e) menganalisis pengaturan internal; f) menilai keuntungan kompetitif; g) mengembangkan strategi kompetitif; h) mengkomunikasikan strategi dengan stakeholder; i) mengimplementasikan strategi; dan j) mengevaluasi manfaat.

a. Mendefinisikan Tujuan

Wibisono (2011:41) menyatakan bahwa tujuan menyeluruh organisasi harus diterjemahkan kedalam tujuan lebih spesifik yang harus dicapai oleh berbagai unit organisasi di bawahnya. Keseluruhan tujuan yang dicapai oleh masing-masing unit organisasi mencerminkan pencapaian tujuan organisasi. Sekolah sebagai organisasi perlu merumuskan tujuan yang hendak dicapai. Tujuan tersebut diturunkan berdasarkan Visi, Misi dan Tujuan sekolah.

b. Mendefinisikan Lingkup Produk atau Jasa

Wibisono (2011:41) menyatakan bahwa agar rencana strategis menjadi efektif, manajemen organisasi harus jelas mendefinisikan lingkup organisasi mereka, yaitu bisnis yang telah beroperasi dan bisnis baru dimana dimaksudkan untuk berpartisipasi. Dari pengertian tersebut, maka perlu perencanaan dengan cermat, karena apabila lingkup didefinisinya secara sempit, maka organisasi akan melewatkan peluang, sebaliknya apabila terlalu luas akan melemahkan efektifitasnya.

Mendefinisikan lingkup produk atau jasa, menyangkut jawaban pertanyaan tentang apa bisnis organisasi sekarang dan bisnis apa yang akan dimasuki. Memperluas lingkup bisnis merupakan kunci keberhasilan strategis organisasi. Merujuk kepada pengertian di atas, maka sekolah SMA Negeri 1 Terbanggi Besar sebagai organisasi perlu mendefinisikan lingkup perencanaan yang hendak dicapai sebagai jawaban atas program yang akan dilaksanakan, dalam hal ini adalah penyelenggaraan program akselerasi pendidikan.

c. Menilai Sumber Daya Internal

Wibisono (2011:42) menyatakan bahwa Sumber daya internal yang dimiliki organisasi dapat berupa dana, fisik, teknologi dan manusia. Sumber daya organisasi berupa dana diperlukan untuk pengadaan barang atau jasa yang diperlukan, sedangkan sumber daya fisik diperlukan dalam proses produksi. Sumber daya teknologi diperlukan untuk menunjukkan keunggulan yang dimiliki organisasi tersebut. Sumber daya manusia merupakan tenaga kerja yang mempunyai ketrampilan dan pengetahuan.

SMA Negeri 1 Terbanggi Besar merupakan organisasi yang mempunyai sumber daya internal berupa dana, fisik, maupun sumber daya manusia. Sumber dana penyelenggaraan program akselerasi pendidikan di SMA Negeri 1 Terbanggi Besar bisa bersumber dari pemerintah maupun dari orang tua/wali peserta didik, dan sumber lainnya yang tidak mengikat. Dana yang dimiliki dapat digunakan sebagai operasional penyelenggaraan program akselerasi pendidikan di sekolah.

Sumber daya fisik, perlu dimiliki oleh SMA Negeri 1 Terbanggi Besar baik yang berupa gedung/bangunan beserta sarana pendukung lainnya. Gedung atau sarana fisik yang dimiliki SMA Negeri 1 Terbanggi Besar cukup memadai untuk

sarana fisik yang dimiliki SMA Negeri 1 Terbanggi Besar cukup memadai untuk penyelenggaraan program akselerasi pendidikan di sekolah tersebut. Bangunan fisik di SMA Negeri 1 Terbanggi Besar berupa ruang belajar, ruang perpustakaan, ruang laboratorium dan ruang multi media.

Sumber daya teknologi yang dimiliki oleh SMA Negeri 1 Terbanggi Besar sudah memadai sebagai keunggulan dalam pelaksanaan program akselerasi pendidikan. Sumber daya teknologi tersebut berupa sarana pendukung pembelajaran yang baik, seperti ruang multi media yang representatif.

Sumber daya manusia SMA Negeri 1 Terbanggi Besar dalam penyelenggaraan program akselerasi pendidikan harus memadai, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Secara kuantitatif SMA Negeri 1 Terbanggi Besar memiliki guru sebanyak 73 orang dan staf tata usaha sebanyak 20 orang, dan jumlah siswa program akselerasi 19 orang. Secara kualitas sumber daya manusia yang dimiliki SMA Negeri 1 Terbanggi Besar baik, hal ini dilihat dari kualifikasi dan pengalaman mengajar guru di sekolah, serta jumlah siswa yang mempunyai kecerdasan istimewa memadai.

d. Menilai Lingkungan Eksternal

Dalam organisasi, lingkungan eksternal merupakan faktor penting, karena lingkungan eksternal dapat mempengaruhi kapasitasnya untuk bekerja dan tumbuh sebagaimana yang diinginkan dalam organisasi. Lingkungan organisasi yang baik dan sehat akan membantu berkembangnya suatu organisasi tersebut, dan sebaliknya lingkungan organisasi yang kurang baik akan menjadi faktor penghambat keberhasilan suatu organisasi tersebut.

Wibisono (2011:43) menyatakan bahwa lingkungan akan membantu atau menghalangi pertumbuhan perusahaan atau keberadaan perusahaan, tergantung kepada beberapa faktor sebagai berikut: 1) apakah sumber daya yang dimiliki tidak mudah ditiru oleh lainnya; 2) apakah sumber daya yang dimiliki tidak akan menyusut setiap saat dengan segera, dan kapan perkiraan terjadinya; 3) apakah pesaing tidak mempunyai sumber daya yang lebih baik ?

Mengacu pada kondisi di atas, maka program akseleraasi pendidikan di SMA Negeri 1 Terbanggi Besar perlu melihat sejauh mana pentingnya peranan lingkungan eksternal, karena lingkungan eksternal dapat berperan positif maupun negatif. Ketiga faktor dalam program akselerasi, yakni 1) apakah sumber daya program akselerasi yang dimiliki SMA Negeri 1 Terbanggi Besar tidak mudah ditiru oleh sekolah lain ?; 2) apakah sumber daya program akselerasi SMA Negeri 1 Terbanggi Besar (jumlah siswa, minat siswa, kepuasan pelanggan) tidak mengalami penyusutan ?; 3) apakah sekolah lain tidak memiliki sumber daya yang lebih baik ?

e. Menganalisis Pengaturan Internal

Wibisono (2011:43) menyatakan ada beberapa hal yang perlu dianalisis terkait pengaturan internal, yakni apakah pekerja dibayar dengan cara yang memotivasi mereka untuk mengejar tujuan perusahaan ? apakah budaya organisasi mendorong orang untuk inovative dan membuat perubahan ? apakah orang dalam organisasi saling berkomunikasi dengan jelas dan bekerja sama satu dengan yang lain untuk menyelesaikan tujuannya ? apakah orang dalam organisasi memperoleh perlakuan yang adil ?

Mengacu kepada pernyataan tersebut di atas, maka penyelenggara program akselerasi pendidikan di SMA Negeri 1 Terbanggi Besar perlu menganalisa pengaturan internal, yang meliputi: apakah pendidik dan tenaga kependidikan dibayar dengan cara yang memotivasi mereka untuk mengejar tujuan program akselerasi tersebut ? apakah budaya sekolah mendorong sumber daya manusia di sekolah untuk melakukan inovasi dan membuat perubahan ? apakah sumber daya manusia di sekolah saling berkomunikasi dengan jelas dan bekerja sama satu dengan yang lain untuk menyelesaikan tujuannya ? apakah sumber daya manusia di sekolah memperoleh perlakuan yang adil ?

Wibisono (2011:43) menyatakan bahwa pengaturan internal harus mampu memberikan motivasi kepada pekerja untuk meningkatkan kinerja, sebaliknya pengaturan yang kurang memberikan dukungan harus dikurangi atau dihapus. Demikian pula dalam hal penyelenggaraan program akselerasi pendidikan, hal-hal yang mampu memberikan motivasi kepada pendidik dan tenaga kependidikan untuk meningkatkan kinerja perlu ditingkatkan, dan hal-hal yang kurang memberikan dukungan terhadap pelaksanaan program akselerasi pendidikan perlu dikurangi atau ditiadakan.

f. Menilai Keuntungan Kompetitif

Wibisono (2011:43) menyatakan bahwa suatu perusahaan mempunyai *competitive advantage* terhadap lainnya sampai pada suatu tingkat bahwa pelanggan merasa bahwa produk atau jasanya lebih unggul daripada produk atau jasa perusahaan lainnya. Pernyataan tersebut mengandung pengertian bahwa keuntungan kompetitif merupakan produk atau jasa yang dihasilkan oleh suatu

perusahaan atau lembaga lebih unggul dari produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan/ lembaga lainya.

Mengacu pada pernyataan di atas, maka output penyelenggaraan program akselerasi pendidikan SMA Negeri 1 Terbanggi Besar mempunyai keunggulan kompetitif apabila kualitas lulusan yang dihasilkan oleh SMA Negeri 1 Terbanggi Besar lebih baik daripada kualitas lulusan program akselerasi pendidikan sekolah lainnya.

g. Mengembangkan Strategi Kompetitif

Wibisono (2011:44) menyatakan bahwa strategi kompetitif merupakan alat atau cara dengan mana organisasi mencapai tujuannya. Lebih lanjut dinyatakan bahwa berdasarkan penilaian yang hati-hati terhadap keberadaan perusahaan dan sumber daya yang dimiliki serta keuntungan kompetitif, maka dibuat keputusan tentang bagaimana mencapai tujuan. Strategi yang diterapkan harus disesuaikan dengan perkembangan lingkungan perusahaan berada.

Mengacu pada pernyataan tersebut di atas, maka penyelenggaraan program akselerasi di SMA Negeri 1 Terbanggi Besar harus menganalisa secara tepat dalam merumuskan strategi mencapai tujuan program akselerasi tersebut. Strategi yang diterapkan juga hendaknya disesuaikan dengan perkembangan lingkungan.

h. Mengkomunikasikan Strategi dengan Stakeholder

Wibisono (2011:44) menyatakan bahwa *stakeholder* merupakan individu yang mempunyai tuntutan khusus terhadap jalannya organisasi atau perusahaan. *Stakeholder* dipergunakan untuk menjelaskan individu atau kelompok yang mempunyai kepentingan khusus. *Stakeholder* pada perusahaan meliputi, pekerja

di semua tingkatan, dewan direksi dan para pemegang saham. Strategi yang baik perlu dikomunikasikan dengan jelas kepada *stakeholder* agar mereka memberikan kontribusi untuk keberhasilannya.

Mengacu pada pernyataan di atas, maka *stakeholder* pada penyelenggaraan program akselerasi di SMA Negeri 1 Terbanggi Besar diantaranya komite sekolah dan orang tua siswa. Komite sekolah dan orang tua siswa mempunyai kepentingan khusus dalam memajukan program akselerasi pendidikan, untuk itu sekolah perlu menyampaikan strategi secara jelas kepada komite sekolah dan orang tua siswa tentang pelaksanaan program akselerasi di SMA Negeri 1 Terbanggi Besar, sehingga komite sekolah dan orang tua memberikan kontribusi yang besar terhadap tercapainya tujuan penyelenggaraan program akselerasi tersebut.

i. Mengimplementasikan Strategi

Wibisono (2011:44) menyatakan sekali strategi telah diformulasikan dan dikomunikasikan, maka sampai waktunya siap untuk diimplementasikan. Mengimplmentasikan strategi merupakan langkah penting dalam pelaksanaan strategi yang sudah diformulasikan. Langkah implementasi strategi pada suatu perusahaan atau organisasi akan banyak menemui hambatan, karena terkadang karyawan ada yang cenderung mempertahankan pola lama yang selama ini dilaksanakan.

Mengacu hal tersebut di atas, maka pengelolaan program akselerasi di SMA Negeri 1 Terbanggi Besar perlu mengimplementasikan strategi yang sudah dipilih dalam mencapai tujuan program akselerasi di SMA Negeri 1 Terbanggi Besar. Namun demikian, perlu diantisipasi bahwa pelaksanaan atau implementasi strategi tersebut akan mendapat perlawanan dari guru, tenaga kependidikan maupun pihak

lain yang selama ini sudah merasa nyaman dengan menggunakan strategi yang sejak lama dijalankan.

j. Mengevaluasi Manfaat

Wibiwsono (2011:45) menyatakan setelah strategi diimplementasikan, sangat penting untuk mempertimbangkan apakah tujuan telah dicapai. Pada tahap perencanaan program akselerasi pendidikan di SMA Negeri 1 Terbanggi Besar, perlu dijabarkan secara jelas dan terdokumentasi, sehingga dapat dijadikan acuan oleh setiap pengguna program, serta tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti menentukan bahwa perencanaan program akselerasi adalah proses penentuan tujuan program akselerasi dan pemilihan tindakan masa depan untuk mencapai tujuan program akselerasi tersebut dengan indikator sebagai berikut :

- a. Mengkaji kebijakan yang relevan
- b. Menganalisis kondisi sekolah.
- c. Merumuskan tujuan program akselerasi.
- d. Mengumpulkan data dan informasi terkait program akselerasi.
- e. Melakukan analisis data dan informasi yang diperoleh.
- f. Merumuskan alternatif dan menetapkan program akselerasi.
- g. Menetapkan langkah-langkah pelaksanaan program.
- h. Perumusan strategi pencapaian tujuan program akselerasi
- i. Penetapan sumber daya yang diperlukan dalam program akselerasi
- j. Penetapan standar keberhasilan pencapaian tujuan program akselerasi.

2.5 Pengorganisasian Program Akselerasi

Secara alamiah manusia sejak dilahirkan sudah menjadi mahluk organisasi, yakni menjadi anggota organisasi keluarga, setelah sekolah menjadi anggota organisasi sekolah, begitu seterusnya, sehingga organisasi merupakan bagian tak terpisahkan dalam kehidupan manusia.

Usman (2014:171) menyatakan bahwa organisasi berasal dari bahasa latin, *organum* yang berarti alat, bagian, anggota badan. Organisasi menurut Wendrich, et al dalam Usman (2014:171) adalah proses mendesain kegiatan-kegiatan dalam struktur organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Handoko dalam Usman (2014:170) menyatakan bahwa pengorganisasian ialah (1) penentuan sumber daya dan kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi; (2) proses perancangan dan pengembangan suatu organisasi yang akan dapat membawa hal-hal tersebut ke arah tujuan; (3) penugasan tanggung jawab tertentu; (4) pendelegasian wewenang yang diperlukan kepada individu-individu untuk melaksanakan tugas-tugasnya.

Hermiono (2014:29) menyatakan pengorganisasian merupakan proses yang menghubungkan pekerja dan pekerjaannya untuk mencapai tujuan organisasi. Dari pengertian tersebut, maka tahap pengorganisasian merupakan tahap melengkapi program yang telah disusun dengan susunan organisasi pelaksanaannya. Lebih lanjut dikatakan bahwa proses pengorganisasian terdiri atas pembagian kerja di antara kelompok dan individu, serta mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas individual dan kelompok tersebut dalam suatu struktur tertentu.

Fuad (2014:29) menyatakan bahwa dalam aspek pengorganisasian pendidikan, manajemen pendidikan terkait dengan aktivitas pengalokasian

sumber, perumusan dan penetapan tugas serta penetapan prosedur, penetapan struktur organisasi yang menunjukkan adanya garis kewenangan dan tanggung jawab, kegiatan perekrutan, penyelesaian, pelatihan dan pengembangan sumber daya tenaga, serta penempatan sumber daya manusia pada posisi yang tepat.

Amitai Etzioni dalam Fuad (2014:204) mendefinisikan “ *Organization are social units (or human groupings) deliberately constructed and reconstructed to seek specific goals*” artinya organisasi adalah unit-unit sosial (pengelompokan manusia) yang secara leluasa dikonstruksi atau direkonstruksi untuk meraih tujuan tertentu. Sedangkan menurut W. Richad dalam Fuad (2014:204) organisasi “*as collectivities that have been established for the pursuit of relatively specific obyektives*”. (sebagai kolektifitas yang dibentuk /didirikan untuk mencapai tujuan tertentu).

Unsur pelaksana berkaitan dengan orang/individu/tenaga yang akan menjalankan tugas kegiatan tersebut. Pada tahapan pengorganisasian ada empat kata kunci, yaitu 1) apa itu kegiatan; 2) siapa yang mengerjakan; 3) kapan dikerjakan; dan 4) apa targetnya.

Pada tahapan pengorganisasian, kepala sekolah perlu mengetahui kemampuan dan karakteristik guru dan stafnya, sehingga dapat mengatur pembagian tugas kepada orang/ individu yang sesuai pada posisinya, seperti tugas wakil kepala sekolah, koordinator program, wali kelas, pembimbing ekstrakurikuler, penyusunan jadwal pelajaran dan tugas-tugas lain agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik.

Pembagian tugas mengajar dengan tugas-tugas lainnya perlu dibagi secara merata dengan mempertimbangkan kecukupan jam minimal, sesuai dengan bidang

keahlian dan minat guru. Penyusunan jadwal pelajaran diupayakan setiap guru maksimal mengajar selama 5 hari, penyusunan jadwal ekstra kurikuler juga perlu diselaraskan.

Berdasarkan uraian di atas, maka pengorganisasian program akselerasi adalah suatu proses pembagian kerja di antara individu maupun kelompok serta mengkoordinasikan struktur organisasi program akselerasi dengan indikator sebagai berikut :

- a. Menetapkan tujuan program akselerasi yang hendak dicapai.
- b. Menetapkan pekerjaan yang harus dilakukan sesuai tujuan program akselerasi yang telah ditetapkan.
- c. Penetapan personil yang akan melaksanakan program akselerasi.
- d. Menetapkan waktu pelaksanaan program akselerasi.
- e. Menetapkan tempat pelaksanaan program akselerasi.

2.6 Pelaksanaan Program Akselerasi

Tahap pelaksanaan merupakan tahapan dimana seorang kepala sekolah sebagai pimpinan di sekolah menggerakkan pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah agar bekerja secara optimal. Salah satu prinsip agar pendidik dan tenaga kependidikan dapat bekerja optimal perlu menggunakan prinsip motivasi, yakni kepala sekolah merangsang agar pendidik dan tenaga kependidikan termotivasi untuk mengerjakan tugas yang telah dibebankan kepada mereka.

Usman (2014:274) Motivasi merupakan salah satu alat atasan agar bawahannya mau bekerja keras dan bekerja cerdas sesuai dengan yang diharapkan. Motivasi merupakan proses psikis yang mendorong seseorang untuk

melakukan sesuatu. Motivasi dapat berasal dari dalam diri (*instrinsik*) maupun dari luar diri (*ekstrinsik*).

Samani (1999:5) secara umum orang akan termotivasi jika mengetahui prinsip: 1) bahwa ia mampu mengerjakan; 2) yakin bahwa pekerjaannya memberikan manfaat; 3) tidak sedang dibebani tugas lainnya yang berat; 4) tugas yang diberikan merupakan kepercayaan yang diberikan kepadanya; 5) terdapat hubungan yang harmonis antar sesama teman.

Berdasarkan 5 aspek pada prinsip motivasi tersebut di atas, maka kepala sekolah sebagai supervisor perlu mengadakan pendampingan/ supervisi terhadap seluruh pendidik dan tenaga kependidikan yang terlibat dalam pelaksanaan tugas di sekolah, dengan tujuan utama supervisi adalah menemukan dan mengatasi kesulitan yang dihadapinya. Dengan cara diadakan pendampingan tersebut, maka pendidik meningkatkan semangat kerja.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka pelaksanaan program akselerasi adalah suatu proses untuk merancang struktur formal, pengelompokan dan mengatur serta pembagian tugas/kerja dalam upaya efisiensi pencapaian tujuan program akselerasi tersebut, dengan indikator sebagai berikut :

- a. Terdapat pembagian tugas.
- b. Terdapat uraian tugas sesuai bidang pekerjaan.

2.7 Pengawasan Program Akselerasi

Pengawasan sering diartikan sebagai upaya mencari kesalahan, namun sesungguhnya bahwa pengawasan merupakan upaya menemukan hambatan yang

terjadi sehingga dapat segera diatasi. Pengawasan dilaksanakan agar penyimpangan terhadap rencana yang telah ditetapkan dapat diminimalisir.

Pada dunia pendidikan, pengawasan sering dikenal dengan istilah supervisi. Pada istilah sehari-hari pengawasan sering disamakan dengan pengendalian atau *controlling*. Pengawasan merupakan kegiatan ahir dari fungsi manajemen. Fungsi manajemen yang dikendalikan, yakni perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian itu sendiri.

Menurut LANRI dalam Usman (2014:535) pengawasan ialah suatu kegiatan untuk memperoleh kepastian apakah pelaksanaan pekerjaan/kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana semula. Kegiatan pengawasan pada dasarnya membandingkan kondisi yang ada dengan yang seharusnya terjadi.

Usman (2014:536-539) bahwa bentuk pengawasan ada 4 (empat), yakni (1) pengawasan melekat (*waskat*); (2) pengawasan fungsional (*wasnal*); (3) pengawasan masyarakat (*wasmas*); dan (4) pengawasan legislatif.

Pengawasan melekat (*waskat*) adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus-menerus, dilakukan langsung terhadap bawahannya, secara preventif dan represif agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengawasan Fungsional adalah setiap upaya pengawasan yang dilakukan oleh aparat yang ditunjuk khusus untuk melakukan audit secara bebas terhadap obyek yang diawasinya. Pengawasan masyarakat adalah pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat atas penyelenggaraan suatu kegiatan. Pengawasan

legislatif adalah pengawasan yang dilakukan oleh anggota legislatif terhadap eksekutif tentang tata cara penyelenggaraan pemerintahan dan keuangan negara.

Samani (1999:6) menyatakan agar supervisi berhasil baik, maka ada lima prinsip dasar supervisi yang harus diterapkan, yakni (1) pengawasan bersifat membimbing dan membantu mengatasi masalah; (2) bantuan dan bimbingan diberikan secara tidak langsung; (3) balikan atau saran perlu segera diberikan; (4) pengawasan dilakukan secara periodik; (5) pengawasan dilakukan dalam suasana kemitraan.

Pengawasan bersifat membimbing dan membantu mengatasi kesulitan dimaksud bahwa kepala sekolah sebagai supervisor pada saat melakukan supervisi harus memfokuskan perhatian pada usaha mengatasi hambatan yang dihadapi oleh guru atau staf, dan bukan untuk mencari kesalahan yang dilakukan guru atau staf.

Pengawasan harus bersifat memberi bantuan dan bimbingan secara tidak langsung, hal ini dimaksudkan bahwa kepala sekolah hanya bersifat membantu, sedangkan guru/ staf harus mampu mengatasi sendiri, hal ini agar guru atau staf memiliki rasa percaya diri dan akan tumbuh motivasi kerja yang baik.

Prinsip pengawasan balikan atau saran perlu segera diberikan, dimaksudkan agar yang bersangkutan dapat memahami dengan jelas keterkaitan antara saran dan umpan balik dengan kondisi yang dihadapi. Kepala sekolah pada saat memberikan umpan balik atau saran hendaknya bersifat diskusi, sehingga terjadi pembahasan terhadap masalah yang terjadi.

Prinsip pengawasan dilakukan secara periodik mengandung pengertian bahwa kehadiran kepala sekolah sebagai supervisor tidak harus menunggu terjadi

hambatan, tetapi secara periodik pengawasan tersebut dilaksanakan untuk menumbuhkan dukungan moral bagi guru atau staf saat mengerjakan tugas.

Prinsip pengawasan dilaksanakan dalam suasana kemitraan dimaksudkan bahwa kepala sekolah dalam melaksanakan pengawasan menciptakan suasana kemitraan, hal ini agar guru atau staf lebih mudah untuk menyampaikan hambatan yang dihadapi, dan suasana kemitraan akan menumbuhkan hubungan kerja yang harmonis.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka peneliti mengambil indikator pengawasan sebagai berikut :

- a. Siapa yang melaksanakan pengawasan program akselerasi pendidikan di SMA Negeri 1 Terbanggi Besar ?
- b. Kapan dilaksanakan pengawasan program akselerasi pendidikan di SMA Negeri 1 Terbanggi Besar ?
- c. Bagaimana bentuk pengawasan program akselerasi pendidikan di SMA Negeri 1 Terbanggi Besar ?
- d. Apa hasil pengawasan program akselerasi pendidikan di SMA Negeri 1 Terbanggi Besar ?
- e. Bagaimana tindak lanjut hasil pengawasan program akselerasi pendidikan di SMA Negeri 1 Terbanggi Besar ?

2.8 Evaluasi Program Akselerasi

Arikunto (2013:325) menyatakan bahwa evaluasi program adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan sengaja untuk melihat tingkat keberhasilan program. Lebih lanjut Arikunto menyatakan bahwa program adalah

kegiatan yang dilaksanakan dengan seksama. Berdasarkan kedua pengertian tersebut, maka disimpulkan bahwa evaluasi program adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk mengetahui seberapa tinggi tingkat keberhasilan dari kegiatan yang direncanakan. Dengan demikian evaluasi yang dilaksanakan mempunyai dua kepentingan yaitu untuk mengetahui ketercapaian tujuan program yang telah ditetapkan, dan untuk mengetahui kesulitan dalam penyelenggaraan program.

Pada tahap evaluasi atau pengendalian ada dua aspek penting, yaitu 1) aspek jenis evaluasi dikaitkan dengan tujuannya, dan 2) pemanfaatan hasil evaluasi itu sendiri. Jika dikaitkan dengan evaluasi program akselerasi pendidikan, maka evaluasi tersebut merupakan kegiatan untuk mengetahui seberapa tinggi tingkat keberhasilan program akselerasi pendidikan yang telah direncanakan tersebut. Program akselerasi merupakan program yang kompleks karena melibatkan banyak orang dan banyak aspek, oleh karenanya program akselerasi harus dievaluasi secara sistematis agar dapat dikaji, apa kekurangan-kekurangan, dan kekurangan tersebut nantinya menjadi pertimbangan untuk pelaksanaan program akselerasi pendidikan pada waktu yang lain maupun di sekolah yang lain.

Mengingat evaluasi program akselerasi merupakan kegiatan yang kompleks dalam mengambil kebijakan dan menentukan kebijakan selanjutnya, maka kegiatan evaluasi program akselerasi pendidikan di SMA Negeri 1 Terbanggi Besar perlu dilaksanakan sistematis, rinci dan menggunakan prosedur yang telah diuji secara cermat. Penentu kebijakan akan berjalan tepat apabila data/ informasi yang digunakan sebagai dasar pertimbangan merupakan data yang benar, akurat, dan lengkap.

Lalu langkah-langkah apa yang harus diambil setelah mendapatkan hasil dari evaluasi program ? Ada 4 kebijakan yang dapat ditindak lanjuti setelah mengadakan evaluasi suatu program, yakni 1) program dilanjutkan; 2) program dilanjutkan dengan penyempurnaan; 3) program dimodifikasi; 4) program dibatalkan.

Program dilanjutkan, jika temuan data diketahui bahwa program ini sangat bermanfaat dan dapat dilaksanakan dengan lancar tanpa hambatan, dan kualitas pencapaian tujuannya tinggi. Program dilanjutkan dengan perbaikan/ penyempurnaan apabila dari data/ informasi yang diperoleh bahwa hasil program sangat bermanfaat, tetapi dalam pelaksanaannya kurang lancar atau pencapaian tujuan kurang tinggi. Untuk itu hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana cara mengoptimalkan suatu kegiatan agar ketercapaian tujuannya tinggi.

Sedangkan Program perlu dimodifikasi apabila data yang diperoleh menunjukkan kemanfaatan program kurang tinggi, dan perlu disusun kembali perencanaan yang lebih baik, atau kemungkinan perlu adanya perubahan terhadap tujuan yang ingin dicapai. Kebijakan program harus dihentikan atau tidak dilanjutkan apabila data yang diperoleh menunjukkan bahwa hasil program kurang bermanfaat dan sangat banyak hambatan dalam pelaksanaannya. Untuk itu, kebijakan yang diambil menghentikan program tersebut merupakan kebijakan yang tepat.

Berdasarkan uraian diatas, maka evaluasi program akselerasi pendidikan di SMA Negeri 1 Terbanggi Besar adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan sengaja untuk melihat tingkat keberhasilan program akselerasi yang sudah ditetapkan oleh sekolah, dengan indikator sebagai berikut :

- a. Siapa yang melaksanakan evaluasi program akselerasi pendidikan di SMA Negeri 1 Terbanggi Besar ?
- b. Kapan dilaksanakan evaluasi program akselerasi pendidikan di SMA Negeri 1 Terbanggi Besar ?
- c. Bagaimana hasil evaluasi program akselerasi pendidikan di SMA Negeri 1 Terbanggi Besar ?
- d. Apa tindak lanjut hasil evaluasi program akselerasi pendidikan di SMA Negeri 1 Terbanggi Besar ?

2.9 Faktor Pendukung Program Akselerasi

Faktor Pendukung adalah hal yang dapat membantu atau menunjang suatu kegiatan, faktor pendukung program akselerasi pendidikan adalah hal-hal yang dapat ikut serta menyokong, membantu atau menunjang dalam pencapaian sasaran program akselerasi pendidikan.

Jahja (2004:14-15) menyatakan bahwa faktor-faktor pendidikan terdiri atas siswa, pendidik, lingkungan pendidikan, tujuan pendidikan, dan alat pendidikan. Berdasarkan pendapat di atas, maka faktor-faktor pendidikan tersebut dapat menjadi faktor pendukung terselenggaranya program akselerasi pendidikan. Selain faktor-faktor tersebut, sumber dana juga dapat menjadi faktor pendukung program akselerasi pendidikan, serta kebijakan pemerintah terkait penyelenggaraan program akselerasi pendidikan.

Program akselerasi pendidikan merupakan bagian dari pendidikan secara umum, efektifitas program ini didukung oleh sumber daya yang tersedia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 1 ayat

23 menyatakan bahwa sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana dan prasarana.

Berdasarkan pada pasal tersebut di atas, maka indikator faktor pendukung penyelenggaraan program akselerasi pendidikan di SMA Negeri 1 Terbanggi Besar adalah hal-hal yang ikut serta mendukung terselenggaranya program akselerasi.

2.10 Faktor Kendala Program Akselerasi

Faktor kendala/penghambat suatu organisasi dapat berasal dari luar organisasi (faktor eksternal) dan faktor dari dalam organisasi (faktor internal). Menurut Rachmawati (2007:18) bahwa faktor penghambat eksternal adalah lingkungan atau keadaan yang bersumber dari luar organisasi yang dapat menghambat usaha peningkatan fungsi sumber daya manusia yang mendukung tercapainya tujuan organisasi. Lebih lanjut disebutkan bahwa faktor-faktor eksternal tersebut antara lain: 1) angkatan kerja; 2) legal consideration; 3) persaingan; 4) konsumen; 5) teknologi; 6) politik; 7) ekonomi; dan 8) demografi. Sedangkan menurut Rachmawati (2007:26) faktor kendala yang datang dari dalam organisasi (faktor internal) adalah lingkungan atau keadaan yang bersumber dari dalam organisasi sendiri yang dapat menghambat usaha peningkatan fungsi sumber daya manusia yang mendukung tercapainya tujuan organisasi. Faktor kendala dari dalam, antara lain: 1) misi; 2) kebijakan; 3) budaya organisasi; 4) serikat pekerja dan 5) pemegang saham.

Mengacu pada pengertian tersebut, maka faktor kendala program akselerasi pendidikan adalah hal-hal yang membatasi, menghalangi atau mencegah

pencapaian sasaran program akselerasi pendidikan, baik yang datang dari dalam (internal) maupun yang datang dari luar (eksternal).

Jahja (2004:14-15) mengungkapkan bahwa faktor-faktor pendidikan terdiri atas siswa, pendidik, lingkungan pendidikan, tujuan pendidikan, dan alat pendidikan. Faktor-faktor ini dapat menjadi faktor pendukung, namun dapat pula menjadi faktor kendala. Pada penyelenggaraan program akselerasi pendidikan di SMA Negeri 1 Terbanggi Besar, faktor-faktor tersebut bisa menjadi kendala. Selain faktor-faktor tersebut, adapula kendala teknis di lapangan yang dapat terjadi, mengingat bahwa pengelolaan program akselerasi berbeda dengan program reguler.

Berdasar uraian di atas, maka indikator penelitian pada faktor kendala program akselerasi pendidikan di SMA Negeri 1 Terbanggi Besar adalah hal-hal yang ikut mempersulit terlaksananya program akselerasi.

2.11 Kepuasan Pelanggan Program Akselerasi

Menurut Edwar Sallis dalam Tampubolon (2001:74-75) menyatakan bahwa kelangsungan hidup suatu organisasi sangat ditentukan bagaimana pandangan pelanggan organisasi tersebut. Oleh karena itu, organisasi harus mengerti keinginan pelanggan sekarang dan masa depan dengan berusaha memenuhi persyaratan pelanggan bahkan melebihi harapan mereka.

Sallis (2011:82) menyatakan bahwa Misi utama dari sebuah institusi TQM adalah untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggannya. Organisasi yang unggul baik negeri maupun swasta adalah organisasi yang dalam istilah Peters dan Waterman “menjaga hubungan dengan pelanggannya dan memiliki obsesi

terhadap mutu". Pelanggan adalah kunci untuk meraih keuntungan bagi organisasi sekolah.

Menurut Goetsch dan Davis dalam Nasution (2005:22) bahwa fokus pada pelanggan dalam TQM, baik pelanggan internal maupun pelanggan eksternal merupakan driver. Pelanggan eksternal menentukan kualitas produk atau jasa yang disampaikan kepada mereka, sedangkan pelanggan internal berperan besar dalam menentukan kualitas tenaga kerja, proses, dan lingkungan yang berhubungan dengan produk atau jasa.

Sekolah sebagai organisasi pendidikan perlu memperhatikan kepuasan pelanggan, sehingga pelanggan akan mempunyai sifat positif terhadap sekolah, pelanggan akan memiliki sifat loyal terhadap sekolah. Sebagai implikasi dari rasa loyal dan terpenuhinya kepuasan pelanggan, maka akan mengangkat nama baik sekolah/ citra sekolah di masyarakat, dan masyarakat akan merasa percaya untuk menyerahkan putra-putrinya mengikuti pendidikan di sekolah tersebut, dan peran serta masyarakat akan meningkat serta kepercayaan pelanggan internal juga akan meningkat.

Mengacu pada uraian tersebut, maka kepuasan pelanggan program akselerasi pendidikan di SMA Negeri 1 Terbanggi Besar adalah adanya rasa puas karena terpenuhinya kebutuhan dan keinginan pelanggan internal (pendidik, tenaga kependidikan dan siswa) maupun pelanggan eksternal (orang tua siswa, masyarakat dan pengguna), dengan indikator kepuasan pelanggan antara lain :

- a. Rasa terpenuhinya kebutuhan dan keinginan pelanggan internal, meliputi tersedianya sarana prasarana pendukung yang memadai, proses belajar

mengajar yang baik, hasil belajar yang memenuhi Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) tiap mata pelajaran, dan lulus ujian nasional 100%.

- b. Rasa terpenuhinya kebutuhan dan keinginan pelanggan eksternal, meliputi tersedianya sarana prasarana pendukung belajar yang baik, perolehan nilai raport di atas KKM, diterimanya siswa di perguruan tinggi negeri.

2.12 Manajemen Sekolah

Manajemen sekolah dapat diartikan sebagai pengaturan seluruh potensi yang dimiliki sekolah agar berfungsi secara optimal dalam mendukung tercapainya tujuan sekolah. Kepala sekolah sebagai pimpinan tertinggi atau sebagai manajer di sekolah mempunyai tugas pokok memimpin dan mengelola seluruh sumber daya sekolah seperti guru, staf tata usaha, sarana prasarana dan lainnya, untuk mencapai tujuan sekolah tersebut.

Secara umum fungsi manajemen sekolah mencakup 4 (empat) tahap yaitu perencanaan (*planing*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*actuating*); dan tahap pengawasan (*controlling*). Keempat fungsi tersebut sama dengan fungsi manajemen secara umum yakni *Planing, Organizing, Actuating dan Controlling* yang dikenal dengan istilah POAC.

Pada tahap perencanaan (*planing*) program akselerasi pendidikan, sekolah perlu menetapkan kegiatan apa saja yang perlu dilaksanakan untuk mencapai tujuan program akselerasi pendidikan yang telah ditetapkan. Pada tahap pengorganisasian kepala sekolah perlu memfungsikan komponen organisasi/ sumber daya sekolah yang dimiliki secara optimal, karena optimalisasi sumber

daya sekolah akan mendukung pelaksanaan program akselerasi pendidikan sesuai dengan kegiatan yang direncanakan.

Pada tahap pengorganisasian (*organizing*), kepala sekolah mengarahkan semua komponen yang terkait dengan pelaksanaan program akselerasi pendidikan yang telah ditetapkan. Semua komponen diarahkan untuk bersama-sama melaksanakan tugas sesuai dengan bidang masing-masing.

Pada tahap pengawasan (*controlling*), kepala sekolah sebagai pimpinan tertinggi di sekolah perlu mengendalikan dan mengadakan pengawasan terhadap program akselerasi pendidikan yang sudah ditetapkan melalui kegiatan supervisi pelaksanaan kegiatan, sehingga kegiatan dapat berjalan secara efisien dan efektif. Agar pengawasan program akselerasi berfungsi dengan baik, maka perlu memahami 5 (lima) prinsip pengawasan, yakni pengawasan bersifat membimbing, bimbingan diberikan secara tidak langsung, pemberian saran segera, pengawasan dilakukan secara periodik, dan pengawasan dilakukan dalam suasana kemitraan.

2.12.1 Manajemen Kurikulum

Sudjana dalam Hermino (2014:30) menyatakan bahwa secara etimologis kata “ kurikulum” berasal dari bahasa latin yang kata dasarnya adalah *currere*, yang berarti jarak yang harus ditempuh oleh para pelari dari mulai *start* sampai *finish*.

Nasution dalam Hermino (2014:31) menyatakan bahwa kata “ kurikulum” berasal dari bahasa latin, yaitu *currere* (verb) yang artinya berlari, dan *curricula* (noun) artinya jarak yang ditempuh dalam suatu perlombaan. Lebih lanjut Nasution mendefinisikan bahwa kurikulum adalah suatu jarak yang harus ditempuh oleh pelari atau kereta dalam perlombaan dari awal sampai akhir.

Saylor, Alexander, dan Lewis dalam Hamalik (2013:5) menyatakan bahwa pada hakekatnya kurikulum sebagai suatu program kegiatan terencana (*program of planed activities*) memiliki rentang yang cukup luas, hingga membentuk suatu pandangan. Namun dalam perkembangan berikutnya, kata kurikulum diadopsi dalam dunia pendidikan, yang secara tradisional mendefinisikan kurikulum sebagai sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh siswa untuk memperoleh ijazah. Secara modern kurikulum didefinisikan lebih luas dari definisi secara tradisional.

Romine dalam Hermino (2014:31) bahwa "*Curriculum is interpreted to mean all of the organized courses, activities, and experiences which pupils have under direction of the school, wheather in the classroom or not*". Dari pengertian di atas mengandung makna bahwa kurikulum tidak hanya sekedar berisi mata pelajaran, akan tetapi meliputi semua kegiatan dan pengalaman yang menjadi tanggung jawab penyelenggara pendidikan.

Kurikulum merupakan komponen penting dalam sistem pendidikan karena kurikulum tidak hanya merumuskan tujuan yang harus dicapai, tetapi memberikan pemahaman tentang pengalaman belajar yang harus dimiliki oleh setiap siswa. Kurikulum juga berisi sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh oleh siswa dalam jangka waktu tertentu.

Keberadaan kurikulum dalam satuan pendidikan/sekolah merupakan hal yang sangat pokok, karena salah satu tugas sekolah adalah melaksanakan kegiatan sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Prinsip pengelolaan kurikulum di sekolah tidak lain agar pelaksanaan kegiatan belajar mengajar berjalan dengan baik. Agar tujuan pembelajaran tersebut tercapai, maka guru perlu didorong untuk

mengembangkan strategi pembelajaran, misalnya menggunakan metode yang tepat.

Tahun 2006, pemerintah menganjurkan penggunaan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) untuk dapat dikembangkan di sekolah, mulai tingkat dasar hingga jenjang sekolah menengah atas, sebagaimana tertera dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Perbedaan kurikulum tingkat satuan pendidikan dengan kurikulum sebelumnya terletak pada pengembangannya. Sebelum kurikulum tingkat satuan pendidikan, dikembangkan secara terpusat (*sentralistik*) sedangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan merupakan kurikulum operasional yang dikembangkan oleh satuan pendidikan. Satuan pendidikan diberi kewenangan mengembangkan kurikulum yang akan dipergunakan, dan setiap tahun perlu diadakan revisi agar pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan mendekati sempurna.

Para ahli kurikulum mengemukakan berbagai definisi kurikulum yang didasarkan pada isu berikut ini: filosofi kurikulum, ruang lingkup komponen kurikulum, polarisasi kurikulum-kegiatan belajar, dan posisi evaluasi dalam pengembangan kurikulum. Pengaruh pandangan filosofi terhadap pengertian kurikulum ditandai oleh pengertian kurikulum yang dinyatakan sebagai "*subject matter*", "*content*" atau "*transfer of culture*". Filsafat ini memiliki tujuan yang sama dengan essentialism dalam hal intelektualitas.

Murray Print dalam Sanjaya (2009:1) mengungkapkan bahwa kurikulum meliputi (1) *planned learning experiences*; (2) *offered within an educational*

institutio/program; (3) represented as a document; and (4) includes experiences resulting from implementing that document.

Pandangan Print bahwa sebuah kurikulum meliputi perencanaan pengalaman belajar, program sebuah lembaga pendidikan yang diwujudkan dalam sebuah dokumen serta hasil dari implementasi dokumen yang telah disusun.

Pengembangan kurikulum dipengaruhi berbagai faktor seperti politik, sosial, budaya, ekonomi, ilmu, teknologi. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa kurikulum adalah "seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu". Pengertian kurikulum yang tersebut diakui ada kesan bahwa kurikulum seolah-olah hanya dimiliki oleh lembaga pendidikan modern dan yang telah memiliki rencana tertulis, sedangkan lembaga pendidikan yang tidak memiliki rencana tertulis dianggap tidak memiliki kurikulum.

Pengertian kurikulum tersebut diberlakukan untuk semua unit pendidikan dan secara administratif kurikulum harus terekam secara tertulis, posisi sentral ini menunjukkan bahwa pada setiap unit pendidikan kegiatan kependidikan yang utama adalah proses interaksi akademik antara siswa, pendidik, sumber dan lingkungan. Posisi sentral ini menunjukkan bahwa setiap interaksi akademik merupakan jiwa dari pendidikan dan kurikulum merupakan desain interaksi tersebut. Dalam posisi ini, maka kurikulum merupakan bentuk akuntabilitas lembaga pendidikan terhadap masyarakat.

Setiap lembaga pendidikan, baik lembaga pendidikan umum maupun lembaga pendidikan khusus haruslah dapat mempertanggungjawabkan apa yang dilakukannya terhadap masyarakat dengan cara memberikan "*academic accountability*" dan "*legal accountability*" berupa kurikulum. Oleh karena itu, kajian untuk mengetahui kegiatan akademik suatu lembaga pendidikan cukup melihat dan mengkaji kurikulum. Jika seseorang ingin mengetahui apa yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan atau apakah pengalaman belajar yang terjadi pada lembaga pendidikan tersebut tidak bertentangan dengan aturan, maka ia harus mempelajari dan mengkaji kurikulum lembaga pendidikan tersebut.

Dalam pengertian "*intrinsic*" kependidikan, maka kurikulum adalah jantung pendidikan, artinya semua gerak kehidupan kependidikan yang dilakukan sekolah didasarkan pada apa yang direncanakan kurikulum. Kehidupan di sekolah adalah kehidupan yang dirancang berdasarkan apa yang diinginkan kurikulum. Pengembangan potensi siswa menjadi kualitas yang diharapkan sesuai dengan apa yang ditetapkan pada kurikulum. Proses belajar yang dialami siswa di kelas, di sekolah, dan di luar sekolah dikembangkan berdasarkan apa yang direncanakan kurikulum.

Kegiatan evaluasi terhadap kualitas siswa dapat dilakukan berdasarkan rencana yang dicantumkan dalam kurikulum atau pendidikan. Satuan pendidikan yang tidak memiliki kurikulum yang jelas atau tidak memiliki kurikulum sama sekali, maka kehidupan pendidikan di satuan pendidikan/ sekolah menjadi tanpa arah dan tidak efektif dalam mengembangkan potensi siswa menjadi kualitas pribadi yang maksimal. Oleh karena itu kurikulum adalah dasar dan sekaligus pengontrol terhadap aktivitas pendidikan.

Secara singkat, posisi kurikulum dapat disimpulkan menjadi tiga, yakni 1) kurikulum adalah "*construct*"; 2) kurikulum berposisi sebagai solusi untuk menyelesaikan berbagai masalah sosial yang berkenaan dengan pendidikan; 3) kurikulum untuk membangun kehidupan masa depan dimana kehidupan masa lalu, masa sekarang, dan berbagai rencana pengembangan dan pembangunan bangsa dijadikan dasar untuk mengembangkan kehidupan masa depan.

Secara formal, tuntutan masyarakat terhadap pendidikan diterjemahkan dalam tujuan pendidikan nasional maupun tujuan institusional/ tujuan pendidikan pada jenjang dan jenis pendidikan yang diselenggarakan lembaga pendidikan. Tujuan pendidikan nasional adalah tujuan besar pendidikan bangsa Indonesia yang diharapkan tercapai melalui pendidikan dasar.

Apabila pendidikan dasar Indonesia adalah 9 tahun maka tujuan pendidikan nasional harus tercapai dalam masa pendidikan 9 tahun yang dialami seluruh bangsa Indonesia. Oleh karena itu kualitas yang dihasilkannya bukanlah kualitas yang harus dimiliki seluruh warga bangsa tetapi kualitas yang dimiliki hanya oleh sebagian dari warga bangsa.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 36 ayat 3 menyatakan bahwa *kurikulum disusun sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan: (a) peningkatan iman dan takwa; (b) peningkatan akhlak mulia; (c) peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat siswa; (d) keragaman potensi daerah dan lingkungan; (e) tuntutan pembangunan daerah dan nasional; (f) tuntutan dunia kerja; (g) perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; (h) agama; (i) dinamika perkembangan global; dan (j) persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan*

Pasal ini menunjukkan berbagai aspek pengembangan kepribadian siswa yang menyeluruh dan pengembangan pembangunan masyarakat dan bangsa, ilmu, kehidupan agama, ekonomi, sosial, budaya, seni, teknologi dan tantangan

kehidupan global. Artinya, kurikulum haruslah memperhatikan permasalahan ini dengan serius dan menjawab permasalahan ini dengan menyesuaikan diri pada kualitas manusia yang diharapkan dihasilkan pada setiap jenjang pendidikan.

Secara formal, tuntutan masyarakat terhadap pendidikan juga diterjemahkan dalam bentuk rencana pembangunan pemerintah. Rencana besar pemerintah untuk kehidupan bangsa di masa depan seperti transformasi dari masyarakat agraris ke masyarakat industri, reformasi dari sistem pemerintahan sentralistis/sentralisasi ke sistem pemerintahan desentralisasi, pengembangan berbagai kualitas bangsa seperti sikap dan tindakan demokratis, produktif, toleran, cinta damai, semangat kebangsaan tinggi, memiliki daya saing, memiliki kebiasaan membaca, sikap senang dan kemampuan mengembangkan ilmu, teknologi dan seni, hidup sehat dan fisik sehat, dan sebagainya. Tuntutan formal seperti ini harus dapat diterjemahkan menjadi tujuan setiap jenjang pendidikan, lembaga pendidikan, dan pada gilirannya menjadi tujuan kurikulum.

Model pengembangan kurikulum berikut ini adalah model yang biasanya digunakan dalam banyak proses pengembangan kurikulum. Model kurikulum ini lebih banyak mengambil posisi sebagai rencana dan kegiatan. Ide yang dikembangkan pada langkah awal lebih banyak berfokus pada kualitas apa yang harus dimiliki dalam belajar suatu disiplin ilmu, teknologi, agama, seni, dan sebagainya. Pada fase pengembangan ide, permasalahan pendidikan hanya terbatas pada permasalahan transfer dan transmisi. Masalah yang muncul di masyarakat atau ide tentang masyarakat masa depan tidak menjadi kepedulian kurikulum.

Keseluruhan proses pengembangan kurikulum dapat digambarkan sebagai berikut: Dalam proses pengembangan tersebut unsur-unsur luar seperti kebudayaan di mana suatu lembaga pendidikan berada tidak pula mendapat perhatian. Konsep diversifikasi kurikulum menempatkan konteks social-budaya seharusnya menjadi pertimbangan utama. Sifat ilmu yang universal menyebabkan konteks social-budaya tersebut terabaikan.

Dari beberapa definisi kurikulum di atas, maka dapat diartikan bahwa Manajemen Kurikulum adalah sebagai suatu system pengelolaan kurikulum yang kooperatif, komprehensif, sistemik, dan sistematis dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum. Secara fungsi manajemen, ada 4 (empat) tahapan dalam pengelolaan kurikulum di sekolah, yaitu a) perencanaan; b) pengorganisasian; c) tahap pelaksanaan dan d) tahap evaluasi.

2.12.2 Manajemen Kesiswaan

Aziz (2012:73) mendefinisikan siswa adalah orang yang sedang belajar atau menuntut ilmu dalam bimbingan seseorang atau beberapa orang guru. Istilah lain dari siswa adalah peserta didik, ada pula yang menyebut dengan istilah murid.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, siswa adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Arikunto dalam Hermino (2014:42) mendefinisikan siswa adalah siapa saja yang terdaftar sebagai objek didik di suatu lembaga pendidikan.

Senada dengan pendapat di atas, Hermino (2014:42) mendefinisikan siswa adalah seseorang yang terdaftar dalam suatu jalur, jenjang dan jenis lembaga

pendidikan tertentu, yang selalu ingin mengembangkan potensi dirinya baik dalam aspek akademik maupun non akademik melalui proses pembelajaran yang diselenggarakan.

Dalam satuan pendidikan, siswa merupakan komponen penting, dipandang sebagai individu yang akan dikembangkan potensi yang dimilikinya. Mengingat siswa merupakan unsur penting dalam pengelolaan pendidikan, maka siswa perlu diperlakukan sebagai subyek dan bukan sebagai obyek, sehingga dapat didorong untuk berperan aktif dalam suatu perencanaan kegiatan, maupun terlibat dalam suatu kegiatan.

Di samping siswa memiliki keberagaman potensi, siswa dalam satuan pendidikan/sekolah juga memiliki keragaman intelektual, emosional, fisik, agama, sosial, ekonomi, minat, bakat dan lainnya. Untuk itu, perlu adanya pengelolaan/pengaturan keberagaman siswa agar dapat berkembang sesuai potensi yang dimiliki, mulai dari perencanaan kegiatan, jenis kegiatan, sarana prasarana pendukung kegiatan, dan hal-hal lain yang dapat mendukung tumbuh kembangnya potensi siswa tersebut.

Pengembangan potensi siswa dalam satuan pendidikan/ sekolah, tidak hanya pada ranah intelektual, melainkan meliputi ranah psikomotor dan afektif. Pengembangan potensi pada ranah kognitif dimaksudkan agar siswa mempunyai kecerdasan dalam menerima ilmu pengetahuan di sekolah, yang nantinya dapat bermanfaat dalam kehidupannya. Pengembangan pada ranah psikomotor diperlukan agar siswa memiliki ketrampilan yang dapat menjadi bekal dikemudian hari. Sedangkan pengembangan potensi afektif dimaksudkan agar siswa memiliki sikap/ budi pekerti yang terpuji dalam masyarakat. Pengembangan potensi siswa

perlu ditangani dengan baik agar semua kegiatan siswa dapat menunjang kegiatan belajar mengajar. Kegiatan penanganan kesiswaan disebut manajemen kesiswaan.

Knezevich dalam Hermino (2014:41) mendefinisikan manajemen siswa atau *Pupil Personnel Administration* sebagai layanan yang memusatkan perhatian kepada siswa, baik di dalam kelas maupun di luar kelas, seperti pengenalan pendaftaran, pengembangan minat dan bakat siswa hingga mereka mencapai tataran yang diharapkan.

Adapun tujuan manajemen siswa adalah mengatur semua kegiatan untuk menunjang proses pembelajaran di sekolah, baik di dalam kelas maupun terkait dengan aspek minat dan bakat siswa itu sendiri, agar siswa dapat berkembang untuk mencapai cita-citanya.

Hermino (2014:43) menyatakan bahwa dalam manajemen kesiswaan terbagi menjadi tiga kategori besar, yaitu penerimaan (*input*), proses pembelajaran (*processes*), dan pendistribusian (*output*). Lebih lanjut dinyatakan bahwa dalam kegiatan penerimaan siswa baru dikelola sedemikian rupa mulai dari perencanaan daya tampung sekolah, seleksi siswa, pengelompokan, dan orientasi siswa, sehingga secara fisik, mental, dan emosional siap untuk mengikuti pendidikan.

Proses pembelajaran adalah interaksi antara guru dan siswa selama berada dalam kelas atau di sekolah. Sedangkan pendistribusian (*Output*) bertujuan untuk mengatur berbagai kegiatan dalam bidang kesiswaan, agar kegiatan pembelajaran di sekolah berjalan lancar, tertib dan teratur.

Hermino (2014:44) menyatakan bahwa manajemen siswa meliputi 4 (empat) kegiatan, yaitu perencanaan terhadap siswa, pembinaan siswa, evaluasi siswa, dan mutasi siswa. Pada tahap perencanaan meliputi langkah-langkah:

analisis kebutuhan siswa, rekrutmen siswa, seleksi siswa, orientasi siswa, penempatan siswa, serta pencatatan dan pelaporan.

Kegiatan pembinaan siswa meliputi beberapa layanan khusus yang dapat menunjang manajemen siswa. Layanan-layanan khusus tersebut antara lain: layanan bimbingan konseling, layanan perpustakaan, layanan laboratorium, layanan kantin, layanan kesehatan, layanan transportasi, dan layanan asrama. Sedangkan kegiatan evaluasi siswa merupakan suatu tindakan untuk menentukan suatu nilai. Evaluasi hasil belajar siswa berarti kegiatan menilai proses dan hasil belajar siswa baik berupa kegiatan kurikuler, ko-kurikuler, dan ekstra kurikuler.

Mutasi siswa diartikan sebagai perpindahan siswa dari sekolah satu ke sekolah lainnya (ekstern) atau perpindahan siswa dalam satu sekolah (intern).

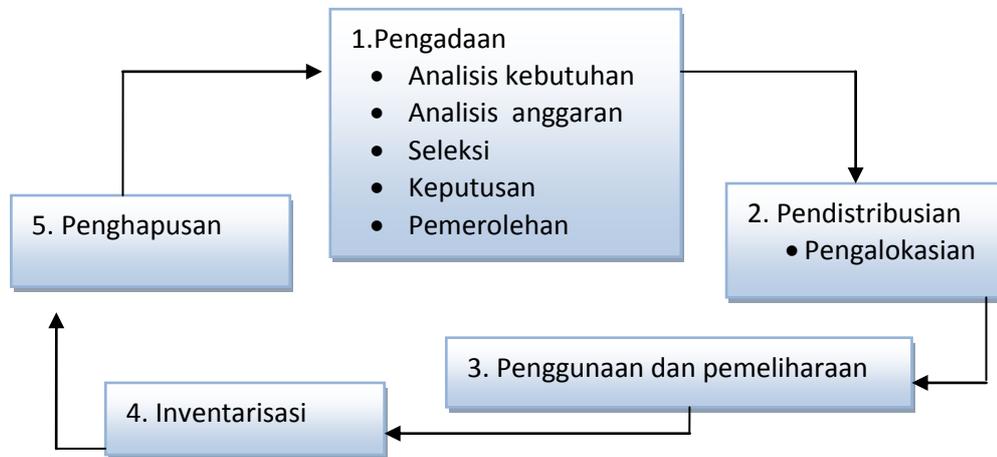
Dari uraian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen kesiswaan adalah upaya satuan pendidikan/sekolah dalam mengelola siswa yang meliputi perencanaan, pembinaan, evaluasi dan mutasi peserta didik.

2.12.3 Manajemen Sarana prasarana

Hermino (2014:55) mendefinisikan sarana pendidikan adalah semua perangkat peralatan, bahan dan perabot yang secara langsung digunakan proses pendidikan di sekolah. Sedangkan prasarana pendidikan adalah semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses pendidikan di sekolah.

Bafadal dalam Hermino (2014:54) mendefinisikan manajemen sarana prasarana sebagai proses kerja sama pendayagunaan semua sarana prasarana pendidikan secara efektif dan efisien. Lebih lanjut beliau menyatakan bahwa manajemen sarana prasarana merupakan suatu proses yang terdiri atas langkah-

langkah tertentu secara sistematis. Proses manajemen sarana prasarana dapat dilihat pada gambar berikut ini :



Gambar 2.4 Proses Manajemen Sarana dan Prasarana
(Sumber : Manajemen Kurikulum Berbasis Karakter, Hermino, hal 56)

Mengacu pada pengertian manajemen secara umum yang meliputi 4 fungsi yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan, maka manajemen sarana prasarana adalah upaya memberdayakan segenap sarana prasarana mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan terhadap sarana prasarana yang ada di satuan pendidikan.

Ada empat tahapan manajemen sarana prasarana di sekolah. *Pertama* tahap perencanaan. Perencanaan sarana prasarana dibutuhkan untuk kelangsungan pendidikan di sekolah. Apa sarana prasarana yang diperlukan untuk menunjang kegiatan belajar mengajar di sekolah, apa sarana prasarana yang diperlukan untuk menunjang kegiatan siswa, apa sarana prasarana yang diperlukan untuk menunjang bidang keuangan, dan bagaimana merencanakan sumber dana untuk pengadaan atau perawatan sarana prasarana yang diperlukan. Tanpa adanya perencanaan sarana prasarana yang baik maka kebutuhan sarana prasarana dalam satuan pendidikan akan berjalan tanpa arah.

Kedua tahap pengorganisasian. Perencanaan terhadap sarana prasarana yang baik perlu ditindak lanjuti dengan tahap pengorganisasian. Pada tahap pengorganisasian, kepala sekolah perlu menetapkan dan memfungsikan komponen-komponen yang terlibat dalam pengelolaan sarana prasarana di sekolah, sehingga pengelolaan sarana prasarana dapat berjalan sesuai tujuan sekolah tersebut.

Ketiga tahap pelaksanaan. Pada tahapan pelaksanaan, kepala sekolah perlu memberikan arahan kepada semua komponen yang terlibat dalam pengelolaan sarana prasarana secara bersama-sama, sehingga apa yang telah direncanakan dan dilaksanakan tidak akan melenceng jauh dari rambu-rambu yang sudah ditetapkan.

Keempat tahap pengawasan. Tahap pengawasan sangat penting dilakukan dalam upaya mengontrol pelaksanaan suatu program. Adanya pengawasan diharapkan semua tahapan dapat berjalan sesuai acuan yang telah ditetapkan, dengan pengawasan diharapkan dapat mengefektifkan serta efisiensi tujuan pengelolaan maupun pengadaan sarana prasarana di sekolah.

Keempat tahapan pada pengelolaan sarana prasarana, tidak lain bertujuan agar sarana prasarana yang dimiliki oleh sekolah dapat digunakan lebih lama dan lebih tepat guna. Adanya sarana prasarana yang terjaga dengan baik dapat mendukung aktivitas pendidikan di sekolah menjadi lancar serta dapat menghemat penggunaan dana untuk belanja sekolah.

Sarana prasarana yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sarana prasarana yang mendukung pelaksanaan program akselerasi pendidikan di SMA

Negeri 1 Terbanggi Besar, antara lain: ruang belajar, laboratorium IPA, ruang multi media, perpustakaan, dan fasilitas penunjang lainnya.

2.12.4 Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), pasal 1 ayat 7 menyatakan bahwa standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria pendidikan jabatan dan kelayakan maupun mental, serta pendidikan jabatan.

Manajemen personalia (sumber daya manusia) dalam suatu organisasi/sekolah sangat diperlukan. Untuk itu perlu adanya pengelolaan sumber daya manusia yang baik agar memperoleh hasil yang optimal. Samani (1999:77) menyatakan ada 4 (empat) prinsip dasar dalam pengelolaan personalia (sumber daya manusia) yaitu : 1) sumber daya manusia; 2) pengelolaan yang baik; 3) kultur dan suasana organisasi yang baik; 4) kerjasama dan saling mendukung. Keempat prinsip dasar tersebut perlu dipahami oleh kepala sekolah sebagai pimpinan sekolah.

Dalam pengembangan sekolah, personalia (sumber daya manusia) merupakan komponen paling berharga. Sumber daya manusia di sekolah meliputi: guru, staf/tata usaha, siswa, orang tua, dan pihak terkait. Jika komponen tersebut dikelola dengan baik, maka sumber daya manusia akan berperan secara optimal dalam mencapai tujuan sekolah. Sebaliknya, jika pengelolaan sumber daya manusia di sekolah tidak baik, maka tidak akan diperoleh peran serta optimal dari setiap komponen personalia tersebut.

Selain adanya pengelolaan personalia yang baik, kultur atau budaya, iklim, suasana kerja yang ada dalam organisasi dalam hal ini sekolah turut serta

menentukan keberhasilan pengelolaan personalia. Prilaku manajerial kepala sekolah sebagai pimpinan di sekolah sangat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan sekolah melalui pemberdayaan personalia. Oleh karena itu, kepala sekolah perlu mengupayakan agar setiap personil dapat bekerja sama dan saling mendukung antara satu dengan yang lainnya.

Hermino (2014:87-91) manajemen personalia meliputi tiga hal, yaitu rekrutmen, pengembangan sumber daya manusia, dan kompensasi sumber daya manusia. Rekrutmen diartikan sebagai penarikan calon pegawai melalui serangkaian kegiatan yang terencana guna memperoleh calon pegawai yang diharapkan dan sesuai syarat yang ditetapkan.

Mondy dan Noe dalam Hermino (2014:87) menyatakan “*Recruitment is the process of attracting individuals on a timely basis, in sufficient numbers, and with appropriate qualifications, and encouraging them to apply for jobs with an organization*”. Menurut Fllipo dalam Hermino (2014:87) bahwa rekrutmen sebagai proses pencarian tenaga kerja yang dilakukan secara seksama, sehingga dapat merangsang mereka untuk mau melamar jabatan-jabatan tertentu yang ditawarkan oleh organisasi.

Werther dan Davis dalam Hermino (2014:87) mendefinisikan rekrutmen sebagai proses untuk mendapatkan dan untuk merangsang pelamar-pelamar yang mempunyai kemampuan agar menjadi pegawai. Senada dengan pendapat diatas, Musselman dan Hughes dalam Hermino (2014:87) mendefinisikan rekrutmen sebagai proses pembentukan sekumpulan pelamar yang memiliki kualitas tertentu. Adapun langkah-langkah dalam rekrutmen antara lain: penyusunan strategi

rekrutmen, pencarian para pelamar kerja, penyisihan pelamar yang tidak cocok, dan pembuatan kumpulan pelamar.

Dalam manajemen personalia, pengembangan sumber daya manusia atau pengembangan staf (*staff development*) merupakan langkah positif untuk meningkatkan sumber daya yang dimiliki. Beberapa istilah pengembangan sumber daya manusia antara lain : pengembangan sumber daya manusia (*human resource development*), pengembangan karyawan (*personnel development*), pelatihan (*training*), pendidikan dalam jabatan (*inservice education*), dan pendidikan pra jabatan (*preservice education*).

Menurut Safo dalam Hermino (2014:89) pengembangan sumber daya manusia merupakan aplikasi program pelatihan dan pendidikan di dalam organisasi dengan menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran.

Castallo dalam Hermino (2014:89) menyatakan bahwa pengembangan karyawan merupakan pengembangan berbagai aktivitas karyawan yang termasuk pengembangan individu, pengembangan kelompok, dan pengembangan sistem. Pada pengertian ini ada tiga tingkat pengembangan yaitu, individu, kelompok dan sistem.

Terkait dengan pekerjaan, Howey dalam Castallo dalam Hermino (2014:89) menyatakan bahwa pengembangan guru mencakup 6 fungsi yaitu : keterampilan pedagogik, memahami diri, pengembangan kognitif, pengembangan teori pengajaran, pengembangan profesi melalui penelitian dan pengembangan karir.

Kompensasi merupakan bentuk penerimaan oleh karyawan baik berupa finansial maupun jasa atas pengabdian yang dilakukan. Flippo dalam Samsudin

dalam Hermino (2014:90) mengungkapkan bahwa kompensasi merupakan harga untuk jasa yang diterima atau diberikan oleh orang lain bagi kepentingan seseorang atau badan hukum.

Desler dalam Hermino (2014:90) mengungkapkan bahwa kompensasi merupakan setiap bentuk pembayaran atau imbalan yang diberikan kepada karyawan dan timbul dari dipekerjakannya karyawan itu. Sedangkan Sukamti dalam Hermino (2014:90) bahwa kompensasi merupakan apa yang diterima pegawai sebagai penukaran dari pekerjaan mereka.

2.12.5 Manajemen Pembiayaan

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, pasal 1 ayat 12 menyatakan bahwa biaya operasi satuan pendidikan adalah bagian dari dana pendidikan yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi satuan pendidikan agar dapat berlangsungnya kegiatan pendidikan yang sesuai standar nasional pendidikan secara teratur dan berkelanjutan.

2.12.5.1 Pengertian Biaya

Sihombing (2003:78) menyatakan bahwa segala pengorbanan yang dinilai dengan uang menurut harga pasar yang berlaku dan diperlukan untuk mencapai suatu tujuan disebut biaya. Dari definisi tersebut, jika dikaitkan dengan pendidikan, maka segala bentuk pengeluaran yang digunakan dalam proses pendidikan untuk mencapai tujuan dan jenjang pendidikan tertentu dikategorikan sebagai biaya pendidikan.

Hermino (2014:57) mendefinisikan keuangan atau dana adalah salah satu sumber daya yang memiliki peran sangat vital dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan-satuan pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan.

Sihombing (2003:78) mendefinisikan biaya pendidikan adalah nilai ekonomi (dalam bentuk uang) dari input atau sumber-sumber pendidikan tertentu yang digunakan untuk proses pembelajaran guna menghasilkan output pendidikan dari suatu program pendidikan tingkat tertentu. Istilah biaya pendidikan sering kali dipadankan dengan pengeluaran pada pendidikan.

Supriadi (2006:3) menyatakan bahwa biaya pendidikan dalam cakupan ini memiliki pengertian yang luas, yaitu semua jenis pengeluaran yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan, baik dalam bentuk uang maupun barang dan tenaga yang dinyatakan dengan satuan moneter.

Pendidikan yang berkualitas sangat diharapkan oleh berbagai pihak, dan pendidikan berkualitas memerlukan dukungan dana yang memadai. Namun di sisi lain banyak pihak-pihak yang merasa keberatan untuk mengeluarkan dana sebagai sumber pembiayaan pendidikan. Kualitas pendidikan sebagaimana kita harapkan sangat ditentukan oleh tingkat pembiayaan yang dilakukan.

Dewasa ini iklim pendidikan kita berada dalam dua spirit yang bertolak belakang, yaitu konsep otonomi dan globalisasi. Konsep otonomi menunjukkan pada spirit serba keterbatasan yang tidak sejalan dengan tujuan pendidikan yang berkualitas. Sedangkan konsep globalisasi menunjukkan pada spirit serba tersedia untuk mencapai tujuan pendidikan berkualitas guna memenangkan persaingan global. Kenyataan demikian memerlukan kecerdasan manajemen sehingga menghasilkan kebijakan pendidikan yang optimal.

Pembiayaan pendidikan menjadi masalah yang sangat penting dalam keseluruhan pembangunan sistem pendidikan. Uang memang bukan segala-galanya dalam menentukan kualitas pendidikan, tetapi segala kegiatan pendidikan

memerlukan uang. Oleh karena itu jika *performance* sistem pendidikan diperbaiki, manajemen penganggarannya juga tidak mungkin dibiarkan, mengingat bahwa anggaran mesti mendukung kegiatan. Tidak semua masyarakat Indonesia sepenuhnya menyadari bahwa biaya pendidikan yang cukup akan dapat mengatasi berbagai masalah pendidikan, meskipun tidak semua masalah akan dapat dipecahkan secara tuntas.

Biaya pendidikan bukanlah sesuatu yang baru, akan tetapi masih merupakan hal yang sangat menarik untuk diperbincangkan, terutama pada tahun pelajaran baru. Biaya pendidikan merupakan salah satu komponen masukan instrumental yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah.

Dalam setiap upaya pencapaian tujuan pendidikan, baik tujuan yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, biaya pendidikan memiliki peranan yang sangat menentukan. Supriadi (2006:3) menyatakan bahwa hampir tidak ada upaya pendidikan yang dapat mengabaikan peranan biaya, sehingga dapat dikatakan bahwa tanpa biaya, proses pendidikan di sekolah tidak akan berjalan.

Pengeluaran sekolah berkaitan dengan pembayaran keuangan sekolah untuk pembelian berbagai macam sumber daya atau masukan (input) proses sekolah seperti tenaga administrasi, guru-guru, bahan-bahan, perlengkapan-perengkapan dan fasilitas.

Pembahasan di atas menunjukkan bahwa dalam upaya perbaikan mutu pendidikan pada tingkat satuan pendidikan (sekolah) atau mutu pendidikan pada umumnya, pemahaman yang serius terhadap berbagai aspek pembiayaan pendidikan sangat diutamakan. Pemahaman terhadap berbagai aspek pendidikan sangatlah penting diperhatikan untuk dapat mencapai tujuan pendidikan yang

diinginkan. Pemahaman berbagai aspek pendidikan tersebut tidak dapat dilakukan hanya pada tingkat satuan pendidikan atau tingkat mikro, tetapi harus bersifat nasional (makro), antara lain meliputi sumber-sumber pembiayaan pendidikan, sistem dan mekanisme pengalokasiannya, efektifitas dan efisiensi dalam penggunaannya, dan akuntabilitas hasilnya yang diukur dari perubahan-perubahan kuantitatif dan kualitatif yang terjadi pada semua tataran, khususnya tingkat sekolah (Supriadi, 2006:7).

Paradigma umum pembiayaan pendidikan menekankan pada penyelesaian biaya rendah untuk meningkatkan efisiensi internal dan efisiensi eksternal system pendidikan pada jenjang sekolah yang berbeda. Keterkaitan antara efisiensi internal dan eksternal sekolah untuk sekolah dasar dan sekolah menengah dapat ditunjukkan. Apabila diperhatikan dengan seksama, biaya pendidikan atau pengeluaran sekolah sangat ditentukan oleh komponen-komponen biaya pendidikan yang jumlah dan porsi nya berbeda-beda antara satu sekolah dengan sekolah lainnya.

Pendekatan unsur biaya (*ingredient approach*), pengeluaran sekolah dapat dikategorikan ke dalam beberapa item pengeluaran yang berupa pengeluaran bidang kurikulum, pengeluaran bidang kesiswaan, pengeluaran bidang sarana prasarana, pengeluaran bidang kesejahteraan, dan pengeluaran bidang hubungan masyarakat, dan pengeluaran tak terduga lainnya. Fattah (2002:24) menyatakan bahwa pendekatan biaya dapat dikategorikan (a) pengeluaran untuk pelaksanaan pelajaran, (b) pengeluaran untuk tata usaha sekolah, (c) pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, (d)kesejahteraan pegawai, (e) administrasi, (f) pembinaan teknis edukatif, dan (g) pendataan.

Fattah (2002:109) merinci bahwa pemanfaatan biaya pendidikan di sekolah digunakan untuk berbagai komponen yang berupa : (1) gaji/kesejahteraan pegawai (termasuk guru), (2) pembinaan profesi guru, (3) pengadaan alat-alat pelajaran, (4) pengadaan buku-buku pelajaran, (5) perawatan/rehabilitasi gedung ruang belajar, (6) pengadaan sarana kelas, (7) pengadaan sarana sekolah, (8) pembinaan kegiatan ekstrakurikuler, dan (9) pengelolaan sekolah.

Dalam konsep pembiayaan pendidikan ada dua hal penting yang perlu dikaji atau dianalisis, yaitu biaya pendidikan secara keseluruhan (*total cost*) dan biaya satuan per siswa (*unit cost*). Biaya satuan di tingkat sekolah merupakan *aggregate* biaya pendidikan tingkat sekolah, baik yang bersumber dari pemerintah, orang tua siswa, dan masyarakat yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan pendidikan dalam satu tahun pelajaran. Biaya satuan per siswa merupakan ukuran yang menggambarkan seberapa besar uang yang dialokasikan ke sekolah-sekolah secara efektif untuk kepentingan siswa dalam menempuh pendidikan.

Realisasi amanat UUD 1945 terkait pembiayaan pendidikan ialah pemberian bantuan Biaya Operasional Sekolah (BOS) kepada setiap siswa yang mengikuti pendidikan dasar/wajib belajar 9 tahun secara bertingkat untuk setiap jenjang pendidikan. Mulai tahun pelajaran 2012/2013 pemerintah meningkatkan pemberian bantuan dana operasional sekolah pada jenjang SMA yang besarnya baru dirintis sebesar Rp 60.000,- per siswa per semester. Pada tahun pelajaran 2013/2014 besaran dana bantuan biaya operasional sekolah untuk masing-masing jenjang sekolah sebagai berikut : sekolah Dasar (SD/MI) pemerintah membantu biaya operasional sekolah sebesar Rp. 535.000,- per siswa per tahun, siswa sekolah menengah pertama (SMP/MTs) menerima bantuan biaya operasional

sekolah sebesar Rp. 710.000,-per siswa per tahun. Sedangkan bantuan biaya oprasional sekolah (BOS) pada jenjang SMA/MA sebesar Rp.1.000.000,- per siswa per tahun. Pada tahun ajaran 2014/2015 besarnya dana bantuan operasional sekolah (BOS) dari pemerintah untuk tingkat SMA/MA sebesar Rp. 1.200.000,- per siswa per tahun.

Selain bantuan oprasional sekolah, pemerintah memberikan bantuan biaya personal/pribadi siswa tidak mampu dengan nama Bantuan Siswa Miskin (BSM), dan bantuan dana pembangunan fisik/ sarana prasarana sekolah, dengan harapan biaya penyelenggaraan pendidikan di masing-masing sekolah dapat tercukupi, sehingga setiap siswa bisa terbantu biaya pendidikannya.

Mengingat pentingnya pembiayaan dalam pendidikan, maka dana pendidikan harus dikelola sebaik mungkin dengan pola manajemen keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen keuangan dan standar akuntansi.

Arikunto dan Yuliana dalam Hermino (2014:57) menyatakan bahwa manajemen keuangan dalam pengertian umum keuangan, kegiatan pembiayaan meliputi tiga hal, yakni *budgeting* yaitu penyusunan anggaran, *accounting* yaitu pembukuan, *auditing* yaitu pemeriksaan.

Budgeting atau penyusunan anggaran merupakan rencana anggaran secara umum, dalam satuan pendidikan sering diistilahkan dengan rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) atau rencana kerja dan anggaran sekolah (RKAS). Rencana anggaran satuan pendidikan yang sering dikenal dengan istilah RAPBS atau RKAS ini bersifat rencana yang menyangkut kepentingan orang banyak. Untuk itu, perlu disyahkan penggunaannya oleh pejabat atau atasan berwenang atau komite sekolah.

Accounting merupakan langkah kedua pada manajemen keuangan/pembiayaan. *Accounting* diartikan sebagai pengurusan keuangan. Pengurusan keuangan meliputi dua hal, yakni kewenangan untuk menentukan kebijakan dan ketatausahaan. Ketatausahaan merupakan tindakan menerima, menyimpan dan mengeluarkan uang. Ketatausahaan dalam organisasi tidak memiliki kewenangan untuk menentukan dan membelanjakan uang, melainkan hanya sebatas mencatat penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran uang kepada pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Auditing atau pemeriksaan merupakan langkah ketiga dalam manajemen keuangan/pembiayaan. Menurut Hermino (2014:58) *Auditing* atau pengawasan adalah semua kegiatan yang menyangkut pertanggungjawaban penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran atau penyerahan uang yang dilakukan bendaharawan kepada pihak-pihak yang berwenang.

Bafadal dalam Hermino (2014:58) mengartikan manajemen keuangan sekolah sebagai keseluruhan proses memperoleh dan pendayagunaan uang secara tertib, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk memperlancar pencapaian tujuan pendidikan.

Merujuk pada pengertian tersebut di atas, Bafadal menyatakan ada empat hal yang harus ditekankan dalam manajemen keuangan sekolah, yaitu: 1) manajemen keuangan merupakan keseluruhan proses upaya memperoleh serta mendayagunakan seluruh dana; 2) mencari sebanyak mungkin sumber-sumber keuangan serta berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan dana dari sumber-sumber keuangan tersebut; 3) menggunakan seluruh dana yang tersedia atau diperoleh semata-mata untuk penyelenggaraan pendidikan di sekolah; 4)

penggunaan seluruh dana sekolah harus dilakukan dengan tertib dan mudah dipertanggungjawabkan kepada semua pihak yang terkait.

2.12.5.2 Sumber Pembiayaan Pendidikan

Disadari bahwa pendidikan merupakan suatu proses, maka diperlukan adanya sarana pendukung. Oleh karena itu dalam proses pendidikan tersebut memerlukan dukungan dana atau pembiayaan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 46 ayat 1 menyatakan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Pasal 47 ayat 1 menyatakan bahwa sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan. Sumber pendanaan pendidikan ada tiga, yakni pemerintah, masyarakat dan orang tua siswa. Apabila sumber pembiayaan pendidikan berasal dari pemerintah, maka permasalahan utama yang harus dihadapi adalah ketersediaan data secara lengkap dan akurat.

Sihombing (2003:62-74) menyatakan bahwa ada 3 sumber pembiayaan pendidikan, yaitu (1) Orang tua siswa; (2) Masyarakat; (3) Pemerintah. Senada dengan pendapat Sihombing, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menyatakan bahwa pembiayaan pendidikan berasal dari pemerintah, orang tua dan atau masyarakat. Esensi pembiayaan pendidikan seperti itu menggambarkan bahwa pembiayaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama.

Pembiayaan pendidikan tidak mungkin ditanggung oleh pemerintah secara utuh, begitu pula sebaliknya bahwa sumber pembiayaan pendidikan ditanggung oleh orang tua siswa maupun masyarakat secara utuh. Semua perlu adanya

keterlibatan sehingga proses pendidikan dapat terbiayai dengan baik. Peran orang tua dalam pembiayaan pendidikan sangat penting bahkan cukup besar. Orang tua menyadari bahwa proses pendidikan bagi putra-putrinya merupakan hal yang sangat penting. Namun demikian, tidak ada patokan pasti berapa besaran biaya yang harus ditanggung orang tua siswa tiap satuan pendidikan dan jenjang pendidikan tertentu. Besarnya biaya pendidikan yang ditanggung orang tua siswa bervariasi tergantung jenjang pendidikan, bentuk pendidikan, status pendidikan, lokasi pendidikan dan sebagainya.

Sihombing (2003:62) menyatakan bahwa peran orang tua selama ini cukup besar dalam mendukung pendidikan anak-anaknya, seperti: pendaftaran, uang sekolah, ujian, bahan belajar, pakaian sekolah, sepatu, alat tulis, transport, kursus, lainnya.

Peran serta masyarakat terhadap pendidikan meliputi memelihara, menumbuhkan, meningkatkan, dan mengembangkan pendidikan nasional. Sihombing (2003:65-66) menyatakan bahwa bentuk peran serta masyarakat dalam pendidikan dapat dikategorikan (1) penyelenggaraan; (2) ketenagaan; (3) pengadaan; (4) sumbangan; (5) praktek; (6) bantuan teknis.

Lebih lanjut dinyatakan bahwa bentuk bantuan penyelenggaraan dimaksud adalah pendirian dan pengelolaan satuan pendidikan pada jalur sekolah (pendidikan formal), jalur pendidikan luar sekolah (pendidikan nonformal), dan jalur keluarga (informal) pada semua jenis sekolah, kecuali sekolah kedinasan.

Pada kategori bantuan ketenagaan meliputi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, bimbingan, dan bantuan tenaga ahli dalam pengelolaan. Sedangkan bentuk bantuan pengadaan meliputi pengadaan gedung, ruang belajar, bahan

bacaan, dan bahan praktek. Bantuan dalam bentuk sumbangan diberikan dalam bentuk dana operasional maupun dana penyelenggaraan pendidikan, pemberian beasiswa dan dana pinjaman. Bentuk bantuan praktek dimaksudkan adanya pemberian kesempatan kepada siswa untuk praktek kerja, magang, atau latihan kerja. Sedangkan bantuan teknis bisa berupa pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijaksanaan atau penyelenggaraan pendidikan, pemberian bantuan kerjasama dalam kegiatan penelitian dan pengembangan.

Sama halnya dengan bantuan orang tua siswa dan masyarakat, pemerintah juga memberikan dukungan dana pendidikan yang cukup besar, tanpa bantuan pemerintah, maka orang tua siswa maupun masyarakat akan merasa berat menanggung biaya pendidikan putra-putrinya. Sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945 bahwa pemerintah bertanggung jawab atas pendidikan bangsa.

Undang-Undang Dasar 1945, pasal 31 ayat 4 hasil amandemen keempat menyatakan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 % (dua puluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Hal senada tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 49 ayat 1 menyatakan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20 % dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

2.12.5.3 Perencanaan Pembiayaan Pendidikan

Perencanaan pembiayaan dalam bidang pendidikan harus dituangkan secara jelas, agar kesalahan dalam penyusunan rencana anggaran dapat dihindari sedini mungkin. Menurut Sihombing (2003:195-198) bahwa dalam perencanaan pendidikan yang harus jelas adalah cakupan, sumber, tujuan, ketersediaan dana, dan falsafah yang mendasari perencanaan tersebut.

Dilihat dari sudut pandang cakupan, maka perencanaan pendidikan dapat disusun menurut skala nasional, propinsi, kabupaten/kota, kecamatan, maupun unit pelaksana teknis. Semakin luas cakupan, maka semakin dituntut adanya konsistensi antara rencana biaya, pelaksanaan biaya, dan kontrol penggunaan biaya.

Ada tiga pola yang dianut dalam sistem anggaran, yakni pola *sentralistik*, *disentralistik*, dan kombinasi keduanya. Pola *sentralistik* artinya suatu pola sistem anggaran di mana semua perencanaan anggaran untuk satu negara disusun ditingkat pusat, sedangkan daerah tinggal melaksanakan apa yang sudah tertuang dalam rencana pembiayaan. Pola *disentralistik* artinya suatu pola sistem anggaran yang perencanaan anggarannya oleh setiap daerah, pemerintahan daerah merancang kebutuhan pedidikannya dan dituangkan dalam rencana pembiayaan pendidikan wilayahnya. Sedangkan pola gabungan antara pola *sentralistik* dan pola *disentralistik* adalah suatu pola perencanaan yang disusun daerah sesuai dengan kebutuhannya, kemudian dipilih mana dana yang mungkin dibiayai oleh pemerintah daerah dan mana yang mungkin dibiayai pemerintah pusat.

2.12.6 Manajemen Hubungan Masyarakat

Keberadaan masyarakat dengan sekolah merupakan dua komponen yang saling memerlukan, sehingga kedua komponen ini perlu menjalin hubungan yang baik (berkomunikasi). Sekolah memerlukan masukan-masukan dari masyarakat dalam penyusunan program yang relevan, juga memerlukan dukungan masyarakat dalam pelaksanaan program tersebut. Sebaliknya masyarakat juga memerlukan program-program pendidikan yang diperlukan oleh masyarakat. Adanya dua komponen yang saling memerlukan dan terkait, maka sangat penting untuk menjalin hubungan kerjasama yang baik antara keduanya.

Terkait dengan hubungan antara pihak sekolah dan masyarakat, maka perlu adanya pengelolaan hubungan kedua belah pihak tersebut dengan sebaik-baiknya, mulai dari perencanaan bentuk hubungan, pengorganisasian pihak-pihak yang terkait, pengarahan terhadap komponen pelaksana hubungan dan pengawasan terhadap jalannya hubungan kedua belah pihak.

Pelaksanaan hubungan masyarakat dengan sekolah agar dapat berjalan dengan baik, maka perlu adanya petugas khusus yang dapat dijadikan sebagai mediator antara kedua belah pihak. Pada lembaga pendidikan/ sekolah biasanya tugas tersebut diberikan kepada wakil kepala sekolah bidang hubungan masyarakat (Humas). Faktor lain agar hubungan dapat berjalan dengan baik adalah jika masyarakat merasakan manfaat dari keikutsertaannya dalam penyelenggaraan program sekolah. Manfaat ini dapat diartikan dalam arti luas, yakni adanya perhatian dari pihak sekolah serta adanya rasa puas karena dapat menyumbangkan kemampuannya bagi kepentingan sekolah. Dengan demikian

prinsip yang harus dijaga antara kedua belah pihak adalah adanya saling memberi rasa kepuasan melalui komunikasi yang efektif.

Usman (2014:470) menyatakan komunikasi adalah proses penyampaian atau penerimaan pesan dari satu orang kepada orang lain, baik langsung maupun tidak langsung, secara tertulis, lisan, maupun bahasa nonverbal. Lebih lanjut dinyatakan bahwa tujuan dan manfaat komunikasi adalah sebagai sarana untuk: 1) meningkatkan kemampuan manajerial dan hubungan sosial; 2) menyampaikan dan/atau menerima informasi; 3) menyampaikan dan menjawab pertanyaan; 4) mengubah perilaku (pola pikir, perasaan, dan tindakan) melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan; 5) mengubah keadaan sosial; 6) sarana untuk menyampaikan perintah, pengarahan, pengendalian, pengkoordinasian, pengambilan keputusan, negosiasi, dan pelaporan.

2.13 Program Akselerasi Pendidikan

2.13.1 Pengertian Akselerasi

Kamus Umum Baku bahasa Indonesia halaman 14 mengartikan akselerasi sebagai daya gerak, percepatan. Sedangkan jika merujuk pada kamus bahasa Inggris, kata akselerasi berasal dari kata *accelerate* yang berarti mempercepat, melanjutkan. Pada mata pelajaran fisika, kata akselerasi sudah banyak diingat para siswa, akselerasi (percepatan= a) diartikan sebagai penambahan kecepatan per satuan waktu, sedangkan kecepatan (v) diartikan sebagai nilai perbandingan antara jarak tempuh per satuan waktu. Supiyanto (2006:41) mendefinisikan percepatan sebagai laju perubahan kecepatan terhadap waktu.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga (2002:22) mengartikan akselerasi sebagai: n 1) proses mempercepat; 2) peningkatan kecepatan, percepatan. Pada mata pelajaran kimia dikenal istilah akseleran, yaitu suatu zat yang dipergunakan untuk mempercepat proses reaksi, hal ini hampir sama dengan pengertian akselerator yang dalam kamus bahasa Indonesia diartikan sebagai sarana untuk menambah kecepatan.

Celangelo dalam Kompri (2015:57) istilah akselerasi menunjuk pada pelayanan yang diberikan (*service delivery*) dan kurikulum yang disampaikan (*curriculum delivery*). Sebagai model pelayanan, akselerasi dapat diartikan sebagai model layanan pembelajaran cara lompat kelas yang diperuntukan bagi siswa yang memiliki kecerdasan IQ di atas 130.

Pembelajaran cepat (*Acceleated Learning*) yang secara sederhana berarti semakin bertambah cepat. *Learning* didefinisikan sebagai sebuah proses perubahan kebiasaan yang disebabkan oleh penambahan ketrampilan, pengetahuan, atau sikap baru. Lou Russel dalam Zakkie (2011:5) mengartikan pembelajaran cepat berarti mengubah kebiasaan dengan meningkatkan kecepatan.

Filosofis yang terpenting dalam pembelajaran cepat adalah pembelajaran cepat membutuhkan *mind set* menuju proses belajar yang lebih baik. Pembelajaran cepat bukan hanya sekedar memberikan hadiah, mendengarkan musik, tanda warna, meditasi dan imajinasi yang dituntun, manipulasi dan trik, hiburan, belajar tanpa kontek dan sebagainya, tetapi menurut Lou Russel pembelajaran cepat merupakan pembelajaran yang fokus pada proses belajar, karena tanpa fokus pada proses pembelajaran, teknik terbaik di dunia pun akan gagal. Lebih lanjut Lou

Russel membedakan antara pembelajaran tradisional dengan pembelajaran cepat sebagai berikut :

Tabel 2.2 Pembelajaran Tradisional versus Pembelajaran cepat

NO	TRADISIONAL	CEPAT
1	Linear	Tidak linear, sistematis
2	Mengetahui tentang	Mengetahui bagaimana
3	Formal, terstruktur	Informal, fleksibel
4	Sadar	Tak sadar
5	Menghafal fakta-fakta	Intuitif dan bisa diaplikasikan
6	Proses belajar “ harus “	Prose belajar “ hendak “
7	Kerja keras	Menyenangkan, tanpa usaha
	Bebas emosi	Emosional
	Pasif	Aktif

(Sumber : *The Accelerated Learning; Lou Russel; hal 6*)

2.13.2 Gaya Penyerapan Belajar

Berbicara akselerasi pendidikan tidak terlepas dari kemampuan dan gaya belajar siswa. Dalam proses pembelajaran sering kali guru tidak memahami gaya belajar yang dimiliki oleh masing-masing siswa di kelas, sehingga sering keliru mempersepsikan kondisi siswa tersebut. Sering pula seorang guru di kelas selalu memaksakan persepektif seperti gurunya, padahal gaya belajar masing-masing siswa berbeda. Sangat arif apabila guru memahami gaya belajar masing-masing siswanya sehingga pembelajaran cepat (*accelerated learning*) dapat terlaksana.

Lou Russel dalam Zakkie (2011:41) menyatakan terdapat tiga cara utama yang dipilih manusia dalam menyerap informasi baru. Ketiga cara manusia menyerap informasi tersebut adalah *Visual*, *Auditori* dan *Kinestetik*. Ketiga cara utama tersebut dalam dunia pendidikan dikenal dengan istilah gaya belajar. Dalam upaya pencapaian pembelajaran cepat, maka seorang guru perlu memahami ketiga gaya belajar yang dimiliki oleh siswanya tersebut. Namun demikian ketiga gaya belajar tersebut bukan untuk dibandingkan antara satu

dengan yang lainnya, karena tidak ada gaya yang lebih baik diantara ketiganya, yang ada bagaimana guru bisa mengoptimalkan gaya belajar yang dimiliki oleh siswa di kelasnya, sehingga pembelajaran cepat dapat terlaksana.

Senada dengan Lou Russel, Lucy (2012:96) menyatakan bahwa masuknya informasi pada otak manusia melalui panca indra. Kita mengenal 3 (tiga) macam gaya belajar, yakni *Visual* (penglihatan), *Auditori* (pendengaran) dan *kinestetik* (gerakan). Namun menurutnya bahwa pembagian tersebut masih dapat diperluas dengan tambahan 3 (tiga) gaya belajar lagi, yakni *tetile* (peraba), *olfaktori* (penciuman) dan *gustatori* (pengecapan). Sehingga ada 6 gaya belajar yang kita kenal. Dari keenam gaya belajar tersebut, tiga gaya belajar teratas yang merupakan gaya belajar yang sering banyak dijumpai dalam proses pembelajaran.

Dalam proses pembelajaran lazimnya seorang siswa memiliki satu gaya belajar yang kuat, dan dua lainnya lemah namun setara, atau memiliki dua gaya belajar yang sama kuat namun yang satu lemah, atau seorang siswa memiliki ketiga gaya belajar yang sama-sama kuat, atau memiliki ketiga gaya belajar yang sama-sama lemah. Siswa yang memiliki ketiga gaya belajar yang sangat kuat akan menjadikan siswa yang paling fleksibel.

Guru/ sebagai agen perubahan perlu memiliki pengetahuan yang baik tentang gaya belajar siswa dan memperhatikan cara yang baik terhadap masing-masing anak yang mempunyai gaya belajar yang berbeda, sehingga proses perkembangan mental anak akan lebih optimal.

Gaya belajar *visual* adalah gaya belajar dimana seorang siswa dalam menyerap informasi banyak melakukan dengan melihat. Lucy (2012:98)

menyatakan bahwa orang visual hidup dalam dunia yang terbuat dari gambar-gambar. Mereka perlu melihat untuk dapat percaya. Secara umum siswa yang memiliki gaya belajar visual mempunyai ciri-ciri sikap tubuh dan performan sebagai berikut: 1) pada saat berhenti berfikir, mata mereka bergerak ke atas; 2) jika terjadi kontak mata, maka mata mereka akan menatap ke atas beberapa detik dan kemudian kembali ke posisi semula; 3) senang mengenakan baju berwarna dan bergaya; 4) menggunakan kata-kata deskriptif visual ketika mereka menjelaskan; 5) jika diminta untuk menunjukkan suatu tempat/ lokasi, maka siswa dengan gaya *visual* akan menjelaskan tentang apa yang akan kita lihat sepanjang jalan hingga lokasi yang dimaksud.

Gaya belajar *Auditori* adalah gaya belajar dimana seorang siswa dalam menyerap informasi kecenderungannya banyak melakukan dengan mendengar. Secara umum siswa yang memiliki gaya belajar *auditori* mempunyai ciri-ciri sikap tubuh dan performan sebagai berikut: 1) Disaat mereka berhenti berfikir, mata mereka menerawang ke depan; 2) sering mengulang-ulang kata; 3) melakukan bicara dengan lambat dengan irama dan ritme terukur; 4) ketika berhenti bicara, siswa auditori akan mendengar dengan intens apa yang kita katakan, dan matanya menerawang ke arah pembicara; 6) sering berbicara sendiri dalam proses belajar sebagai upaya mengingat-ingat apa yang didengarnya.

Lou Russel dalam Zakkie (2011:71) mendefinisikan kecerdasan kinestetik adalah sebuah kecerdasan untuk melakukan gerakan fisik. Sedangkan Lucy (2012:109) menyatakan bahwa orang-orang dengan gaya belajar *kinestetik* memperoleh informasi dan memproses data lewat sentuhan, perasaan, gerakan, naluri, dan firasat. Dari pendapat tersebut di atas, maka gaya belajar *kinestetik*

adalah gaya belajar dimana seorang siswa dalam menyerap informasi kecenderungannya banyak menggunakan gerak tubuh dan perasaan, melakukan sambil bekerja/ bergerak.

Secara umum siswa yang memiliki gaya belajar *kinestetik* mempunyai ciri-ciri sikap tubuh dan performan sebagai berikut: 1) ketika berhenti berfikir, matanya menatap ke bawah; 2) ritme bicaranya cepat; 3) saat berbicara sering menggunakan gerakan atau kata kata emosional, seperti : fantastis ! ayo maju ! ayo bergerak ! dan sebagainya; 4) banyak menggerakkan anggota tubuh saat berbicara; 5) belajar banyak mencoba menggunakan sentuhan tangan dan kemudian banyak menggunakan catatan; 6) memiliki ketakutan terhadap rasa lapar.

Berdasarkan uraian di atas tentang tiga gaya belajar siswa, maka untuk lebih jelas tentang uraian tiga gaya belajar siswa tersebut, dapat dirangkum dalam tabel kecenderungan dan kebiasaan belajar berikut ini.

Tabel 2.3 Kecenderungan dan Kebiasaan Belajar

Situasi	Tipe Visual	Tipe Auditori	Tipe Kinestetik
Mencatat	Banyak catatan menggunakan gambar, diagram	Sedikit mencatat, lebih suka mendengar tanpa beban dan mencatat dengan cepat hanya benar-benar dibutuhkan	Berton-ton catatan beberapa tentang pertemuan, tidak pernah memeriksa ulang catatannya
Duduk	Duduk di tengah agar dapat melihat banyak hal.	Duduk di depan agar dapat mendengar dengan baik	Duduk di belakang, gelisah dan sering bergerak.
Mengingat kata atau angka	Melihat angka-angka tersebut dalam kepalanya dan membacanya ketika dia memasukinya	Mengucapkan angka-angka tersebut di kepalanya atau dengan suara keras ketika memasukinya, jika berbicara melalui telepon, mengingat suara tuts yang dia tekan.	Mengingat lokasi dan gerakan kunci; hanya dapat mengingat angka ketika mengetuk-ketuk (sekedar contoh, tidak dapat mengatakan tanpa bergerak)

Musik	Menyenangi musik	Musik mengganggu kemampuan mendengarnya jika terlalu dekat atau terlalu keras	Musik mempengaruhi emosinya dan tingkat energinya
Menerima respon dari orang lain	Ingin melihat gambar, grafik, dan laporan-laporan yang diwarnai dengan banyak halaman	Hanya mendengarkan anda menceritakan apa yang terjadi, dengan keriuhan yang minimal	Ingin memperoleh data secepatnya dan kemudian ingin memperdebatkan titik-titik emsinya yang paling baik

(sumber : *The Accelerated Learning Field Book*; Lou Russel; hal 48)

2.13.3 Intellegence Quotient (IQ) dan Multiple Intellegence (MI)

Howard Gardner menyatakan bahwa kecerdasan adalah kategorisasi yang membantu kita menemukan perbedaan bentuk representasi mental, kecerdasan bukanlah karakteristik dari apa yang disukai atau tidak disukai seseorang. Beberapa orang berpendapat bahwa kecerdasan merupakan faktor bawaan sejak lahir, namun sebagian lagi berpendapat bahwa kecerdasan dapat ditingkatkan melalui belajar dan pengaruh lingkungan. Kecerdasan yang sangat populer sampai saat ini adalah *Intellegence Quotient (IQ)*. *Intellegence Quotient (IQ)* merupakan alat ukur kemampuan yang berupa test tertulis, diciptakan oleh seorang psikolog Prancis yang bernama Alfred Binet pada tahun 1900. Pada awalnya alat ini digunakan untuk mengetahui pemuda mana yang dapat belajar dengan baik pada tingkat awal di sekolah Paris, namun perkembangan berikutnya banyak digunakan dalam rekrutmen angkatan perang Amerika Serikat pada Perang Dunia I. Saat ini alat test tersebut sudah tersebar ke seluruh dunia dan dimanfaatkan di berbagai bidang, termasuk bidang pendidikan.

Pada tahun 1980-an Howard Gardner mendefinisikan ulang tentang kecerdasan. Howard Gardner dalam Zakie (2011:60) mendefinisikan bahwa

kecerdasan sebagai kemampuan untuk memecahkan masalah dan sebagai sebuah produk fasyen yang dinilai dalam sebuah kultur atau komunitas. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka Ia berpendapat bahwa terdapat 7 (tujuh) kecerdasan yang memiliki arti penting yang setara. Ketujuh kecerdasan Gardner dikenal dengan istilah Kecerdasan Orisinil/Multiple Intellegence (MI), yaitu: 1) kecerdasan interpersonal; 2) kecerdasan logika dan matematika; 3) kecerdasan spasial dan visual; 4) kecerdasan musikal; 5) kecerdasan linguistik dan verbal; 6) kecerdasan intrapersonal; dan 7) kecerdasan tubuh dan kinestetik. Test Intellegence Quotient (IQ) mencakup kecerdasan linguistik/verbal dan logika/matematika.

a. Kecerdasan *Interpersonal*

Lucy (2012:141) mendefinisikan kecerdasan *interpersonal* adalah suatu kemampuan untuk masuk dalam diri orang lain dengan mengerti dunia, pandangan, sikap, kepribadian serta karakter orang lain. Sedangkan Lou Russel dalam Zakkie (2011:65) mendefinisikan kecerdasan *interpersonal* adalah bagaimana orang memahami diri masing-masing; kecerdasan ini mempengaruhi cara mereka berkomunikasi. Dari dua definisi tersebut di atas, maka mengandung pengertian bahwa kecerdasan *Interpersonal* adalah kecerdasan memahami orang lain dan berproses melalui interaksi bersama mereka.

Lou Russel dalam Zakkie (2011:65) menyebutkan karakteristik yang menonjol dari kecerdasan ini adalah empati, pemahaman dan kesadaran akan tujuan dan maksud orang lain. Karakteristik lain bagi pemilik kecerdasan interpersonal adalah humoris dan pengaruh. Sedangkan Lucy (2012:142-143) menyebutkan ciri-ciri anak yang memiliki kecerdasan interpersonal adalah

memiliki banyak teman, suka bersosialisasi, banyak terlibat dalam kegiatan kelompok baik di sekolah maupun di tempat tinggalnya, berperan sebagai penengah jika terjadi konflik antar sesama teman, berempati besar terhadap perasaan atau penderitaan orang lain, serta berbakat menjadi seorang pemimpin dan berprestasi dalam mata pelajaran ilmu sosial.

Lucy (2012:143-144) karier yang baik untuk orang yang memiliki kecerdasan *interpersonal* adalah tenaga pengajar profesional, konselor, marketing, politisi, businessmen, guru, pekerja sosial, aktor, seorang terapis, motivator, tukang lobi, perwakilan serikat kerja, petugas toko, salesman, costumer service, administrator, antropologis, arbitrator, manager, perawat, HRD atau personalia, public relation, kepala sekolah, travel agent, pemimpin agama, psikolog, dan lain sebgainya.

Sedangkan menurut Lou Russel dalam Zakkie (2011:65) bahwa karier yang bagus untuk orang yang memiliki kecerdasan interpersonal antara lain : guru, menteri, pengawas, politisi, pekerja sosial.

b. Kecerdasan *Logis/Matematis*

Lou Russel dalam zakkie (2011:66) menyatakan bahwa kecerdasan *Logis/Matematis* adalah kecerdasan untuk melakukan analisa, yang meliputi kemampuan untuk menghitung, mengukur, menelaah teorema, dan mengerjakan soal-soal matematika yang memiliki tingkat kesulitan.

Lucy (2012:124) menyatakan kecerdasan logis/matematis memuat kemampuan anak untuk menghitung, mengukur, mempertimbangkan proposisi dan hipotesis, berfikir secara induktif dan deduktif, menurut aturan logika, memahami, menganalisis pola angka, serta memecahkan masalah dengan

menggunakan kemampuan berfikir serta menyelesaikan operasi-operasi matematika.

Lou Russel dalam Zakkie (2011:66) bahwa karier yang baik bagi pemilik kecerdasan logis/matematis antara lain: ilmuwan, akuntan, programmer, ahli matematika, dan insinyur. Sedangkan menurut Lucy (2012:148) bahwa karier yang baik untuk pemilik kecerdasan logika/matematis seperti: analis, akuntan, insinyur, dokter, ilmuwan (biologi, kimia, farmasi, dan fisika), programmer komputer, peneliti, banker, politisi, wartawan, editor, guru dan sejenisnya.

c. Kecerdasan *Spasial/Visual*

Lucy (2012:128) mendefinisikan kecerdasan *Spasial/visual* adalah kemampuan untuk melihat dan mengamati dunia visual spasial secara akurat dan kemudian bertindak atas persepsi tersebut. Lebih lanjut dikatakan bahwa kecerdasan ini melibatkan kecerdasan akan warna, garis, bentuk, ruang, ukuran dan juga hubungan diantara elemen-elemen tersebut. Sedangkan Lou Russel dalam Zakkie (2011:67) mendefinisikan kecerdasan spasial/visual adalah kecerdasan untuk membentuk model mental dari dunia dan mampu bermain dengan mengubah model tersebut dalam kepalanya. Kecerdasan *spasial/visual* tersusun dari kemampuan memiliki tiga dimensi yaitu melihat, berimajinasi dan mencipta.

Lucy (2012:130) ciri-ciri anak yang mempunyai kecerdasan spasial/visual antara lain senang bermain dengan bentuk dan ruang (rancang bangun), hafal jalan yang telah dilewati, tak banyak bicara dan lebih aktif mengerjakan hal-hal yang berkaitan dengan abstraksi ruangan, memiliki problem solving yang lebih baik

dibandingkan dengan anak lainnya karena dia dapat membayangkan apa yang akan terjadi setelahnya.

Menurut Lucy (2012:132) karier yang baik untuk pemilik kecerdasan spasial/visual antara lain: Dekorator, arsitek, seniman, designer grafis, dan navigator, pilot, pelaut, perencana tata kota, seniman (pematung, pelukis, dan lainnya), fotografer, animator, designer interior, artis, inventor, pemandu wisata, kartograf (pembuat peta), juru gambar, designer busana, surveyor, perencana urban, kartunis, dan lain sebagainya.

d. Kecerdasan *Musikal*

Zoltan Kodaly dalam Lucy (2012:132) menyatakan bahwa Musik adalah perwujudan semangat manusia seperti halnya bahasa. Jika kita tidak ingin membiarkannya menjadi harta yang terpendam, kita harus bekerja keras agar lebih banyak orang dapat memahaminya. Lou Russel dalam Zakkie (2011:86) mendefinisikan kecerdasan *musikal* adalah sensitivitas pada pola nada, melodi, ritme, dan nada. Sedangkan Lucy (2012:132) mendefinisikan kecerdasan musik adalah kemampuan untuk menikmati, mengamati, membedakan, mengarang, membentuk, dan mengekspresikan bentuk-bentuk musik. Lebih lanjut Lucy menyatakan bahwa kecerdasan musik adalah kemampuan untuk peka terhadap suara-suara nonverbal yang berada di sekelilingnya, termasuk nada dan irama, pola titi nada, melodi serta ritme. Howard Gardner dalam Zakkie (2011:68) menyebutkan bahwa kecerdasan musikal merupakan bakat manusia yang paling awal muncul pada anak jenius.

Lucy (2012:134) ciri-ciri anak dengan kecerdasan musik antara lain suka memainkan alat musik, menyukai pelajaran musik, mudah mengingat melodi lagu,

dapat belajar dengan iringan musik, memiliki suara bagus, dapat bersenandung, peka terhadap berbagai ragam suara, irama dan nada, serta cepat merespon berbagai jenis musik.

Lucy (2012:136) menyatakan bahwa karier yang baik untuk pemilik kecerdasan musikal seperti pengubah lagu, pemusik, penyanyi, komposer, music conductor, guru musik /vokal, pengamat musik, music director, disk jockey/DJ, pemimpin band, pencipta lagu, pianis, gitaris, pemain bass, drummer, aktor, teatre musikal, teknisi studio, instrumen manager, rapper, pembuat film, sound engineer, terapis musik, dan sejenisnya.

Sedangkan menurut Lou Russel dalam Zakkie (2011:68) karier untuk pemilik kecerdasan musikal antara lain : komposer, penyanyi, direktur paduan suara, teknisi rekaman.

e. Kecerdasan *Linguistik/Verbal*

Kecerdasan *Linguistik/verbal* adalah kemampuan untuk mengekspresikan pikiran secara jernih melalui kata-kata, baik ditulis maupun diucapkan. Orang-orang yang memiliki kecerdasan *linguistik/ verbal* berfikir dengan kata-kata dan bergantung pada kata-kata yang diucapkan untuk menjalin hubungan.

Karier yang baik untuk pemilik kecerdasan ini antara lain: penulis, pembicara, aktor, guru, pembaca berita, dan terapis.

f. Kecerdasan *Intrapersonal*

Kecerdasan *intrapersonal* merupakan kecerdasan untuk memikirkan sesuatu dengan tenang. Orang yang memiliki kecerdasan *intrapersonal* mempunyai

kecenderungan berorientasi pada tujuan, independensi, ketekunan, dan kepedulian.

Karier yang baik untuk pemilik kecerdasan *intrapersonal* antara lain: pendeta, penjaga hutan, pelari jarak jauh, psikolog, peneliti.

g. Kecerdasan *Tubuh/kinestetik*

Kecerdasan *kinestetik* adalah suatu kecerdasan untuk melakukan gerakan fisik. Kecerdasan ini terbagi menjadi dua yaitu *tactile* (peraba) dan *kinestetik*. Perbedaan keduanya bahwa kecerdasan *tactile* (peraba) mempunyai kecenderungan mempelajari sesuatu melalui sentuhan dan manipulasi objek, sedangkan kecerdasan kinestetik melibatkan seluruh tubuh mereka, bahkan sering melibatkan tarian dan lompatan. Karier yang baik untuk pemilik kecerdasan kinestetik antara lain : atlet, ibu, pelatih gimnasium, pengacara, wait-person, ahli bedah.

Pada tahun 1997, Howard Gardner menambahkan tiga kecerdasan baru dari tujuh kecerdasan yang sudah ada, ketiga kecerdasan tersebut antara lain : Kecerdasan *emosional*, kecerdasan *naturalis* dan kecerdasan *eksistensial*. Kecerdasan *emosional* adalah kecerdasan terkait dengan kemampuan seseorang untuk mengenadalikan emosi pada saat mereka mengalaminya, dan meresponnya dengan cara yang positif menurut kebudayaan setempat. Karier yang baik untuk pemilik kecerdasan *emosional* antara lain: pengembang, organisasi, konselor, terapis, pelatih.

Kecerdasan *naturalis* adalah suatu kebutuhan untuk bersatu dengan alam. Orang-orang yang mempunyai kecerdasan naturalis akan dapat bertahan hidup di

alam bebas, mereka akan mampu membedakan buah-buahan yang bisa dimakan dengan buah-buahan yang tidak dapat dimakan, membedakan antara ular yang berbisa dengan ular yang tidak berbisa. Namun pengertian alam dapat dikembangkan terhadap lingkungan sekitar di mana mereka berada. Misalnya kemampuan untuk memahami/mengenal lingkungan kerja dengan baik, kemampuan beradaptasi dengan kendaraan yang dipakai, dan sebagainya. Karier yang baik untuk pemilik kecerdasan *naturalis* antara lain: penjaga taman, pemandu wisata, petualang, oceanografer, patroli ski.

Howard Gardner dalam Zakkie (2011: 77) mendefinisikan kecerdasan *eksistensial* adalah suatu kecerdasan untuk mengetahui mengapa Anda berada di sini. Orang-orang yang memiliki kecerdasan *eksistensial* sering melakukan kreativitas dengan tujuan-tujuan personal. Pemilik kecerdasan *eksistensial* juga dapat memanfaatkan kemampuan berproses secara *interpersonal*. Karier yang baik untuk pemilik kecerdasan *eksistensial* antara lain: penginjil, pemasaran, motivator, manajer humas.

Sepuluh kecerdasan menurut Howard Gardner sangat penting untuk diketahui dalam proses pembelajaran maupun menyusun pelatihan, dengan mengetahui sepuluh kecerdasan, maka dapat disusun kebutuhan untuk masing-masing siswa atau peserta pelatihan, sehingga pembelajaran akan lebih optimal, efektif dan efisien serta mengalami percepatan.

Menyadari bahwa siswa yang mempunyai kecerdasan tinggi perlu mendapat pelayanan agar potensinya dapat berkembang optimal, maka pemerintah menjamin warganya yang mempunyai kecerdasan dan kebutuhan khusus untuk diberi layanan yang layak, sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 5 ayat 4 bahwa “warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak mendapatkan pendidikan khusus”. Implementasi pasal 5 ayat 4 tersebut, maka diterbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Siswa Yang Memiliki Kelainan Dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa. Dalam Peraturan Menteri tersebut dinyatakan bahwa pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua siswa yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan siswa pada umumnya”.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan, pasal 25 ayat 1 menyatakan bahwa Pemerintah provinsi melakukan pembinaan berkelanjutan kepada siswa yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, nasional, dan internasional.

Pemerintah provinsi menyelenggarakan paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan khusus bagi siswa yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa. Pemerintah menetapkan standar bagi sekolah penyelenggara pendidikan khusus, yakni Sekolah Setandar Nasional (SSN) atau Sekolah Kategori Mandiri (SKM), dengan status sekolah tersebut, berarti memiliki sumber daya yang memadai untuk menyelenggarakan pendidikan bagi siswa yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.

Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi siswa yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Pendidikan khusus berfungsi mengembangkan potensi keunggulan siswa menjadi prestasi nyata sesuai dengan karakteristik keistimewaannya. Tujuan Pendidikan khusus bagi siswa yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa ialah untuk mengaktualisasikan seluruh potensi keistimewaannya tanpa mengabaikan keseimbangan perkembangan kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, sosial, estetik, kinestetik, dan kecerdasan lain.

Program pendidikan khusus bagi siswa yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat berupa: a) program percepatan; dan/atau b) program pengayaan.

Program percepatan dapat dilakukan dengan persyaratan: a) siswa memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa yang diukur dengan test psikologi; b) siswa memiliki prestasi akademik tinggi dan/atau bakat istimewa di bidang seni dan/ atau olahraga; dan c) satuan pendidikan penyelenggara telah atau hampir memenuhi Standar Nasional Pendidikan.

Program percepatan sebagaimana dimaksud dapat dilakukan dengan menerapkan sistem kredit semester sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bentuk penyelenggaraan program pendidikan khusus bagi siswa yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa sebagaimana dimaksud dapat dilakukan dalam bentuk: a) kelas biasa; b) kelas khusus; atau c) satuan pendidikan khusus.

2.14 Kerangka Pikir

Untuk mendapatkan gambaran penelitian yang jelas tentang program akselerasi, maka kerangka pikir dalam penelitian ini difokuskan kepada 4 aspek, yakni Kontek, Input, Proses dan Produk. Kontek pada penelitian ini meliputi kebijakan pemerintah terkait dengan pendidikan inklusif, antara lain: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai landasan konstitusional, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif, serta peraturan-peraturan pendukung lainnya yang relevan.

Input pada penelitian ini adalah sumber daya sekolah yang meliputi sumber daya manusia diantaranya guru, tenaga kependidikan dan siswa. Perlu kiranya diketahui bagaimana sumber daya manusia yang menjadi input program akselerasi pendidikan, apakah inputnya sudah melalui seleksi yang benar, apakah seleksi siswa program akselerasi pendidikan di SMA Negeri 1 Terbanggi Besar sudah sesuai petunjuk teknis, apakah penentuan guru/ tenaga pendidik juga sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bagaimana dengan tenaga tata usaha/tenaga kependidikan, dan sebagainya.

Selain sumber daya manusia, sumber pendanaan juga merupakan faktor pendukung terselenggaranya program akselerasi pendidikan di SMA Negeri 1 Terbanggi Besar. Tanpa adanya dukungan dana yang memadai maka program akselerasi pendidikan akan mengalami hambatan. Oleh karena itu perlu adanya perencanaan dan penggunaan dana secara proporsional dan berimbang, sehingga dana yang digunakan lebih tepat sasaran. Penggunaan anggaran yang berlebihan

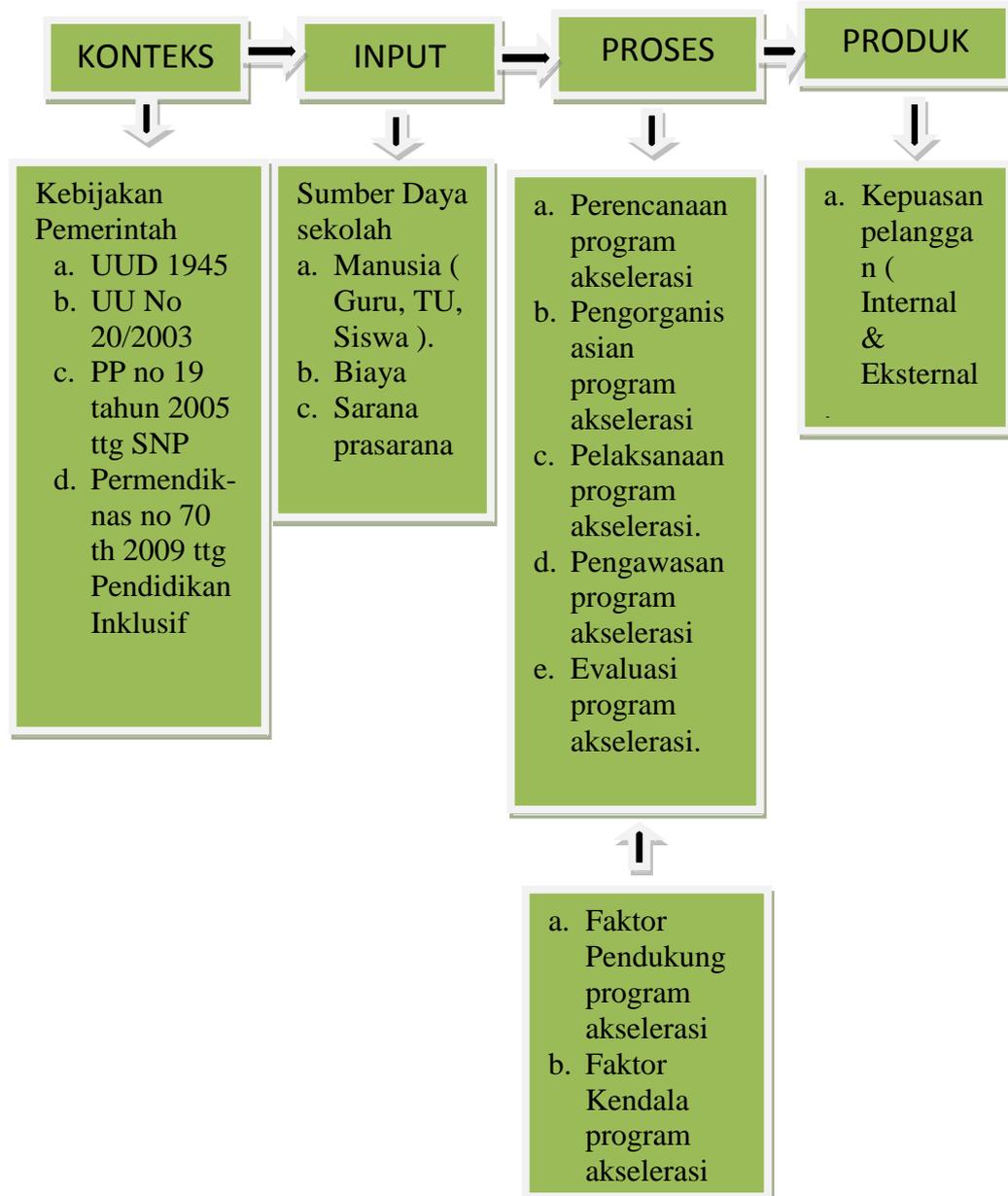
dan tidak efektif akan berdampak meningkatnya beban orang tua yang putra-putrinya masuk program akselerasi. Untuk itu, perlu adanya pertanggungjawaban penggunaan anggaran kepada orang tua ataupun pihak terkait secara transparan dan akuntabel.

Kualifikasi dan kompetensi guru, sarana prasarana yang memadai dan siswa yang memiliki kemampun sangat baik merupakan faktor pendukung program akselerasi pendidikan. Ketersediaan sarana prasarana yang baik dan pemanfaatan secara optimal akan mempertinggi ketercapaian tujuan program akselerasi itu sendiri, dan sebaliknya keterbatasan sarana prasarana dan pemanfaatan sarana prasarana yang tidak optimal akan menjadi kendala program akselerasi pendidikan.

Proses pada program akselerasi pendidikan meliputi: perencanaan program akselerasi, pengorganisasian program, pelaksanaan program akselerasi, pengawasan/evaluasi program akselerasi, dan faktor pendukung program akselerasi serta faktor kendala program akselerasi. Perencanaan program akselerasi merupakan langkah awal/proses awal dalam mendefinisikan tujuan program akselerasi pendidikan dan strategi dalam pencapaian tujuan serta aktivitas pencapaian tujuan tersebut. Jika perencanaan dilaksanakan dengan baik, maka keterlaksanaan suatu program juga baik. Pengorganisasian juga merupakan faktor penting dalam penyelenggaraan program akselerasi pendidikan, dengan pengorganisasian yang baik akan mempercepat tercapainya tujuan program pendidikan. Untuk itu, program akselerasi pendidikan perlu direncanakan, diorganisasikan, dilaksanakan, dan dievaluasi dengan sebaik-baiknya.

Produk pada program akselerasi pendidikan meliputi: kepuasan pelanggan internal (guru, staf tata usaha, dan siswa) dan pelanggan eksternal (orang tua dan masyarakat).

Secara singkat kerangka pikir dalam penelitian ini sebagai berikut :



Gambar 2.4 Kerangka Pikir Penelitian

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Rancangan Penelitian

Penelitian merupakan suatu proses secara sistematis dalam upaya mengumpulkan data dan informasi serta mengolah data dan informasi tersebut untuk menjawab suatu permasalahan yang ada melalui langkah-langkah yang sistematis.

Creswell (2015:5) mendefinisikan penelitian adalah suatu proses dari suatu langkah-langkah yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi untuk meningkatkan pemahaman tentang suatu topik atau isu. Lebih lanjut Creswell menyatakan bahwa di tingkat umum, penelitian terdiri atas 3 (tiga) langkah: 1) mengajukan pertanyaan; 2) mengumpulkan data untuk menjawab pertanyaan tersebut; 3) menyajikan jawaban untuk pertanyaan tersebut.

Sugiyono (2011:6) secara umum jenis penelitian pendidikan dapat dikelompokkan menjadi 5 (lima), yakni 1) menurut bidang penelitian; 2) menurut tujuan; 3) menurut metode; 4) menurut tingkat explanasi; dan 5) menurut waktu. Jika ditinjau berdasarkan bidang penelitian, maka penelitian ini merupakan jenis penelitian akademis yaitu penelitian yang dilakukan dalam bidang akademis oleh mahasiswa dalam membuat skripsi, tesis dan disertasi. Penelitian ini merupakan

sarana edukatif sehingga lebih mementingkan validasi internal, variabel penelitian terbatas serta kecanggihan analisis disesuaikan dengan jenjang pendidikan.

Berdasarkan jenis metodenya, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menekankan peneliti sebagai instrumen kunci, serta menjadikan manusia sebagai alat penelitian. Penelitian kualitatif bersifat induktif artinya dari hal yang bersifat khusus menuju kepada hal yang bersifat umum. Selain bersifat induktif, penelitian kualitatif juga bersifat deskriptif yaitu kegiatan pengumpulan data bersifat menggambarkan atau mendiskripsikan suatu gagasan atau suatu konsep menggunakan analisis data secara kuantitatif.

Pada penelitian kualitatif, pengambilan sampel umumnya dilakukan secara purposive, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/ statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Sugiyono (2011:15) Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Moleong (2004:9) menyatakan bahwa penelitian kualitatif berakar pada latar alamiah sebagai keutuhan dan sesuai dengan konteks (*holistic kontekstual*), rancangan kualitatif secara langsung menunjukkan setting dari individu-individu dalam suatu setting secara keseluruhan (*holistic*) serta tidak dipersempit menjadi

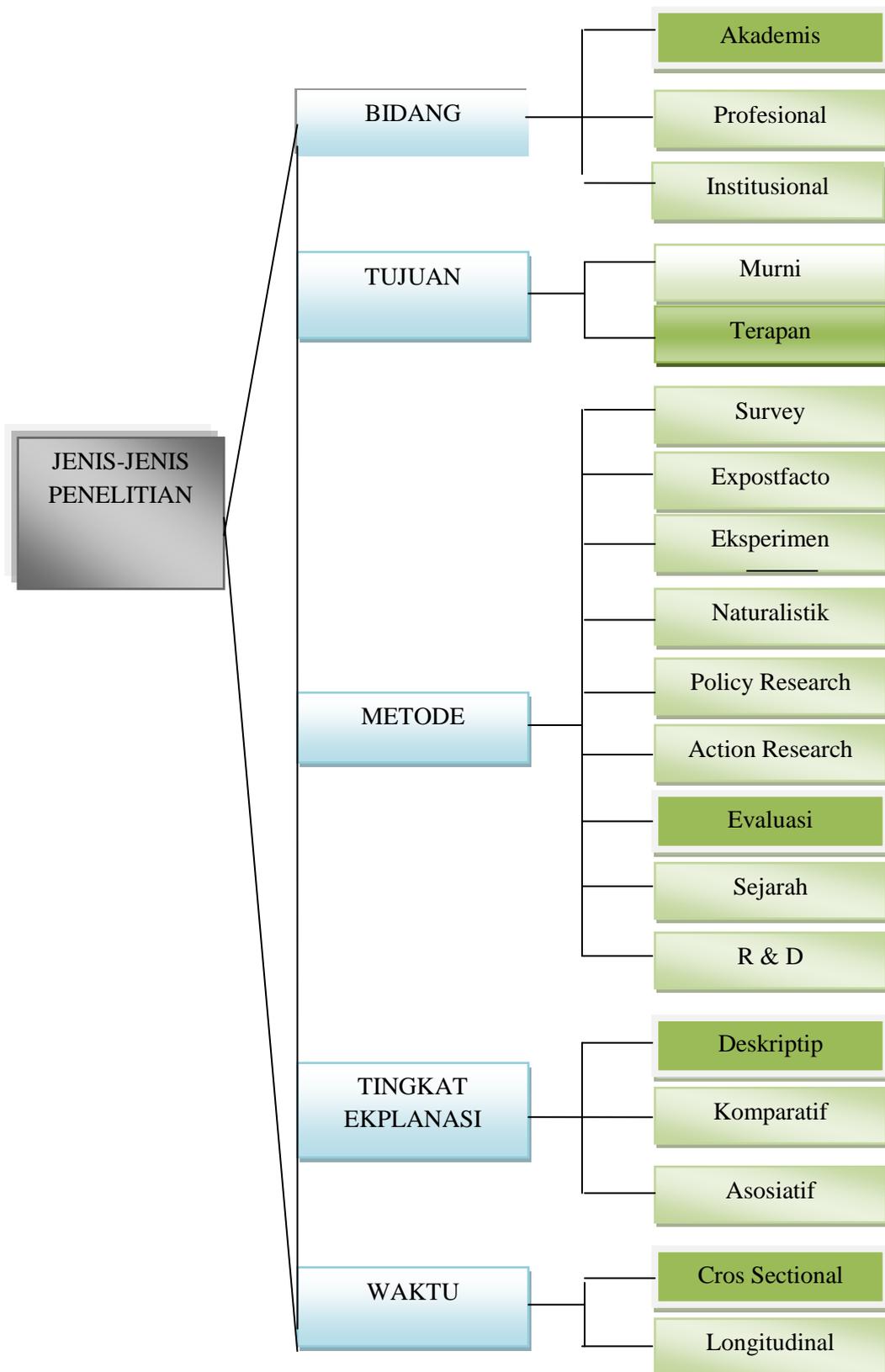
variabel terpisah, atau menjadi hipotesis, tetapi merupakan bagian secara keseluruhan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologis dengan rancangan study kasus.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan pertimbangan bahwa permasalahan dalam penelitian ini masih belum jelas, dan peneliti ingin memahami makna dibalik data yang tampak. Selain hal tersebut program akselerasi merupakan program yang kompleks, sehingga peneliti dapat berperan serta dan berinteraksi, melakukan wawancara terhadap pelaksanaan program akselerasi tersebut.

Sugiyono (2011:35-36) ada beberapa alasan kapan metode kualitatif dilaksanakan : a) bila masalah penelitian belum jelas, masih remang-remang, atau mungkin masih gelap; b) untuk memahami makna dibalik data yang tampak; c) untuk memahami interaksi sosial; d) memahami perasaan orang; e) untuk mengembangkan teori; f) untuk memastikan kebenaran data; g) meneliti sejarah perkembangan.

Ditinjau berdasarkan tingkat ekplanasinya, maka penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang menggunakan diskripsi dari suatu permasalahan yang diteliti, tetapi jika ditinjau berdasarkan waktunya, penelitian ini merupakan penelitian cros sectional yaitu penelitian yang memerlukan waktu tidak terlalu lama.

Untuk memahami uraian tersebut di atas, dapat dilihat pada bagan jenis-jenis penelitian berikut ini:



Gambar 3.1. Jenis-jenis Penelitian
(Sumber: Metode Penelitian Pendidikan, Sugiyono; 2011; hal 7)

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa :

1. Ditinjau dari bidangnya, penelitian ini merupakan penelitian akademis.
2. Ditinjau dari tujuannya, penelitian ini merupakan penelitian terapan.
3. Ditinjau dari metodenya, penelitian ini merupakan penelitian evaluasi.
4. Ditinjau dari tingkat ekplanasinya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif; dan
5. Ditinjau dari waktunya, penelitian ini merupakan penelitian cross sectional.

3.2 Tempat dan Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di SMA Negeri 1 Terbanggi Besar, alamat Jl. Jendral Ahmad Yani nomor 1 Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah. Sekolah ini pada awalnya bernama SMA Negeri Poncowati dan pada perkembangan berikutnya berubah nama menjadi SMA Negeri 1 Terbanggi Besar.

3.3 Waktu Penelitian

Sugiyono (2011:37) menyatakan bahwa pada umumnya waktu penelitian kualitatif cukup lama, karena tujuan penelitian kualitatif adalah bersifat penemuan, namun demikian kemungkinan jangka penelitian berlangsung dalam waktu yang pendek, bila telah ditemukan sesuatu dan datanya sudah jenuh.

Penelitian ini dimulai tgl 27 Januari 2015 sampai dengan 30 Juni 2015. Lamanya waktu penelitian ini dipengaruhi oleh faktor-faktor pendukung di lapangan termasuk tingkat kejenuhan dari jawaban responden di lapangan, dan kesempatan yang dimiliki informan maupun peneliti.

3.4 Kehadiran Peneliti

Pada penelitian kualitatif, peneliti bertindak sebagai instrument penelitian dan sekaligus dapat bertindak sebagai pengumpul data bahkan peneliti bertindak sebagai instrument kunci (*key instrument*), oleh karena itu kehadiran peneliti sebagai instrument kunci sangat diperlukan dalam lingkup penelitian, baik kehadiran pada tahap observasi maupun pada saat melakukan wawancara terstruktur dengan informan kunci yang dapat memberikan jawaban sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan.

Miles dan Huberman dalam Moleong (1994:4) menyatakan bahwa kehadiran peneliti di lokasi dalam sebuah penelitian kualitatif adalah suatu yang mutlak, karena peneliti bertindak sebagai instrument penelitian dan sekaligus sebagai pengumpul data. Kehadiran peneliti dalam penelitian kualitatif ini dapat bersifat rutin maupun insidental/ sewaktu-waktu, berupa kehadiran langsung di SMA Negeri 1 Terbanggi Besar.

Adapun kehadiran peneliti di SMA Negeri 1 Terbanggi Besar dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1 Jadwal Kehadiran Peneliti

NO	HARI/ TGL	KEGIATAN	URAIAN	WAKTU
1	JUM'AT 13/2/2015	Wawancara	Wawancara dengan Kasi Kurikulum Dinas Pendidikan Lampung Tengah	09-00 sd 09.25 wib
2	JUM'AT 13/2/2015	Observasi	Lingkungan Kantor Dinas Pendidikan Lampung Tengah	09.30 sd 10.30 wib
3	SENIN 16/2/2015	Observasi	Lingkungan SMA Negeri 1 Terbanggi Besar	08.00 sd 09.45 wib
4	SENIN 16/2/2015	Wawancara	Kepala Sekolah	10.00 sd 10.20 wib
5	JUM'AT 20/2/2015	Observasi	Sarana pendukung: ruang Laboratorium Kimia, Biologi, Fisika dan Multimedia	08.00 sd 09.00 wib
6	JUM'AT 20/2/2015	Wawancara	Wakil Kepala sekolah bidang kurikulum	09.00 sd 10.30 wib

7	JUM'AT 27/2/2015	Observasi	Ruang guru, perpustakaan, sarana olah raga, dan tempat parkir	08.00 sd 10.00 wib
8	JUM'AT 27/2/2015	Wawancara	Wakil Kepala sekolah bidang kesiswaan	10.10 sd 11.15 wib
9	JUM'AT 27/2/2015	Wawancara	Wakil Kepala sekolah bidang sarana prasarana	11.30 sd 12.00 wib
10	JUM'AT 6/3/2015	Wawancara	Wakil Kepala sekolah bidang hubungan masyarakat	09.00 sd 09.25
11	JUM'AT 6/3/2015	Observasi	Ruang tata usaha, ruang belajar, musholla dan kantin	08.00 sd 09.15
12	JUM'AT 6/3/2015	Wawancara	Guru Senior	09.30 sd 09.45
13	JUM'AT 6/3/2015	Wawancara	Guru Senior	09.45 sd 10.20
14	JUM'AT 6/3/2015	Wawancara	Guru Senior	10.30 sd 11.00
15	SABTU 7/3/2015	Wawancara	Tata Usaha	08.30 sd 08.45
16	SABTU 14/3/2015	Wawancara	Komite sekolah SMA Negeri 1 Terbanggi Besar	08.45 sd 09.25
17	SABTU 14/3/2015	Wawancara	Siswa program akselerasi	09.35 sd 09.45
18	SABTU 14/3/2015	Wawancara	Siswa program akselerasi	09.45 sd 09.55
19	SABTU 14/3/2015	Wawancara	Siswa program akselerasi	10.05 sd 10.20
20	JUM'AT 20/3/2015	Observasi	Koprasri sekolah, kegiatan kesiswaan, suasana istirahat, dan waktu kegiatan KBM	08.00 sd 11.00 wib
21	SABTU 21/3/2015	Observasi	Interaksi guru dengan guru, guru dengan siswa, staf tata usaha dengan staf tata usaha, staf taa usaha dengan siswa.	08.00 sd 11.00 wib

3.5 Sumber Data

Menurut Lofland dan Lofland dalam Moleong (2013:157) bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sumber data dalam penelitian kualitatif ini dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu data yang bersumber dari manusia dan data yang bersumber dari bukan manusia. Sumber data yang berasal dari manusia memiliki fungsi sebagai subyek atau kunci (Key

Informan), sumber informasinya dapat diperoleh melalui: Kasi Kurikulum Dikmen Dinas Pendidikan Lampung Tengah, Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Guru, TU, Komite Sekolah, dan Siswa. Secara Rinci informan penelitian dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel 3.2 Informan Penelitian

NO	INFORMAN	KODE	JUMLAH
1	Kasi Kurikulum Dinas Pendidikan Lampung Tengah	W-DP	1
2	Kepala Sekolah	W-KS	1
3	Wakil Kepala Sekolah	W-WK	4
4	Tenaga Pendidik/ Guru	W-GR	3
5	Tenaga Kependidikan/TU	W-TU	1
6	Komite sekolah	W-KM	1
7	Peserta Didik/ Siswa	W-SW	3
	Jumlah		14

Selain informasi yang bersumber dari manusia, ada pula informasi yang diperoleh melalui sumber-sumber lain, berupa dokumen penunjang seperti : Gambar, foto, catatan, dan dokumentasi hasil wawancara maupun liputan selama proses penelitian berlangsung.

Adapun kriteria yang mendasari penentuan informan pada penelitian ini antara lain :

1. Informan sudah cukup lama memahami obyek penelitian.
2. Informan sudah lama tinggal, beraktivitass dan berinteraksi dengan obyek penelitian.

3. Informan masih bekerja/ aktif di SMA Negeri 1 Terbanggi Besar dan terlibat dengan objek penelitian tersebut.
4. Informan mempunyai waktu untuk memberikan keterangan yang diperlukan oleh peneliti.
5. Informan diharapkan dapat memberikan informasi yang sebenarnya agar data yang diperoleh betul-betul mendukung fokus penelitian.

Berdasarkan Sumber data dan kriteria sumber data serta tujuan penelitian ini, maka peneliti menentukan informan secara purposive atau tehnik *purposive sampling*, yakni penentuan sampling secara bebas ditentukan oleh peneliti dengan memperhatikan kompetensinya terhadap tujuan penelitian.

Tehnik *Purposive Sampling* memberikan kebebasan kepada peneliti untuk menentukan informan yang akan dipilih sesuai dengan relevansi dan kedalaman informasi, sehingga pada teknik ini populasi tidak berarti harus mewakili sample yang ada.

Sumber data yang diperoleh dari dokumen pendukung dapat berfungsi sebagai indikator pelaksanaan Implementasi Program Akselesrasi Pendidikan di SMA Negeri 1 Terbanggi Besar yang mencakup semua aspek terkait dengan fokus penelitian tersebut, baik dokumen yang berbentuk foto, gambar, daftar, buku dan dokumen lainya tentang penyelenggaraan program Akselerasi Pendidikan di SMA Negeri 1 Terbanggi Besar.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap informan yang

berjumlah 14 (empat belas) orang sebagaimana data pada tabel informan. Wawancara ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran dan data secara langsung dari sumber/informan kunci dalam penelitian tersebut. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti merupakan wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang menggunakan daftar pertanyaan yang sudah tersusun.

Selain teknik wawancara, peneliti mengumpulkan data menggunakan metode observasi, yakni metode pengumpulan data dengan cara melihat langsung terhadap obyek penelitian. Data yang diperoleh melalui observasi akan di-*cross check* dengan data yang diperoleh melalui metode wawancara maupun dokumentasi, sehingga kesimpulan yang diambil akan menjadi lengkap dan valid. Observasi yang dilakukan oleh peneliti menggunakan observasi non partisipan.

Selain menggunakan teknik wawancara dan observasi, peneliti menggunakan teknik pengambilan data dengan studi dokumentasi, teknik ini menggunakan dokumen sebagai sumber informasi. Adapun secara rinci tehnik pengambilan data dapat dijabarkan sebagai berikut.

3.6.1 Wawancara

Moleong (2013:186) mendefinisikan wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Senada dengan Moleong, Hariwijaya (2013:64) menyatakan bahwa interviewe atau wawancara dipergunakan sebagai cara untuk memperoleh data dengan jalan mengadakan wawancara dengan nara sumber atau responden. Sugiyono (2011:194) menyatakan bahwa wawancara

digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang harus diteliti. Sedangkan Singarimbun (1998:192) menyatakan bahwa wawancara adalah mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden.

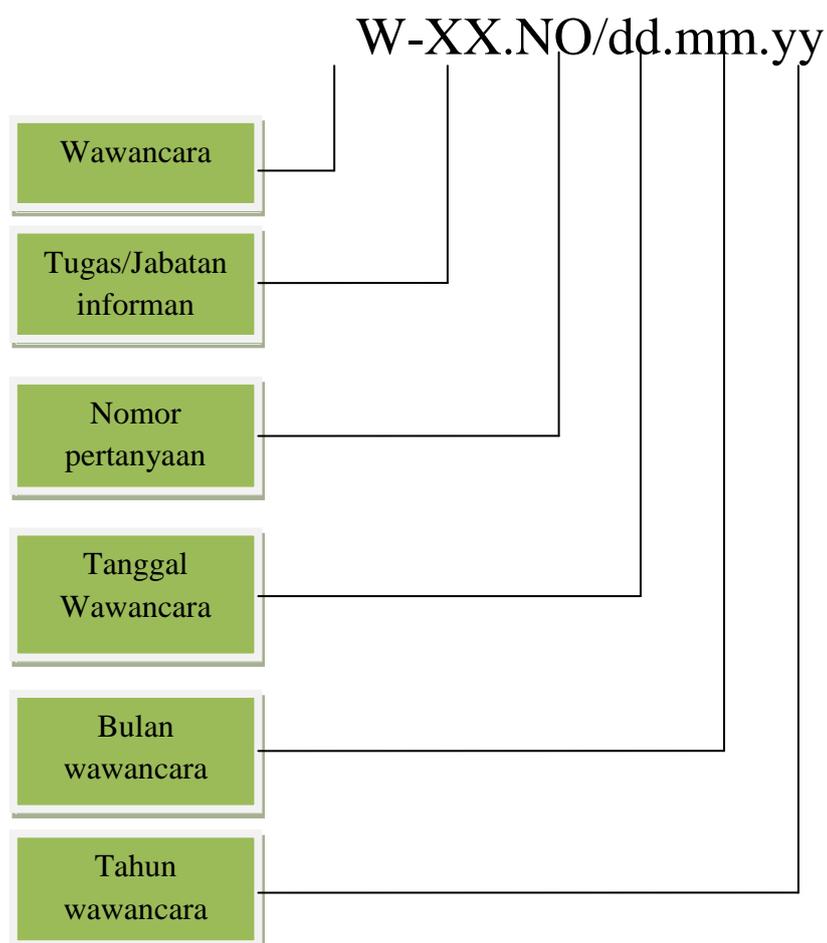
Menurut Guba dan Lincoln dalam Moleong (2013:188) bahwa pembagian wawancara antara lain (a) wawancara oleh tim atau panel; (b) wawancara tertutup dan wawancara terbuka; (c) wawancara riwayat secara lisan; (d) wawancara terstruktur dan tak terstruktur. Wawancara oleh tim adalah wawancara yang dilakukan oleh dua atau lebih terhadap seseorang yang diwawancarai. Wawancara tertutup adalah wawancara yang dilakukan tanpa disadari bahwa mereka sedang diwawancarai. Sedangkan wawancara terbuka adalah wawancara yang dilakukan diketahui oleh mereka yang sedang diwawancarai. Wawancara riwayat secara lisan adalah wawancara yang dilakukan terhadap orang-orang yang pernah membuat sejarah atau yang membuat karya ilmiah besar, sosial, pembangunan, perdamaian, dan sebagainya. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan, sedangkan wawancara tak terstruktur adalah wawancara yang dilakukan tanpa terlebih dahulu mempersiapkan pertanyaan yang akan diajukan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka wawancara adalah suatu bentuk interaksi verbal/ percakapan antara dua orang atau lebih, dalam hal ini peneliti bertatap muka langsung dengan informan sebagai upaya untuk memperoleh gambaran/ konstruksi yang terjadi sekarang tentang orang, program akselerasi pendidikan, aktivitas organisasi, motivasi dan lainnya. Wawancara yang

dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini bersifat terstruktur, hal ini agar peneliti dapat menggali informasi yang lengkap, akurat, dan terpercaya sesuai dengan hipotesis kerja peneliti dalam situasi yang rileks.

Pertanyaan yang ada pada penelitian ini ditujukan kepada informan sampai diperoleh jawaban informan pada titik jenuh, yaitu jawaban informan tidak ada lagi perubahan.

Untuk memudahkan peneliti ataupun pembaca dalam memahami hasil wawancara dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan teknik *coding* sebagai berikut:



Gambar 3.2 Sistem Pengkodean Wawancara Penelitian

Kode **W** adalah wawancara, kode **XX** menunjukkan informan yang diwawancarai, kode **XX** terdiri atas DP = Kasi Kurikulum, KS=Kepala Sekolah, WK= Wakil Kepala Sekolah bidang Kurikulum, WS= Wakil Kepala Sekolah bidang Kesiswaan, WP= Wakil Kepala Sekolah bidang Sarana prasarana, WH= Wakil Kepala Sekolah bidang Hubungan Masyarakat, GR= guru, TU= Tata Usaha, KM= Komite Sekolah, SW=Siswa).

NO adalah kode untuk nomor urut pertanyaan pada masing-masing informan, jika pada posisi tersebut tertulis angka 01 menunjukkan pertanyaan nomor urut 1 untuk informan tersebut, dan jika tertulis 20 menunjukkan pertanyaan dengan nomor urut 20 untuk informan tersebut. Sedangkan tanda “/” dimaksudkan untuk memisahkan antara kode informan dengan tanggal pelaksanaan wawancara.

Kode **dd** diambil dari kata date yang berarti tanggal, hal ini menunjukkan tanggal wawancara dilaksanakan. Misal tertulis 13, maka menunjukkan tanggal wawancara adalah tanggal 13.

Kode **mm** diambil dari kata month yang berarti bulan, hal ini menunjukkan bulan dilaksanakannya wawancara dengan informan tersebut.

Kode **yy** diambil dari kata year, yang berarti tahun pelaksanaan wawancara tersebut. Angka tahun yang diambil adalah dua digit terakhir pada penulisan tahun, misal tertulis 15, hal ini menunjukkan bahwa tahun wawancara 2015.

Sebagai ilustrasi, misal tertulis **W-DP.03/13.02.15**, maka mengandung pengertian bahwa wawancara dilakukan terhadap Kasi Kurikulum Dinas Pendidikan Lampung Tengah, untuk no urut pertanyaan ke-3 dan tanggal wawancara pada tanggal 13 bulan 2 (februari) tahun 2015.

Tabel 3.3 Jadwal wawancara

NO	HARI/ TGL	KODE	INFORMAN	WAKTU
1	JUM'AT 13/2/2015	W-DP	Kasi Kurikulum Dinas Pendidikan Lampung Tengah	09-00 sd 09.25 wib
2	SENIN 16/2/2015	W-KS	Kepala Sekolah	10.00 sd 10.20 wib
3	JUM'AT 20/2/2015	W-WK	Wakil Kepala sekolah bidang kurikulum	09.00 sd 10.30 wib
4	JUM'AT 27/2/2015	W-WS	Wakil Kepala sekolah bidang kesiswaan	10.10 sd 11.15 wib
5	JUM'AT 27/2/2015	W-WP	Wakil Kepala sekolah bidang sarana prasarana	11.30 sd 12.00 wib
6	JUM'AT 6/3/2015	W-WH	Wakil Kpsla sekolah bidang hubungan masyarakat	09.00 sd 09.25
7	JUM'AT 6/3/2015	W-GR	Guru Senior	09.30 sd 09.45
8	JUM'AT 6/3/2015	W-GR	Guru Senior	09.45 sd 10.20
9	JUM'AT 6/3/2015	W-GR	Guru Senior	10.30 sd 11.00
10	SABTU 7/3/2015	W-TU	Tata Usaha	08.30 sd 08.45
11	SABTU 14/3/2015	W-KM	Komite sekolah	08.45 sd 09.25
12	SABTU 14/3/2015	W-SW	Siswa	09.35 sd 09.45
13	SABTU 14/3/2015	W-SW	Siswa	09.45 sd 09.55
14	SABTU 14/3/2015	W-SW	Siswa	10.05 sd 10.20

3.6.2 Observasi

Untuk melengkapi dan menguji hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada informan, terkadang masih memiliki kekurangan-kekurangan artinya informasi yang diperoleh belum secara utuh dapat menggambarkan apa yang diharapkan dalam fokus penelitian tersebut, bahkan terkadang bisa terjadi informasi yang menyimpang. Untuk itu diperlukan Observasi yang dapat mendiskripsikan secara detil terhadap apa yang terjadi dan bagaimana hal itu bisa terjadi.

Hariwijaya (2013:63) mendefinisikan observasi adalah metode pengumpulan data secara sistematis melalui pengamatan dan pencatatan terhadap fenomena yang diteliti. Sutrisno Hadi dalam Sugiyono (2011:203) menyatakan bahwa observasi merupakan proses yang kompleks suatu proses yang tersusun dari pelbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.

Berdasarkan proses pelaksanaan pengumpulan data, observasi dapat dibedakan menjadi 2, yaitu observasi partisipan (*participant observation*) dan observasi non partisipan (*non participant observation*). Observasi partisipan adalah observasi dimana peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Sedangkan observasi non partisipan adalah observasi dimana peneliti tidak terlibat terhadap orang atau obyek yang sedang diteliti, tetapi bertindak sebagai pengamat independen.

Observasi program akselerasi pendidikan di SMA N 1 Terbanggi Besar, peneliti menggunakan observasi non partisipan, karena peneliti tidak terlibat langsung dengan obyek penelitian, tetapi hanya sebagai pengamat independen. Ada beberapa hal yang menjadi bahan observasi pada penelitian ini antara lain : sarana prasarana pendukung, proses kegiatan belajar mengajar program akselerasi, pengelolaan program akselerasi, pembagian tugas, pengawasan program akselerasi, evaluasi program akselerasi serta tingkat kepuasan pelanggan internal program akselerasi (guru, staf tata usaha, dan siswa) dan pelanggan eksternal program akselerasi (komite sekolah, orang tua dan masyarakat).

Tabel 3.4 Obyek Observasi

No	Ragam Situasi yang Diamati	Keterangan
1	Kondisi Fisik dan Sosial ; 1. Ruang Kabiddikmen Dinas Pendidikan Lampung Tengah 2. Lingkungan SMA N 1 Terbanggi Besar 6. Ruang Kepala SMA N 1 Terbanggi Besar 7. Ruang Wakil Kepala SMA N 1 Terbanggi Besar 8. Ruang Tata Usaha SMA N 1 Terbanggi Besar 9. Ruang guru SMA N 1 Terbanggi Besar 10. Ruang Belajar Program Akselerasi SMA N 1 Terbanggi Besar 11. Ruang perpustakaan SMA N 1 Terbanggi Besar 12. Ruang Laboratorium IPA (Fisika, Kimia, Biologi) 13. Ruang Multi Media SMA N 1 Terbanggi Besar 14. Sarana Olah raga 15. Sarana Umum (Musholla,Aula , Tempat Parkir, Kantin, Koperasi Sekolah)	Sarana prasarana, hubungan sosial

3.6.3 Dokumentasi

Guba dan Lincoln dalam Moleong (2013:216) mendefinisikan dokumen ialah setiap bahan tertulis ataupun film, lain dari record, yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik.

Metode dokumentasi adalah tehnik pengumpulan data dengan cara menggunakan dokumen sebagai sumber informasi. Pada penelitian program akselerasi pendidikan di SMA Negeri 1 Terbanggi Besar, peneliti melakukan metode dokumentasi sebagai upaya dalam pengumpulan data dengan melihat dokumen, arsip-arsip dan rekaman yang dimiliki oleh SMA Negeri 1 Terbanggi Besar. Teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi digunakan peneliti untuk mengumpulkan data dari sumber-sumber non insane, yakni berupa dokumen-dokumen atau arsip-arsip dan rekaman.

Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan penggunaan studi dokumentasi dalam penelitian program akselerasi ini :

1. Dari segi waktu : perolehan informasi dapat lebih cepat.
2. Dari segi biaya: lebih murah biaya yang diperlukan.
3. Dari segi akurasi: data lebih akurat, stabil dan dapat dianalisis kembali.
4. Dari segi konteks: mempunyai kontekstual yang baik, relevan dan bersifat mendasar.
5. Dari segi Akuntabilitas: merupakan data yang sangat akuntabel dan legal.
6. Dari segi reaktivitas: data pada studi dokumen bersifat nonreaktif, sehingga tidak sulit ditemukan dengan teknik kajian ini.

Dari uraian di atas, peneliti menentukan teknik pengumpulan data pada penelitian program akselerasi pendidikan di SMA Negeri 1 Terbanggi Besar dengan menggunakan metode wawancara, observasi nonpartisipatif dan dokumentasi. Sehingga kesimpulan yang diperoleh merupakan kesimpulan yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tabel 3.5 Dokumen Penelitian

No	Jenis Dokumen
1	Dokumen Personalia 1. Kepala SMA N 1 Terbanggi Besar 2. Wakil Kepala SMA N 1 Terbanggi Besar 3. Guru SMA N 1 Terbanggi Besar 4. Staf tata usaha SMA N 1 Terbanggi Besar
2	Dokumen Kurikulum 1. Dokumen Kurikulum program akselerasi. SMA N 1 Terbanggi Besar 2. Nilai rata-rata raport semester 1 samapi dengan semester 5 siswa program akselerasi SMA N 1 Terbanggi Besar 3. Prestasi Akademik siswa program akselerasi pendidikan.
3	Dokumen Kesiswaan 1. Jumlah kelas dan jumlah seluruh siswa SMA N 1 Terbanggi Besar tahun ajaran 2014/2015 2. Jumlah siswa program akselerasi SMA N 1 Terbanggi Besar tahun ajaran 2014/2015 3. Jumlah siswa program akselerasi 5 tahun berturut-turut 4. Persyaratan seleksi masuk program akselerasi SMA N 1 Terbanggi Besar 5. Hasil test IQ siswa program akselerasi SMA N 1 Terbanggi Besar 6. Hasil indentifikasi 10 kecerdasan siswa program akselerasi SMA N 1

	<p>Terbanggi Besar</p> <p>7. Hasil identifikasi gaya belajar siswa program akselerasi SMA N 1 Terbanggi Besar</p> <p>8. Program kegiatan kesiswaan SMA N 1 Terbanggi Besar</p>
4	<p>Dokumen Sarana prasarana</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Denah Lokasi SMA N 1 Terbanggi Besar 2. Sarana prasarana Ruang Kepala SMA N 1 Terbanggi Besar 3. Sarana ruang wakil kepala SMA N 1 Terbanggi Besar 4. Sarana Ruang guru SMA N 1 Terbanggi Besar 5. Sarana ruang tata usaha SMA N 1 Terbanggi Besar 6. Sarana ruang belajar program akaselerasi SMA N 1 Terbanggi Besar 7. Sarana Perpustakaan SMA N 1 Terbanggi Besar 8. Sarana Laboratorium IPA (Kimia, Fisika, Biologi) 9. Ruang Multi media SMA N 1 Terbanggi Besar 10. Sarana Olah raga. 11. Sarana Umum (Aula, Musholla, Kantin, Koperasi Sekolah)
5	<p>Dokumen Pembiayaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber dana program akselerasi pendidikan SMA N 1 Terbanggi Besar 2. Dokumen KAS/APBS tahun pelajaran 2014/2015 SMA N 1 Terbanggi Besar
6	<p>Dokumen Organisasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kab Lampung Tengah. 2. Struktur organisasi SMA Negeri 1 Terbanggi Besar 3. Struktur organisasi komite SMA N 1 Terbanggi Besar 4. Struktur organisasi program akselerasi Pendidikan SMA N 1 Terbanggi Besar. 5. Struktur organisasi perpustakaan SMA N 1 Terbanggi Besar 6. Struktur organisasi laboratorium SMA N 1 Terbanggi Besar 7. Stuktur Organisasi Multi Media SMA N 1 Terbanggi Besar 8. SK pembagian tugas (Waka, wali kelas, mengajar, ekstra)
7	<p>Dokumen Pendukung</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Propil SMA N 1 Terbanggi Besar 2. Visi, Misi dan Tujuan sekolah 3. Peraturan Pemeintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 70 tahun 2009 tentang pendidikan inklusif

3.7 Teknik Analisa Data

Untuk mengungkap implementasi program akselerasi pendidikan di SMA Negeri 1 Terbanggi Besar Lampung Tengah, maka perlu dilakukan telaah terhadap fenomena atau peristiwa secara menyeluruh terhadap semua bagian yang membentuk fenomena dan keterkaitan satu dengan yang lainnya. Analisis data yang diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi dapat dilakukan

secara kualitatif sehingga akan diperoleh struktur suatu fenomena yang terjadi di lapangan.

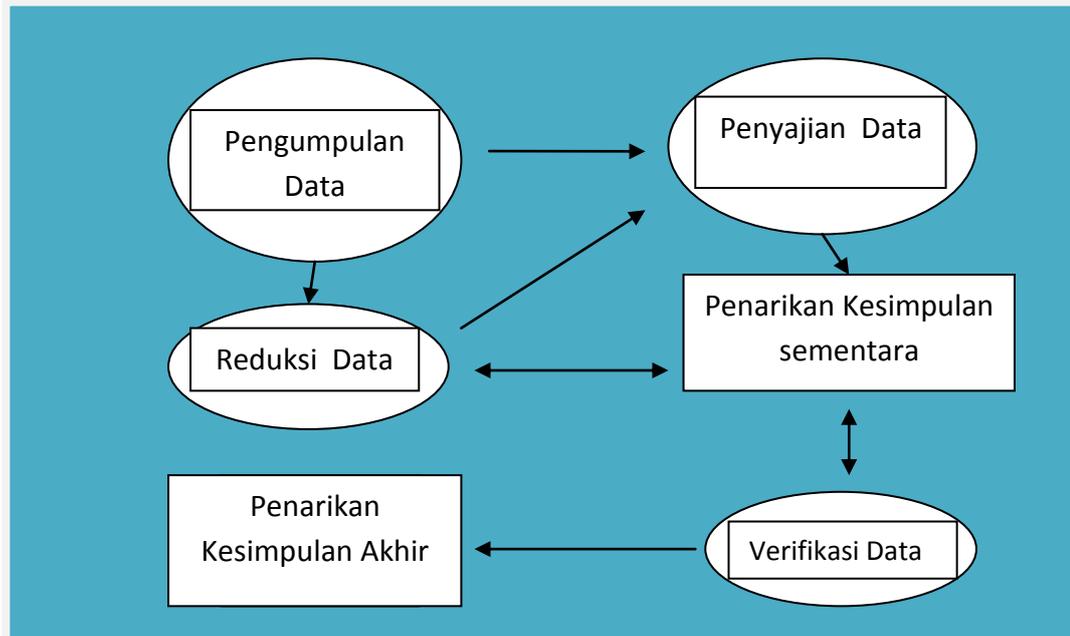
Tabel 3.6 Pengkodean Informan

NO	TEKNIK PENGUMPULAN DATA	KODE	SUMBER DATA	KODE
1	Wawancara	W	1. Kasi Kurikulum 2. Kepala sekolah 3. Wakil kepala sekolah 4. Guru 5. Tata Usaha 6. Komite Sekolah 7. Siswa	DP KS WK GR TU KM SW
2	Observasi	O		
3	Dokumentasi	D		

Milles dan Huberman (1992:15) menyatakan bahwa data kualitatif terdiri atas banyak kata-kata dan bukan angka-angka yang deskripsinya memerlukan interpretasi sehingga dapat diketahui makna dari kata-kata tersebut, sehingga dalam analisis data harus dilakukan selama dan setelah pengumpulan data. Menurut Patton (1980:22) menyatakan bahwa data dalam penelitian kualitatif terdiri atas: 1) deskripsi yang rinci (*detailed description*) mengenai situasi, peristiwa, orang, interaksi, dan perilaku; 2) pernyataan seseorang (*direct quotation*) tentang pengalaman, sikap, keyakinan, dan pikiran, serta dari dokumen-dokumen.

Analisis data dapat dilakukan dengan menggunakan model interaktif (*interaktif model*), yakni suatu model yang menggambarkan interaksi antara 4 komponen (pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan sementara, serta verifikasi).

Langkah-langkah analisis data pada penelitian ini dapat dilihat pada alur berikut ini :



Gambar 3.3 Analisis Data Berdasarkan Model Interaktif Modifikasi Miles dan Huberman

3.7.1 Reduksi Data

Reduksi data adalah suatu proses terhadap data melalui pemilihan data, pemusatan, penyederhanaan, abstraksi dan transparansi data mentah/ data kasar yang diperoleh di lapangan dan berlangsung selama proses pengumpulan data. Berkaitan dengan hal tersebut, peneliti melakukan reduksi data selama proses awal mencari data hingga data selesai diperoleh. Kegiatan reduksi data tersebut dimaksudkan agar peneliti maupun pembaca dapat memahami/ mencerna data yang diolah tersebut lebih mudah dipahami.

3.7.2 Penyajian Data

Agar data yang diperoleh mudah dipahami dan lebih menarik, maka perlu adanya penyajian data yang baik dan tepat. Penyajian data dapat dilakukan

dengan menggunakan diagram batang, diagram garis, tabel distribusi, diagram lingkaran, maupun bentuk penyajian yang lainnya.

Masing-masing bentuk penyajian data tersebut mempunyai keunggulan dan kelemahan. Pada prinsipnya bahwa penyajian data tersebut merupakan penyederhanaan informasi yang kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana dan mudah dipahami.

Berkaitan dengan penyajian data tersebut, maka peneliti mencoba menyajikan data yang diperoleh dalam penelitian menjadi bentuk yang lebih menarik, baik menggunakan matriks, table, maupun bentuk lainnya.

3.7.3 Verifikasi Data

Agar kesimpulan yang diperoleh menjadi baik, maka perlu didukung dengan pengolahan data yang baik, diantaranya data yang diperoleh dalam hasil penelitian perlu dilakukan verifikasi data. Tahap verifikasi merupakan tahap peninjauan ulang terhadap informasi/ catatan yang diperoleh di lapangan selama proses pencarian data berlangsung, sehingga diharapkan ada temuan yang dihasilkan dari penelitian lapangan tersebut. Menurut Nasution (1988:130) bahwa dalam membuat kesimpulan selalu diverifikasi selama penelitian berlangsung.

3.8 Pengecekan Keabsahan Data

Pada penelitian kualitatif, pengecekan keabsahan data merupakan kegiatan penting yang tidak dapat ditinggalkan, Miles & Huberman (1998) menyatakan bahwa pengecekan keabsahan data tersebut dapat dilakukan melalui tiga cara, yaitu : *kredibilitas*, *dependabilitas* dan *konfirmasiabilitas*.

Kredibilitas adalah pengecekan kebenaran data yang dilakukan untuk membuktikan apakah ada kesesuaian antara yang diamati dengan yang terjadi sesungguhnya di lapangan. Terkait tahapan ini, peneliti melakukan klarifikasi dengan membacakan transkrip hasil wawancara dan observasi kepada informan, agar tidak terjadi transkrip yang tidak benar, maka akan dilakukan perbaikan dan hasil perbaikan tersebut diserahkan kepada subyek agar bisa diperiksa ulang kebenarannya serta dibubuhi paraf. Dalam penelitian kualitatif derajat kebenaran data dapat dipergunakan dalam rangka memenuhi kriteria (nilai), dan kebenaran data dari informan tidak dapat dimanipulasi.

3.8.1 Triangulasi Data

Untuk memeriksa keabsahan data, maka perlu pemeriksaan terhadap data yang diperoleh. Moleong (2009:330) menyatakan bahwa Triangulasi adalah tehnik keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau perbandingan terhadap data itu.

Secara umum tehnik triangulasi data ada 4 (empat), yakni 1) triangulasi metode; 2) triangulasi antar peneliti; 3) triangulasi sumber data; dan 4) triangulasi teori. Triangulasi metode adalah tehnik pemeriksaan keabsahan data dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara metode yang berbeda, yakni metode wawancara, observasi dan survey terhadap responden yang sama. Berkaitan dengan tiga metode ini, maka peneliti melakukan ketiga metode tersebut sehingga data atau informasi yang diperoleh lebih akurat.

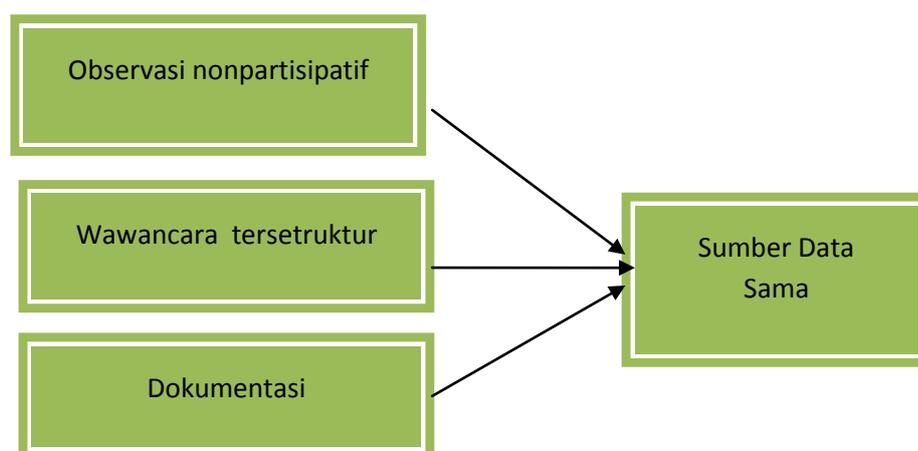
Triangulasi antar peneliti dilakukan jika penelitian dilakukan secara berkelompok, sehingga antar peneliti/ kelompok peneliti bisa saling menganalisa

data/informasi yang diperoleh satu dengan yang lainnya. Berkaitan dengan triangulasi antar peneliti, maka peneliti tidak melakukan pemeriksaan keabsahan data/informasi tersebut dengan cara triangulasi antar peneliti karena penelitian ini dilakukan secara individu.

Triangulasi sumber data dilakukan dengan cara menggali informasi tertentu dari berbagai sumber yang berbeda dengan metode yang sama, hal ini dimaksudkan agar adanya peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah ditemukan.

Triangulasi teori adalah tehnik membandingkan antara rumusan informasi atau *thesis statement* yang diperoleh peneliti dengan persepektif teori yang relevan, sehingga tidak terjadi bias individual peneliti atas kesimpulan yang diperoleh. Berkaitan dengan triangulasi teori, maka peneliti melakukan persepektif teori yang mendukung topik penelitian, sehingga peneliti memiliki pemahaman yang mendalam tentang topik kajian tersebut.

Adapun Desain Triangulasi dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 3.4 Model Desain Triangulasi
(Sumber : Metode Penelitian Pendidikan, Sugiyono; 2011; hal 331)

3.9 Tahap Penelitian

Tahapan yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini meliputi 1) tahap pra lapangan; 2) tahap pekerjaan lapangan; 3) tahap pelaporan hasil penelitian.

3.9.1. Tahap Pra Lapangan

Pada tahapan pra lapangan, peneliti melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Membuat rencana penelitian
- b. Memilih lokasi sebagai tempat untuk penelitian
- c. Mengurus ijin penelitian
- d. Observasi awal ke lokasi penelitian
- e. Menentukan dan menetapkan siapa yang tepat menjadi informan (pemberi informasi).
- f. Menyiapkan peralatan dan perlengkapan penelitian

3.9.2 Tahap Pekerjaan Lapangan

Pada tahapan pekerjaan lapangan, kegiatan yang dilakukan oleh peneliti antara lain:

- a. Peneliti memahami apa yang menjadi latar belakang penelitian dan mempersiapkan segala sesuatu yang harus dipersiapkan.
- b. Peneliti melakukan kegiatan lapangan.
- c. Peneliti melakukan peran serta sebagai instrumen kunci dan sekaligus mengumpulkan data yang diperlukan.

3.9.3 Tahap Pelaporan Hasil Penelitian

Pada tahap pelaporan hasil penelitian, kegiatan yang dilakukan oleh peneliti antara lain :

- a. Peneliti mengumpulkan data yang diperoleh dari hasil penelitian
- b. Peneliti melakukan verifikasi data
- c. Peneliti membuat kerangka dasar laporan hasil penelitian (Judul, Sanwacana, Daftar Isi, Pendahuluan, Landasan Teori, Metode Penelitian, Pembahasan, Kesimpulan dan saran)
- d. Peneliti menyusun laporan hasil penelitian
- e. Peneliti melakukan konsultasi kepada pembimbing I dan pembimbing II
- f. Peneliti melakukan perbaikan/revisi laporan hasil bimbingan
- g. Peneliti melakukan konsultasi/bimbingan tahap kedua kepada pembimbing I dan Pembimbing II
- h. Peneliti melakukan perbaikan kedua dari hasil bimbingan
- i. Peneliti meminta persetujuan pembimbing I dan pembimbing II untuk mengadakan seminar hasil.
- j. Peneliti mengajukan persetujuan ketua program studi untuk mengadakan seminar hasil.
- k. Peneliti mendaftarkan proposal hasil kepada sekretariat program untuk mengikuti seminar hasil.
- l. Pelaksanaan seminar hasil
- m. Revisi/perbaikan seminar hasil
- n. Konsultasi kepada pembimbing I dan pembimbing II hasil revisi seminar hasil.

- o. Mendaftarkan ujian komprehensif
- p. Pelaksanaan ujian komprehensif.
- q. Revisi tahap I hasil ujian komprehensif.
- r. Konsultasi tahap I dengan penguji I, penguji II, Pembimbing I, Pembimbing II.
- s. Perbaiki hasil konsultasi tahap I dengan penguji dan pembimbing.
- t. Konsultasi tahap II dengan penguji dan pembimbing.
- u. Pengiriman Jurnal Nasional.
- v. Cetak tesis rangkap 5 (lima)
- w. Pengesahan tesis oleh pembimbing I, pembimbing II, Ketua Program Studi Manajemen Pendidikan, Ketua Jurusan Ilmu Pendidikan, Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dan Direktur Program Pascasarjana.
- x. Pendaftaran wisuda

BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa :

1. Perencanaan Program Akselerasi Pendidikan di SMA Negeri 1 Terbanggi Besar dilakukan oleh tim pengembang sekolah dan tim pengembang kurikulum yang terdiri atas Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, dan koordinator program akselerasi melalui tahapan-tahapan perencanaan.
2. Pengorganisasian Program Akselerasi Pendidikan di SMA Negeri 1 Terbanggi Besar dilakukan oleh tim pengembang sekolah dan tim pengembang kurikulum yang terdiri atas Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, dan koordinator program akselerasi melalui langkah-langkah pengorganisasian.
3. Pelaksanaan Program Akselerasi Pendidikan di SMA Negeri 1 Terbanggi Besar dilakukan oleh tim pengembang sekolah dan tim pengembang kurikulum yang terdiri atas Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, dan koordinator program akselerasi, tetapi tidak dilengkapi dengan membuat *job discription*.
4. Pengawasan Program Akselerasi Pendidikan di SMA Negeri 1 Terbanggi Besar dilakukan oleh kepala sekolah dan wakil kepala sekolah bidang

kurikulum. Pengawasan dilakukan terhadap proses pembelajaran, bukan pengawasan terhadap pelaksanaan program akselerasi.

5. Evaluasi Program Akselerasi Pendidikan di SMA Negeri 1 Terbanggi Besar bersifat umum. Dinas Pendidikan Provinsi Lampung dan Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah belum pernah mengadakan evaluasi program akselerasi pendidikan di SMA Negeri 1 Terbanggi Besar. Pada tahun pelajaran 2015/2016, SMA Negeri 1 Terbanggi Besar tidak lagi membuka kelas akselerasi, dan siswa program akselerasi yang masih ada dilanjutkan sampai mengikuti ujian nasional tahun pelajaran 2015/2016.
6. Faktor-faktor Pendukung Program Akselerasi Pendidikan di SMA Negeri 1 Terbanggi Besar meliputi: terpenuhinya sarana prasarana yang dibutuhkan, jumlah siswa cerdas istimewa yang memadai, kualifikasi dan kompetensi pendidik, tercukupinya dana/biaya penyelenggaraan program akselerasi, dukungan masyarakat.
7. Faktor-faktor Kendala Program Akselerasi Pendidikan di SMA Negeri 1 Terbanggi Besar meliputi: pengelolaan KBM dan penyusunan jadwal kegiatan, kurangnya pembinaan pemerintah terhadap penyelenggaraan program akselerasi di SMA N 1 Terbanggi Besar.
8. Kepuasan pelanggan internal dan eksternal program akselerasi pendidikan SMA Negeri 1 Terbanggi Besar sangat baik. Pelanggan internal dan eksternal merasa puas, karena sudah terpenuhinya keinginan dan kebutuhan mereka berupa penyediaan sarana prasarana yang dibutuhkan, proses kegiatan belajar mengajar yang baik, pembiayaan yang terjangkau. Namun demikian orang tua

siswa merasa kurang puas dengan sedikitnya jumlah siswa akselerasi yang diterima di perguruan tinggi negeri melalui jalur undangan.

5.2. Implikasi

Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa. Sedangkan akselerasi pendidikan adalah suatu bentuk pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan.

Program akselerasi pendidikan ini dapat dilaksanakan pada jenjang sekolah menengah pertama maupun sekolah menengah atas. Untuk melaksanakan program akselerasi pendidikan dengan baik, diperlukan adanya fungsi manajemen dengan baik pula. Adapun fungsi manajemen tersebut meliputi 1) perencanaan program akselerasi; 2) pengorganisasian program akselerasi; 3) pelaksanaan program akselerasi; 4) pengawasan program akselerasi; dan 5) evaluasi program akselerasi. Di samping 5 (lima) fungsi manajemen tersebut, dalam pengelolaan program akselerasi perlu mengetahui faktor-faktor pendukung dan faktor-faktor yang menjadi kendala, serta bagaimana tingkat kepuasan pelanggan program akselerasi tersebut.

Penerapan fungsi manajemen pada pengelolaan program akselerasi pendidikan tidak hanya akan berdampak secara langsung terhadap pelaksanaan program, tetapi memberikan kontribusi terhadap efisiensi dan efektifitas program. Fungsi manajemen akan memberikan arahan pada penyelenggaraan program

akselerasi secara efektif dan efisien, hal tersebut akan berimplikasi pada meningkatnya kepercayaan pelanggan internal maupun pelanggan eksternal.

Tingginya tingkat kepercayaan pelanggan terhadap penyelenggaraan program akselerasi pendidikan, akan memudahkan satuan pendidikan untuk mendapatkan sumbangan dana dan mewujudkan pelaksanaan program yang lebih baik. Implikasi penyelenggaraan program akselerasi yang baik akan berdampak pada terjaganya kualitas sistem penyelenggaraan program akselerasi, sehingga pendidik dan tenaga kependidikan akan merasa bangga dan puas terlibat dalam pengelolaan program akselerasi, dan terjadinya efisiensi dan efektifitas penggunaan alat/bahan dan dana untuk mencapai tujuan organisasi.

5.3. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti menyarankan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung hendaknya membina pelaksanaan program akselerasi pendidikan di SMA Negeri 1 Terbanggi Besar melalui kegiatan supervisi dan evaluasi program, agar pelaksanaan program akselerasi berjalan dengan sebaik-baiknya.

2. Kepala Dinas Pendidikan Lampung Tengah.

Kepala Dinas Pendidikan Lampung Tengah hendaknya terlibat dalam pengelolaan program akselerasi pendidikan di SMA Negeri 1 Terbanggi Besar, baik dalam hal perencanaan, pengawasan dan evaluasi program maupun dalam pemberian bantuan penyelenggaraan program akselerasi pendidikan tersebut.

3. Kepala SMA Negeri 1 Terbanggi Besar

Kepala SMA Negeri 1 Terbanggi Besar hendaknya dapat menerapkan fungsi manajemen dengan baik dalam melaksanakan program akselerasi pendidikan meliputi: perencanaan program akselerasi, pengorganisasian program akselerasi, pelaksanaan program akselerasi, pengawasan program akselerasi, evaluasi program akselerasi, pemanfaatan faktor-faktor pendukung program akselerasi dan meminimalisir faktor kendala program akselerasi, serta mempertimbangkan kepuasan pelanggan sebagai bentuk layanan publik.

4. Dewan Guru SMA Negeri 1 Terbanggi Besar

Dewan guru yang mengajar program akselerasi pendidikan, hendaknya memahami kemampuan dan karakter siswa, agar siswa dapat berkembang secara optimal, dan dapat diterima di berbagai perguruan tinggi negeri program unggulan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto. 2013. *Dasar-dasar evaluasi pendidikan(Edisi 2)*. Jakarta.
- Aziz. 2012. *Karakter Guru Profesional*. Jakarta. Al-Mawardi Prima.
- Creswell. 2015. *Riset Pendidikan, Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Riset Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Daulay. 2007. *Penidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.
- Fuad. 2014. *Manajemen Pendidikan Berbasis Masyarakat*. Jakarta. PT RAJAGRAFINDO PERSADA.
- Hamalik. 2013. *Dasar-dasar Pengembangan Kurikulum*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya.
- Hermino. 2014. *Manajemen Kurikulum Berbasis Karakter*. Bandung. ALFABETA.
- Jahja. 2004. *Wawasan Pendidikan*. Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Tenaga Kependidikan.
- Kompri. 2015. *Manajemen Pendidikan, Komponen-komponen Elementer Kemajuan Sekolah*. Yogyakarta. AR-RUZZ MEDIA.
- Lucy. 2012. *Dahsyatnya brain smart teching cara super jitu optimalkan kecerdasan otak dan prestasi belajar anak*. Jakarta. Penebar Plus.
- Makmur. 2009. *Teori Manajemen Stratejik dalam Pemerintahan dan Pembangunan*. Bandung. Refika Aditama.
- Miles, Matthews dan Huberman A, Michael. 1992. *Analisis Data Kualitatif : Buku sumber tentang Metode-metode Baru*. Jakarta. UI Press.
- Moleong. 2004. *Metode Kualitatif, Edisi revisi*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya.

- Moleong. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 tentang *Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan*. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang *Standar Nasional Pendidikan*.
- Purwanto. 2011. *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*. Bandung. Rosda Karya.
- Rachmawati. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta. ANDI.
- Russel. 1999. *Accelerated Learning fieldbook*. San Francisco. Jossey-Bass.
- Sallis. 2001. *Manajemen Mutu Terpadu Pendidikan*. Yogyakarta. IRCiSoD.
- Samani. 1999. *Panduan Manajemen Sekolah*. Jakarta. Direktorat Dikmenum, Ditjen Dikdasmen, Depdikbud.
- Sanjaya. 2009. *Kurikulum dan Pembelajaran: Teori dan Praktik Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)*. Jakarta. Kencana.
- Sihombing. 2003. *Pembiayaan Pendidikan*. Silangkitan. ISBN 979-3116-28-5.
- Sogiyono. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung. ALFABETA CV.
- Supiyanto. 2006. *Fisika SMA Jilid 1 Untuk SMA Kelas X*. Jakarta. PHIβETA.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta. Sekretariat Jenderal MPR RI.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta. BP Bina Cipta.
- Usman. 2014. *Manajemen, Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan*. Jakarta. PT Bumi Aksara.
- Wibisono. 2011. *Manajemen Kinerja*. Jakarta. Rajagrafindo Persada.